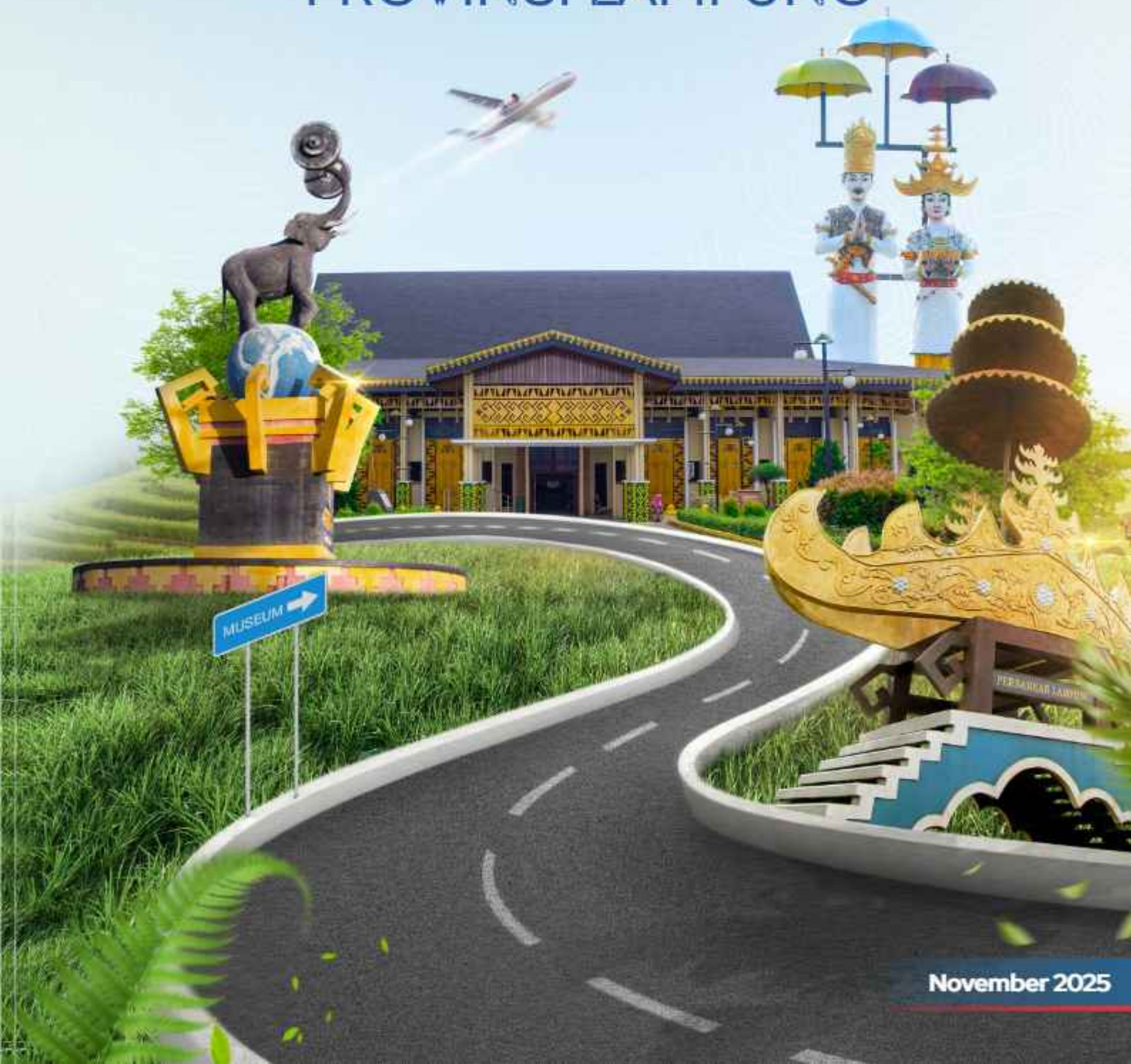




BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG



November 2025



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Lampung

Vol. 20 No. 4

TRIWULANAN

Juli – September 2025

(Terbit November 2025)

Triwulan III 2025

ISSN 2656-8217

NOVEMBER 2025



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku "Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Periode November 2025" akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara periodik melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi di daerah, sumber-sumber tekanan inflasi, risiko dan prospeknya serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999, asesmen ekonomi regional semakin berperan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah semakin kuat di era pemerintahan saat ini yang menghendaki aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah, sehingga disparitas ekonomi antar daerah berkurang. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melakukan kajian serta memberikan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi "Laporan Perekonomian Provinsi Lampung". Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, PLN Wilayah Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditjen Bea Cukai, Bapenda Provinsi Lampung, dan semua penyedia data yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa hasil kajian ekonomi yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kami juga mengharapkan kiranya kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, November 2025
**KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Bimo Epyanto
Direktur

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Tabel
vii	Daftar Grafik
x	Ringkasan Eksekutif
xiv	Indikator Perekonomian

BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1	Analisis PDRB Sisi Pengeluaran	2
1.1.1.	Konsumsi Rumah Tangga	3
1.1.2.	Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3.	Investasi	5
1.1.4.	Ekspor dan Impor	6
1.2	Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha	10
1.2.1.	LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11
1.2.2.	LU Industri Pengolahan	13
1.2.3.	LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14
1.2.4.	LU Konstruksi	14
1.2.5.	LU Transportasi dan Pergudangan	15
Boks 1 :	Fenomena <i>Commodity Trap</i> pada Perekonomian Lampung	17
Boks 2 :	Lampung Bergerak! Strategi Investasi Inklusif Lampung di LEIF 2026	19

BAB II

Keuangan Daerah

2.1	Gambaran Umum	24
2.2	APBD di Provinsi Lampung Tahun 2026	24
2.2.1	Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung	24
2.2.2	Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung	26
2.3	APBN di Provinsi Lampung Tahun 2026	26
2.3.1	Anggaran APBN di Provinsi Lampung Tahun 2026	26
2.3.2	Realisasi APBN di Provinsi Lampung	27

BAB III**Perkembangan Inflasi**

3.1	Inflasi Umum Gabungan Dua Kota dan Dua Kabupaten di Provinsi Lampung	30
3.1.1.	Inflasi Bulanan	30
3.1.2.	Inflasi Tahunan	32
3.2	Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	36
3.2.1.	Inflasi Kota Bandar Lampung	36
3.2.2.	Inflasi Kota Metro	37
3.2.3.	Inflasi Kabupaten Mesuji	37
3.2.4.	Inflasi Kabupaten Lampung Timur	38
3.3	Inflasi Sumatera	38
3.4	Arah Perkembangan Inflasi Triwulan Iv 2025	39
3.4.1.	Ekspektasi Inflasi	39
3.4.2.	Pengendalian Inflasi	39
Boks 3 :	Sinergi Stabilitas Pasokan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang Optimal	41

BAB IV**Stabilitas Keuangan Daerah**

4.1	Pembiayaan Daerah	46
4.1.1	Asesmen Sektor Rumah Tangga	47
4.1.2	Asesmen Sektor Korporasi	48
4.2	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	50
Boks 4 :	LAMPUNG BEGAWI 2025: Semangat Tak Henti Dorong Umkm Lampung Naik Kelas	52
Boks 5 :	Hilirisasi Kopi Robusta: Prioritas Pasar Domestik atau Ekspor?	54

BAB V**Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

5.1	Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai	58
5.1.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal	58
5.1.2	Penyediaan Uang Layak Edar	58
5.1.3	Perkembangan Temuan Uang Palsu	59
5.2	Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	59
5.3	Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik	60
5.3.1.	Perkembangan Transaksi APMK	60
5.3.2.	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	61
5.4	Perkembangan Merchant & Pengguna Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)	62
5.5	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	63

BAB VI**Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**

6.1	Ketenagakerjaan	66
6.2	Nilai Tukar Petani	69
6.3	Kemiskinan	70

BAB VI**Prospek Perekonomian**

7.1	Prospek Pertumbuhan Ekonomi	80
7.2	Prospek Inflasi	83
7.3	Rekomendasi	84

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran	3	Tabel 6.3	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya	72
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha	11	Tabel 6.4	Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan III 2025	73
Tabel 2.1	Pagu dan realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi dan Kab/Kota Provinsi Lampung Periode Triwulan III Tahun 2025	24	Tabel 6.5	Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan III 2025	74
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD provinsi dan Kab/Kota Provinsi Lampung Periode Triwulan III Tahun 2025	25	Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	80
Tabel 2.3	Anggaran Pendapatan APBN Provinsi Lampung Tahun 2025	27	Tabel 7.2	Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Lampung	81
Tabel 2.4	Realisasi Belanja APBN Provinsi Lampung Tahun 2025	27	Tabel 7.3	Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung	81
Tabel 3.1	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Juli 2025	30	Tabel 7.4	Rata-rata Provinsi Lampung dan Tendensi Inflasi Tahun 2025	84
Tabel 3.2	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Agustus 2025	31			
Tabel 3.3	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi September 2025	31			
Tabel 3.4	Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (pangsa % mtm)	31			
Tabel 3.5	Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)	32			
Tabel 3.6	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (% yoy)	33			
Tabel 3.7	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	34			
Tabel 3.8	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	35			
Tabel 3.9	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)	35			
Tabel 3.10	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	35			
Tabel 6.1	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung	66			
Tabel 6.2	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	68			

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Provinsi Lampung	2	Grafik 1.25	Volume Angkutan Kargo Batubara Sumatera Selatan - Lampung	7
Grafik 1.2	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung	2	Grafik 1.26	Perkembangan Ekspor Lemak Dan Minyak Hewan/Nabati	8
Grafik 1.3	Distribusi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Lampung	2	Grafik 1.27	Perkembangan Harga CPO Dunia	8
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen	3	Grafik 1.28	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas	8
Grafik 1.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung	3	Grafik 1.29	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan	8
Grafik 1.6	Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Provinsi Lampung	3	Grafik 1.30	Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	9
Grafik 1.7	Pertumbuhan Kredit Konsumsi	4	Grafik 1.31	Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	9
Grafik 1.8	Jumlah Kedatangan Penumpang di Bandara Radin Inten II	4	Grafik 1.32	Perkembangan Impor Barang Modal	9
Grafik 1.9	Perkembangan Pagu Belanja APBD dan Belanja Pemerinatah Pusat di Provinsi Lampung	4	Grafik 1.33	Perkembangan Impor Barang Konsumsi	
Grafik 1.10	Realisasi Belanja APBD dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung	4	Grafik 1.34	Perkembangan Impor Bahan Baku Penolong	9
Grafik 1.11	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung	4	Grafik 1.35	Perkembangan Harga Jagung, Kedelai dan Pupuk Dunia	9 10
Grafik 1.12	Pertumbuhan Realisasi Belanja APBD Konsolidasi Seluruh Pemda di Provinsi Lampung	4	Grafik 1.36	Perkembangan Harga Gula Dunia	10
Grafik 1.13	DPK Pemerintah Daerah	5	Grafik 1.37	Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Komoditas	10
Grafik 1.14	Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung	5	Grafik 1.38	Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Negara Asal	10
Grafik 1.15	Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	5	Grafik 1.39	Pangsa PDRB Lapangan Usaha	11
Grafik 1.16	Perkembangan Likert Scale Investasi	6	Grafik 1.40	Produksi Gabah Kering Giling	
Grafik 1.17	Kredit Investasi	6	Grafik 1.41	Produksi Jagung dan Ubi Kayu	12
Grafik 1.18	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	6	Grafik 1.42	Produksi Tanaman Hortikultura	12
Grafik 1.19	Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung	6	Grafik 1.43	Nilai Tukar Usaha Pertanian	12
Grafik 1.20	Prompt Manufacturing Index Mitra Dagang Utama Provinsi Lampung	6	Grafik 1.44	<i>Southern Oscillation Index</i>	12
Grafik 1.21	Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi, Teh dan Rempah	7	Grafik 1.45	Kredit UU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12
Grafik 1.22	Perkembangan Harga Kopi Robusta Dunia	7	Grafik 1.46	Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas Industri Pengolahan	12 13
Grafik 1.23	Perkembangan Ekspor Batubara	7	Grafik 1.47	Konsumsi Listrik Industri	13
Grafik 1.24	Perkembangan Harga Batubara Dunia	7	Grafik 1.48	Pertumbuhan Volume Impor Gula Rafinasi dan Bungkil Kedelai/Jagung	13
			Grafik 1.49	Kredit UU Industri Pengolahan	13
			Grafik 1.50	Prompt Manufacturing Index Provinsi Lampung	13
			Grafik 1.51	Omset Penjualan Eceran	14
			Grafik 1.52	Pertumbuhan Jumlah Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru (BBNI) di Provinsi Lampung	14

Grafik 1.53	Kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran	14
Grafik 1.54	Kredit Kendaraan Bermotor	14
Grafik 1.55	Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal	15
Grafik 1.56	Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi	15
Grafik 1.57	Realisasi Pengadaan Semen di Provinsi Lampung	15
Grafik 1.58	Kredit Konstruksi	15
Grafik 1.59	Perkembangan Penumpang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api	16
Grafik 1.60	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Provinsi Lampung	16
Grafik 1.61	Perkembangan Barang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api	16
Grafik 1.62	Kredit LU Transportasi, Pegudangan dan Infokom	16
Grafik 3.1	Inflasi Lampung dan Nasional	30
Grafik 3.2	Sumbangan Inflasi Bulanan Juli, Agustus, dan September 2025	30
Grafik 3.3	Sumbangan Inflasi Bulanan Juli 2025	30
Grafik 3.4	Sumbangan Inflasi Bulanan Agustus 2025	31
Grafik 3.5	Sumbangan Inflasi Bulanan September 2025	31
Grafik 3.6	Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional	32
Grafik 3.7	Perkembangan Harga Kopi Dunia	33
Grafik 3.8	Perkembangan Harga Beras	33
Grafik 3.9	Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan	33
Grafik 3.10	Perkembangan Harga Daging dan Telur	33
Grafik 3.11	Perkembangan Harga Sayur Sayuran	34
Grafik 3.12	Perkembangan Harga Rokok	34
Grafik 3.13	Perkembangan Harga Emas Perhiasan	34
Grafik 3.14	Perkembangan Harga Tiket Angkutan Udara	36
Grafik 3.15	Perkembangan Harga Bensin	36
Grafik 3.16	Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung	36
Grafik 3.17	Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung	36
Grafik 3.18	Inflasi Bulanan Kota Metro	37
Grafik 3.19	Inflasi Tahunan Kota Metro	37
Grafik 3.20	Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji	37
Grafik 3.21	Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji	37
Grafik 3.22	Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur	38
Grafik 3.23	Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur	38
Grafik 3.24	Inflasi Sumatera	39
Grafik 3.25	Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan Ke Depan	39

Grafik 4.1	Perkembangan Kredit dan NPL Prov. Lampung	46
Grafik 4.2	Kredit Prov. Lampung berdasarkan Jenis Penggunaan	46
Grafik 4.3	Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Usaha (Konvensional dan Syariah)	46
Grafik 4.4	Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga	47
Grafik 4.5	Indeks Keyakinan Konsumen	47
Grafik 4.6	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	47
Grafik 4.7	Kredit Konsumsi RT berdasarkan Jenis Penggunaannya	47
Grafik 4.8	NPL Kredit Konsumsi Provinsi Lampung	48
Grafik 4.9	DPK Rumah Tangga berdasarkan Jenis Penggunaannya	48
Grafik 4.10	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Jenis Penggunaan	48
Grafik 4.11	Pertumbuhan Kredit Korporasi	49
Grafik 4.12	SBT Perkembangan Kegiatan Usaha	49
Grafik 4.13	Kredit Korporasi berdasarkan Sektoral	49
Grafik 4.14	Pangsa Kredit Korporasi	49
Grafik 4.15	NPL Kredit Korporasi	49
Grafik 4.16	DPK Kredit Korporasi	49
Grafik 4.17	Pertumbuhan Kredit UMKM	50
Grafik 4.18	Pangsa Kredit UMKM	50
Grafik 4.19	Kredit UMKM berdasarkan Jenis	50
Grafik 4.20	Kredit UMKM berdasarkan Jenis	50
Grafik 5.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan	58
Grafik 5.2	Aliran Uang Kartal <i>Inflow</i>	58
Grafik 5.3	Aliran Uang Kartal <i>Outflow</i>	58
Grafik 5.4	Penukaran Uang Melalui BI	58
Grafik 5.5	Kas Keliling	58
Grafik 5.6	Kas Titipan	59
Grafik 5.7	Perkembangan Pemusnahan UTLE	59
Grafik 5.8	Temuan Uang Palsu	59
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi Kliring	60
Grafik 5.10	Perkembangan Transaksi RTGS	60
Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D	60
Grafik 5.12	Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahun Lama	61
Grafik 5.13	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	61
Grafik 5.14	Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)	61
Grafik 5.15	Pangsan Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)	61

Grafik 5.16	Perkembangan Dana <i>Float</i> UE	61	Grafik 6.22	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional	71
Grafik 5.17	Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi	61	Grafik 6.23	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	71
Grafik 5.18	Pangsa Transaksi UE Triwulan III 2025	62	Grafik 6.24	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	71
Grafik 5.19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi	62	Grafik 6.25	Koefisien Gini Provinsi Lampung	71
Grafik 5.20	Perkembangan Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	62	Grafik 7.1	Perkembangan UMP Lampung	81
Grafik 5.21	Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS Triwulanan	62	Grafik 7.2	<i>Likert Scale Liaison</i> KPwBI Provinsi Lampung 2025	81
Grafik 5.22	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS di Sumatera	63	Grafik 7.3	Perubahan Konsumsi Batubara Dunia	82
Grafik 5.23	Perkembangan Pengguna QRIS	63	Grafik 7.4	<i>Prognosa</i> Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Lampung	82
Grafik 5.24	Transaksi KUPWA BB Per Jenis Mata Uang	63			
Grafik 5.25	Pengerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR	63			
Grafik 5.26	Transaksi KUPWA BB di Provinsi Lampung	63			
Grafik 6.1	Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Lampung	66			
Grafik 6.2	Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung	66			
Grafik 6.3	TPAK Provinsi Lampung	67			
Grafik 6.4	<i>Share</i> Tenaga Kerja Provinsi Lampung	67			
Grafik 6.5	TPAK Provinsi Lampung Berdasarkan Gender	67			
Grafik 6.6	IKG Provinsi Lampung	67			
Grafik 6.7	TPT Sumatera	67			
Grafik 6.8	TPT Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal	68			
Grafik 6.9	Penggunaan Tenaga Kerja dan Perkembangan Investasi pada Dunia Usaha di Provinsi Lampung	68			
Grafik 6.10	Upah Minimum Lampung	68			
Grafik 6.11	Perkembangan Tahunan Upah Minimum Lampung	68			
Grafik 6.12	Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Lampung	69			
Grafik 6.13	Pekerja di Provinsi Lampung berdasarkan Jam Kerja	69			
Grafik 6.14	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan	69			
Grafik 6.15	NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya	69			
Grafik 6.16	NTP Per Sub Sektor	70			
Grafik 6.17	Indeks yang Dibayar per Sub Sektor	70			
Grafik 6.18	Indeks yang Diterima per Sub Sektor	70			
Grafik 6.19	Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor	70			
Grafik 6.20	NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera	70			
Grafik 6.21	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung	71			

Ringkasan Eksekutif

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,09% (yoy).

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,09% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 4,90% (yoy), serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga tercatat sebesar 5,04% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan III 2025 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp135,56 triliun dan Rp76,57 triliun.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penopang utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga menguat seiring peningkatan optimisme konsumen dan daya beli yang terjaga, sementara investasi mencatat akselerasi didorong peningkatan realisasi PMDN dan perbaikan ekspektasi pelaku usaha. Konsumsi pemerintah juga mulai pulih setelah mencatat kontraksi pada dua triwulan sebelumnya, sejalan dengan percepatan realisasi belanja APBN dan APBD pada triwulan laporan. Namun demikian, kontribusi eksternal tertahan oleh pelemahan ekspor nonmigas di tengah menurunnya permintaan global terhadap komoditas unggulan Lampung khususnya kopi, CPO, dan karet. Di sisi lain, impor menunjukkan perbaikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri akan bahan baku penolong, yang mencerminkan aktivitas produksi yang tetap berjalan.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi didorong oleh pemulihan sektor primer. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menjadi motor pertumbuhan melalui peningkatan produksi padi pada panen gadu dan perbaikan produksi hortikultura. Sektor sekunder dan tersier tetap tumbuh positif meskipun lebih moderat. Industri Pengolahan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya namun masih menjadi kontributor terbesar kedua, didukung permintaan ekspor produk olahan buah, sementara Perdagangan Besar dan Eceran mengalami normalisasi pasca periode HBKN.

Keuangan Pemerintah

Realisasi belanja konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung pada triwulan III 2025 mencapai Rp17,98 Triliun dari total pagu Belanja Daerah tahun 2025 yang senilai Rp32,52 triliun

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung menunjukkan penurunan pada 2025. Pagu pendapatan menurun sebesar -4,60% (yoy) dari Rp33,58 triliun pada 2024 menjadi Rp32,03 triliun. Kondisi ini didorong oleh penurunan pagu seluruh komponen pendapatan daerah. Selain itu, pagu belanja turut menurun sebesar -4,29% (yoy) yang juga didorong oleh hampir keseluruhan komponen pembentuk Belanja Daerah kecuali belanja pegawai yang secara pagu mengalami peningkatan sebesar 6,14% (yoy) dibandingkan dengan pagu pada 2024.

Realisasi belanja konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung pada triwulan III 2025 mencapai Rp17,98 Triliun dari total pagu Belanja Daerah tahun 2025 yang senilai Rp32,52 triliun. Realisasi belanja ini sedikit melambat apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang tumbuh lebih tinggi dengan capaian realisasi Rp18,52 triliun.

Di sisi APBN Lampung, realisasi pendapatan pada triwulan III 2025 tercatat Rp 7,98 triliun atau 71,88% dari target, meningkat 5,33% (yoy) dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2024. Peningkatan pendapatan ini didukung baik oleh kinerja pajak maupun non pajak. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp6,71 triliun dengan kontribusi terbesar datang dari pajak perdagangan internasional pada pos bea keluar dengan realisasi Rp 1,51 triliun atau 397,66% dari target Rp381,95 miliar.

Di sisi belanja, realisasi APBN belanja negara di Lampung mencapai Rp23,08 triliun hingga akhir triwulan III 2025. Angka ini telah mencapai 71,58% dari pagu anggaran sebesar Rp32,25 triliun, menurun 5% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024 senilai Rp24,53 triliun dari total target Rp33,46 triliun (73,32%).

Inflasi

Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,17% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,27% (yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut terpantau lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,65% (yoy). Tekanan Inflasi Provinsi Lampung triwulan III 2025 yang melambat ini disebabkan oleh turunnya tarif sekolah sejalan dengan kebijakan penghapusan uang Komite yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2025 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,65% (yoy) dan tingkat inflasi sebesar 5,02% (yoy). Di sisi lain, kelompok Pendidikan dengan andil sebesar -1,23% (yoy) tercatat mengalami deflasi sebesar 18,20% (yoy).

Perkembangan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak minimnya pasokan karena belum masuknya masa panen di triwulan III 2025. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan tarif sekolah melalui penghapusan uang Komite bertujuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tekanan inflasi ke depan, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung program swasembada pangan pemerintah dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk melemahnya permintaan domestik dan global sebagai dampak ketidakpastian global, ketersediaan pupuk, serta mulai masuknya periode masa panen pada triwulan IV 2025.

Stabilitas Sistem Keuangan

Kinerja rumah tangga pada triwulan III 2025 tetap kuat. Pada triwulan III 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp28,56 triliun atau tumbuh 10,48% (yoy). Kualitas kredit Rumah Tangga juga tetap terjaga baik di tengah pertumbuhan kredit yang tercermin dari besaran Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang berada di bawah ambang batas 5%. Kinerja kredit yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga yang meningkat pada triwulan III 2025 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp 47,25 triliun atau 74,25% dari total DPK.

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan III 2025 terdeselerasi, tumbuh 1,30% (yoy) dari 8,73% (yoy) pada triwulan II 2025. Kinerja penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari penyaluran kredit pada LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (1,61%yoy), LU Industri Pengolahan (-0,13%yoy), LU Konstruksi (2,61%yoy), LU Perdagangan Besar dan Eceran (-5,16%yoy), serta LU Transportasi dan Pergudangan (15,73%yoy).

Inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,17% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,27% (yoy).

Kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp28,56 triliun atau tumbuh 10,48% (yoy).

Kredit perbankan untuk sektor korporasi tumbuh 1,30% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp69,68 triliun.

Kredit UMKM pada triwulan III 2025 tumbuh positif meski melambat. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,55 Triliun atau tumbuh 0,72% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh lebih tinggi sebesar 1,95% (yoy).

Secara umum, di tengah pertumbuhan kredit perbankan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025, kualitas kredit yang tercermin pada Non-Performing Loan (NPL) relatif rendah dan stabil sebesar 2,38%, masih di bawah ambang batas risiko kredit (≤ 5).

Sistem Pembayaran

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2025 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp0,62 triliun.

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) berkontraksi 32,95% (yoy).

Merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 695.962 merchant

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan II 2025 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp0,62 triliun. Kondisi ini sejalan dengan kinerja ekonomi yang membaik. Sementara, kondisi net outflow menurun sebesar 34,30% (yoy) terendah selama tiga tahun terakhir, berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 16,04% (yoy).

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) melambat yakni berkontraksi sebesar 32,95% (yoy) pada triwulan II 2025. Sejalan dengan RTGS, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami kontraksi sebesar 6,63% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit meningkat sebesar 7,35% (yoy), berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 8,47% (yoy).

Sampai dengan Juni 2025, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 695.962 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatra. Sementara, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.362.209. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 1,59% (qoq) dari triwulan sebelumnya.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 129,96, meningkat secara triwulanan maupun tahunan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja secara absolut menjadi 4,85 juta jiwa, naik sebanyak 85,79 ribu jiwa atau tumbuh 1,37% dibandingkan triwulan III 2024.

Sementara itu, dari sisi status pekerjaan utama masyarakat Provinsi Lampung pada Triwulan III 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 3.140,87 ribu orang (64,72%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.712,51 ribu orang (35,28%).

Pada saat yang sama, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,21%, yang berarti sedikit empat orang dari setiap seratus orang angkatan kerja berada dalam kondisi pengangguran. Dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin.

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 129,96, meningkat secara triwulanan maupun tahunan. Dibandingkan triwulan sebelumnya, rata-rata NTP triwulanan sebesar 128,95 dan pada triwulan III 2024 sebesar 128,71.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung terpantau mengalami penurunan sebesar 5,87% (yoy), yaitu sebanyak 941,23 ribu jiwa pada 2024 menjadi 887,02 pada data terbaru 2025. Dari sisi komposisinya, hingga pertengahan 2025, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Prospek Ekonomi Daerah

Ekonomi global pada 2025–2026 diperkirakan tumbuh moderat masing-masing 3,2% dan 3,1%, sedikit membaik dari proyeksi sebelumnya namun masih di bawah rata-rata prapandemi di tengah ketidakpastian perdagangan dan geopolitik. Pertumbuhan negara maju tetap terbatas, sementara negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India menjadi penopang utama, dengan ASEAN-5 stabil pada kisaran 4,1–4,2%. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh solid sebesar 4,9% pada 2025–2026, ditopang konsumsi yang terjaga, investasi yang meningkat, serta bauran kebijakan fiskal-moneter yang tetap hati-hati (*pro stability*) namun mendukung pertumbuhan (*pro growth*).

Perekonomian Lampung 2025 diperkirakan tumbuh 4,9–5,5%, ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring kenaikan UMP, serta investasi swasta pasca pemilu. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja pertanian dan perkebunan, berlanjutnya proyek konstruksi, serta kuatnya industri pengolahan menopang pertumbuhan, meski risiko perlambatan ekspor akibat ketidakpastian global masih perlu diwaspadai.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5–1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Lampung diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,90%–5,50% dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran 2,5–1%.



PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,09% (yoy).



PERTUMBUHAN EKONOMI

Ta III 2025	Ta III 2024
5,09	5,04
(% yoy)	(% yoy)

KONSUMSI RUMAH TANGGA

Ta III 2025	Ta III 2024
4,67	4,94
(% yoy)	(% yoy)

PERKEMBANGAN INFLASI

Tingkat inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



PERKEMBANGAN INFLASI

Ta III 2025	Ta III 2024
2,27	1,17
(% yoy)	(% yoy)

INFLASI TAHUNAN KELOMPOK BAHAN MAKANAN

Ta III 2025	Ta III 2024
3,28	5,02
(% yoy)	(% yoy)

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN



TUNAI	Inflow	Outflow	Nett Flow
Tw II 2025	3,75	3,14	0,62
Tw III 2025	2,13	2,97	-0,84

Satuan dalam Triliun Rupiah

NON TUNAI	Nominal Klrng (Rp. Tbln)	Volume Klrng (Mln. Lmbg)	Nominal RTGS (Rp. Tbln)	Volume RTGS (Mln. Lmbg)
Tw II 2024	3,96	68,17	28,81	21,84
Tw III 2025	4,14	77,08	39,66	13,01

KEUANGAN PEMERINTAH



% REALISASI PENDAPATAN

APSD SEMUA PEMDA DI PROVINSI LAMPUNG

Ta III 2025	Ta III 2024
38,78%	67,29%

*Data per 27 November 2025



% REALISASI BELANJA

APSD SEMUA PEMDA DI PROVINSI LAMPUNG

Ta III 2025	Ta III 2024
33,00%	61,33%

*Data per 27 November 2025

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Februari 2025	Februari 2024	Februari 2023
4,18%	4,12%	4,07%

ANGKATAN KERJA (Juta Orang)

Februari 2025	Februari 2024	Februari 2023
5,00%	5,04%	5,08%

KEMISKINAN

September 2025	September 2023	September 2024
11,67%	11,44%	10,62%

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan Kredit Perseorangan



Pertumbuhan Kredit Korporasi



Pertumbuhan Kredit



Berdasarkan Lokasi Bank

Pertumbuhan Kredit Konsumen	Ta III 2025: 4,08 (yoy)	Ta III 2024: 3,76 (yoy)
Pertumbuhan Kredit	Ta III 2025: -3,15 (yoy)	Ta III 2024: -2,15 (yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Ta III 2025: 21,88 (yoy)	Ta III 2024: 17,65 (yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Ta III 2025: 10,22 (yoy)	Ta III 2024: 8,71 (yoy)

Pertumbuhan DPK	Ta III 2025: 7,23 (yoy)	Ta III 2024: 4,58 (yoy)
Pertumbuhan Asst (Asst Bersih)	Ta III 2025: 2,73 (yoy)	Ta III 2024: 3,71 (yoy)
NPL (Gross)	Ta III 2025: 2,58 (yoy)	Ta III 2024: 2,74 (yoy)
LDR	Ta III 2025: 114,74 (yoy)	Ta III 2024: 116,62 (yoy)

Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan Kredit	Ta III 2025: 9,86 (yoy)	Ta III 2024: 3,12 (yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Ta III 2025: 14,27 (yoy)	Ta III 2024: 1,58 (yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Ta III 2025: -5,86 (yoy)	Ta III 2024: -3,32 (yoy)
Pertumbuhan Kredit Konsumen	Ta III 2025: 12,02 (yoy)	Ta III 2024: 10,48 (yoy)



Indikator Ekonomi dan Perbankan

Provinsi Lampung

Inflasi dan PDRB

INDIKATOR	2024				2024	2025		
	I	II	III	IV		I	II	III
Indeks Harga Konsumen (IHK)								
Bandar Lampung	106,00	106,11	106,58	107,4		107,54	108,45	106,97
Metro	105,78	105,52	105,38	106,43		107,25	107,43	107,48
Mesuji	110,33	110,75	110,16	111,14		113,13	113,54	112,75
Lampung Timur	109,98	109,57	108,53	110,55		111,86	112,29	111,18
Gabungan	107,26	107,31	107,26	108,43		108,05	109,75	108,51
Laju Inflasi (yoy)								
Bandar Lampung	2,72	2,24	1,92	1,66		1,45	2,21	0,37
Metro	3,21	2,37	1,86	1,51		1,29	1,81	1,89
Mesuji	4,52	3,40	2,84	1,77		2,54	2,52	2,35
Lampung Timur	4,83	4,07	2,57	1,37		1,71	2,48	2,44
Gabungan	3,45	2,84	2,16	1,57		1,58	2,27	1,17
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)								
Pertumbuhan PDRB (% YoY)	3,30	4,80	4,81	5,32	4,57	5,47	5,09	5,04
PDRB ADHK (Miliar Rp)	65.953,82	72.361,11	72.903,89	70.338,39	281.557,20	60.560,58	76.047,84	76.575,42
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	14.588,48	19.515,36	18.430,76	15.702,17	60.236,77	15.379,25	19.882,59	19.856,80
Pertambangan & Penggalian	3.375,80	3.214,54	3.350,93	3.359,84	13.300,91	3.263,58	3.311,13	3.293,64
Industri Pengolahan	12.047,01	12.445,98	13.733,95	13.325,92	51.552,86	13.105,82	13.686,58	14.384,66
Pengadaan Listrik, Gas	88,80	100,95	107,13	107,77	405,67	86,29	86,21	89,79
Pengadaan Air	68,75	71,34	71,92	71,57	283,58	72,14	73,13	71,82
Konstruksi	7.042,32	7.193,59	7.205,29	7.481,97	28.923,18	7.110,00	7.634,94	7.707,13
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda	10.021,92	10.292,86	10.547,94	10.677,87	41.540,59	10.669,37	11.047,24	10.967,59
Transportasi & Pergudangan	4.512,25	4.966,59	4.823,25	4.830,69	19.232,78	4.990,67	5.339,96	5.045,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.088,51	1.148,14	1.182,32	1.197,70	4.616,76	1.167,93	1.240,63	1.269,18
Informasi & Komunikasi	3.928,96	4.005,67	4.091,21	4.184,49	16.211,33	4.236,59	4.153,13	4.268,47
Jasa Keuangan	1.335,49	1.386,46	1.390,35	1.319,22	5.431,51	1.381,29	1.402,27	1.435,20
Real Estate	2.011,21	2.035,36	2.107,21	2.115,84	8.269,42	2.147,09	2.092,96	2.115,14
Jasa Perusahaan	109,30	110,20	115,11	117,82	452,42	113,44	118,42	116,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	2.167,08	2.272,40	2.059,02	2.102,74	8.501,24	2.185,96	2.245,68	2.169,44
Jasa Pendidikan	1.977,59	1.974,03	2.006,80	2.007,60	7.966,93	2.021,05	2.016,79	2.043,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	712,62	768,99	796,05	804,41	3.082,07	768,46	768,76	816,04
Jasa Lainnya	776,53	857,63	884,64	931,18	3.450,07	851,65	936,40	914,75
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	1.049,15	1.102,93	1.533,65	1.788,67	5.474,48	1.573,74	1.474,10	1.777,99
Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)	3.781,27	3.949,89	4.577,28	4.637,35	17.045,60	4.307,22	3.862,00	4.178,00
Nilai Impor Non Migas (Juta USD)	315,80	401,46	268,58	331,73	1.315,58	228,00	285,71	328,51
Volume Impor Non Migas (Ribu Ton)	550,65	617,93	412,95	575,01	2.156,55	460,53	559,85	409,31

Sistem Pembayaran

INDIKATOR MIKRO	2023	2024				2025		
	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflow (Triliun Rp)	3,36	4,48	4,73	2,92	2,31	3,72	3,75	2,13
Outflow (Triliun Rp)	3,20	3,27	4,77	3,05	2,81	3,8	3,14	2,97
Pemusnahan Uang (Triliun Rp)								
Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	35,28	35,58	42,98	43,95	32,73	28,31	28,81	39,66
Volume Transaksi RTGS (Transaksi)	14.440,00	12.138,00	16.062,00	22.683,00	18.125,00	14.142,00	15.402,00	13010
Rata-Rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	578,36	583,28	704,58	720,44	536,58	454,10	472,30	658,16
Rata-Rata Harian Volume Transaksi RTGS (Transaksi)	236,72	198,88	278,07	371,85	297,13	231,84	252,48	213,28
Volume Kliring Kredit (Transaksi)	50.868,00	42.157,00	43.423,00	46.930,00	51.483,00	38.455	40.455	47.314
Nominal Kliring Kredit (Triliun Rp)	2,62	2,24	2,36	2,70	2,77	2,38	2,54	3,004
Rata-Rata Harian Volume Kliring Kredit (Transaksi)	833,90	691,10	711,85	769,34	843,98	646,80	663,20	775,64
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Kredit (Miliar Rp)	42,95	36,72	38,89	44,30	45,36	38,02	41,64	48,25
Volume Kliring Debet (Transaksi)	37.160,00	34.164,00	34.143,00	35.166,00	33.680,00	28.201	27.719	29.775
Nominal Kliring Debet (Triliun Rp)	1,89	1,73	1,67	1,69	1,64	1,35	1,42	1,41
Rata-Rata Harian Volume Kliring Debet (Transaksi)	612,46	560,07	559,72	576,49	552,13	462,31	454,41	488,11
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Debet (Miliar Rp)	30,98	28,36	27,38	27,70	26,94	22,13	23,28	23,11

Perbankan

INDIKATOR PERBANKAN	2023			2024				2025		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Bank Umum										
Total Aset (Triliun Rp)	77,56	79,05	78,45	80,22	83,11	84,06	83,52	82,80	85,38	87,18
Pertumbuhan Total Aset (%yoy)	1,70	5,10	4,89	7,71	7,16	6,34	6,47	3,34	2,73	3,72
DPK (Triliun Rp)	53,44	55,07	55,05	55,88	58,29	60,13	58,86	61,07	62,50	62,13
Giro	8,02	10,26	8,92	10,76	11,40	11,78	9,22	10,75	10,99	10,82
Tabungan	33,02	32,82	33,53	32,47	34,59	36,03	37,54	38,05	38,94	38,44
Deposito	12,40	12,67	12,60	12,63	12,29	12,32	12,11	12,27	12,57	12,87
Pertumbuhan DPK (%yoy)	0,37	4,69	2,99	3,41	9,08	9,19	6,92	9,29	7,23	3,33
Kredit (Triliun Rp)	67,48	63,70	65,01	65,94	68,26	69,84	70,23	69,71	71,05	72,47
Modal Kerja (Triliun Rp)	36,81	37,18	37,39	37,24	38,78	38,11	38,54	37,62	37,56	38,27
Investasi (Triliun Rp)	12,35	6,86	7,66	8,07	8,52	8,91	9,28	9,30	10,38	10,48
Konsumsi (Triliun Rp)	18,30	19,66	19,96	20,62	20,96	21,81	22,41	22,77	23,10	23,71
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	8,26	0,67	0,11	3,38	1,19	9,64	8,04	5,72	4,00	3,77
LDR	126,24	115,88	119,56	119,96	118,99	118,81	120,61	115,28	114,74	116,76
Kredit UMKM (Triliun Rp)	26,95	27,65	29,29	29,91	30,98	31,51	31,06	25,46	31,01	31,17
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	7,41	7,33	10,69	14,28	14,96	13,96	6,05	-14,88	0,10	-1,06
Total Kredit MKM (Triliun Rp)	45,18	46,08	47,26	48,12	48,50	49,49	50,03	50,43	50,76	51,18
Pertumbuhan Kredit MKM (%yoy)	7,34	7,40	7,89	8,79	7,35	7,40	5,87	4,80	4,70	3,41
NPL (%) gross	2,29	2,81	2,42	2,52	2,38	2,43	2,57	2,67	2,58	2,74

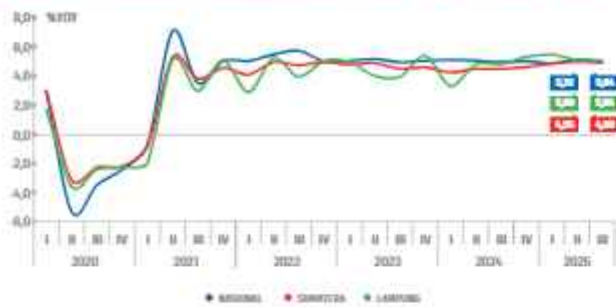


01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

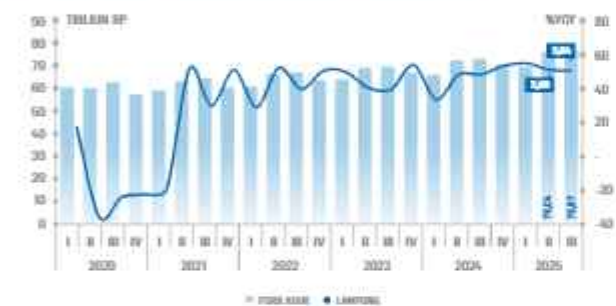
- Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,08% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 4,90% (yoy), serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga tercatat sebesar 5,04% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan III 2025 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp135,56 triliun dan Rp76,57 triliun.
- Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penopang utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga menguat seiring peningkatan optimisme konsumen dan daya beli yang terjaga, sementara investasi mencatat akselerasi didorong peningkatan realisasi PMDN dan perbaikan ekspektasi pelaku usaha. Konsumsi pemerintah juga mulai pulih setelah mencatat kontraksi pada dua triwulan sebelumnya, sejalan dengan percepatan realisasi belanja APBN dan APBD pada triwulan laporan. Namun demikian, kontribusi eksternal tertahan oleh pelemahan ekspor nonmigas di tengah menurunnya permintaan global terhadap komoditas unggulan Lampung khususnya kopi, CPO, dan karet. Di sisi lain, impor menunjukkan perbaikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri akan bahan baku penolong, yang mencerminkan aktivitas produksi yang tetap berjalan.
- Dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi didorong oleh pemulihan sektor primer. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menjadi motor pertumbuhan melalui peningkatan produksi padi pada panen gadu dan perbaikan produksi hortikultura. Sektor sekunder dan tersier tetap tumbuh positif meskipun lebih moderat. Industri Pengolahan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya namun masih menjadi kontributor terbesar kedua, didukung permintaan ekspor produk olahan buah, sementara Perdagangan Besar dan Eceran mengalami normalisasi pasca periode HBKN.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera dan Provinsi Lampung



Sumber: BPS, elaborasi

Grafik 1.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung



Sumber: BPS, elaborasi

Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), relatif stabil dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,09% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang sebesar 4,90% (yoy), serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga tercatat sebesar 5,04% (yoy) [Grafik 1.1]. Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan III 2025 berdasarkan ADHB dan ADHK [2010] masing-masing tercatat sebesar Rp135,56 triliun dan Rp76,57 triliun [Grafik 1.2].

1.1 ANALISIS PDRB SISI PENGELUARAN

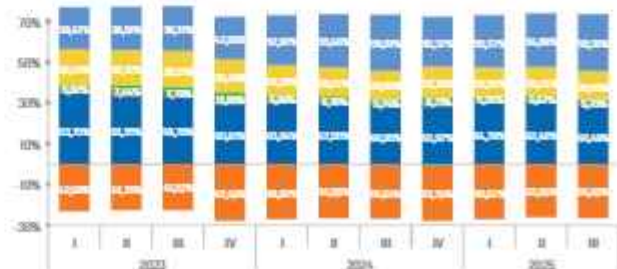
Dari sisi permintaan domestik, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama dari sisi pengeluaran dengan sumbangan sebesar 2,90% terhadap total pertumbuhan PDRB Lampung. Kinerjanya juga menunjukkan peningkatan dengan tumbuh 4,94% (yoy) dibandingkan 4,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya, ditopang penguatan optimisme dan terjaganya daya beli masyarakat. Investasi turut mencatatkan akselerasi, tumbuh 6,05% (yoy) dibandingkan 5,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan akselerasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta berlanjutnya pertumbuhan positif penanaman modal asing (PMA),

mencerminkan kepercayaan investor yang menguat terhadap prospek perekonomian daerah. Sementara itu, konsumsi pemerintah mulai pulih dengan pertumbuhan 4,00% (yoy) setelah terkoreksi pada dua triwulan sebelumnya, ditopang akselerasi belanja pasca penetapan APBD Perubahan.

Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi tertahan oleh pelemahan kinerja net ekspor. Pada triwulan III 2025, net ekspor Lampung tercatat mengalami kontraksi sebesar 21,24% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,33% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan ekspor luar negeri di tengah meningkatnya impor bahan baku penolong. Volume ekspor nonmigas terkoreksi lebih dalam pada triwulan laporan, yakni 10,67% (yoy) dibandingkan -2,22% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring melemahnya permintaan global terhadap komoditas unggulan seperti kopi, CPD, dan karet Lampung. Sebaliknya, kontraksi volume impor mulai menurun menjadi 0,88% (yoy), tidak sedalam kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 9,43% (yoy), didorong oleh meningkatnya kebutuhan industri akan bahan baku penolong.

Pada triwulan III 2025, struktur perekonomian Provinsi Lampung dari sisi permintaan masih didominasi oleh 2 (dua) komponen permintaan domestik, yaitu Konsumsi rumah tangga dan Investasi (Penanaman Modal Domestik Bruto). Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pangsa mencapai 60,49% terhadap PDRB, diikuti oleh investasi yang menyumbang 29,85% [Grafik 1.3]. Adapun komponen domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah dan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) berkontribusi lebih kecil, masing-masing sebesar 5,73% dan 1,69%. Dari sisi eksternal, aktivitas perdagangan luar negeri memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Lampung. Ekspor tercatat menyumbang 58,34% terhadap pembentukan PDRB. Namun, kebutuhan impor dengan kontribusi negatif sebesar 56,65% mencerminkan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah. Perkembangan struktur komponen eksternal tersebut menjadi tantangan dalam memperkuat peran net ekspor sebagai sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan bagi perekonomian Lampung.

Grafik 1.3 Distribusi PDRB Sisi Pengeluaran Provinsi Lampung



Sumber: BPS, elaborasi

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran

KOMPONEN PENGELUARAN (%YEAR ON YEAR)	2024				2025			Sumber Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,67	4,69	4,96	5,05	5,06	4,67	4,94	2,90
Pengeluaran Konsumsi LNPRIT	19,13	13,55	9,32	6,58	2,30	4,67	5,59	0,09
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,67	2,39	2,11	2,16	-1,58	-2,13	4,10	0,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,31	3,33	1,30	0,34	1,26	5,31	6,06	1,84
Ekspor	6,10	14,16	15,48	12,31	12,96	7,50	5,33	2,95
Impor	11,75	13,43	13,28	5,96	9,25	6,73	7,52	3,84
PDRB	3,30	4,80	4,81	5,32	5,47	5,09	5,04 	5,04

Sumber: BPS, diolah

1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga di Provinsi Lampung menguat seiring meningkatnya optimisme konsumen dan daya beli yang tetap terjaga. Penguatan ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 yang mencapai 4,94% (yoy), meningkat dibandingkan 4,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut didukung oleh sentimen masyarakat yang lebih positif terhadap kondisi ekonomi. Hal ini tercermin dari kenaikan rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan laporan, yang terjaga pada zona ekspansif (>100) dan naik menjadi 114,25 dari sebelumnya 109,39. Kenaikan IKK terutama didorong oleh membaiknya Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan ke depan. Ekspektasi yang lebih optimistis terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan aktivitas usaha menjadi faktor utama penguatan IEK. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) tercatat relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya, menunjukkan persepsi yang terjaga terhadap kondisi ekonomi saat ini (Grafik 1.4).

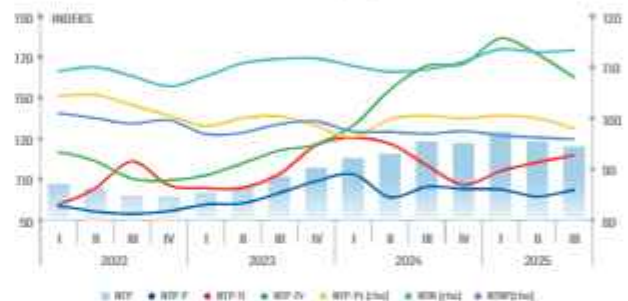
Di samping itu, daya beli pekerja di Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor utama di Provinsi Lampung terindikasi tetap kuat. Hal tersebut tercermin dari rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2025 yang berada di level 126,06, relatif stabil dibandingkan 128,95 pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini didukung oleh kinerja yang lebih kuat pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, sebagaimana terlihat dari kenaikan NTP kedua

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung

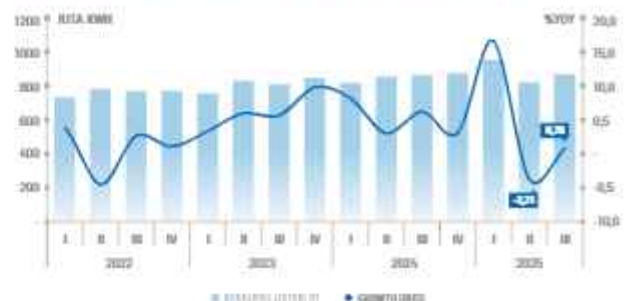


Sumber: BPS, diolah

subsektor tersebut (NTP-P dan NTP-H) seiring berlangsungnya panen gadu padi, serta aneka cabai dan bawang merah pada periode laporan. Sementara itu, NTP subsektor perkebunan (NTP-Pr) mulai mengalami penurunan, salah satunya dipengaruhi normalisasi harga komoditas utama termasuk kopi robusta (Grafik 1.5). Lebih lanjut, penguatan konsumsi rumah tangga turut tercermin dari kenaikan konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh sebesar 0,78% (yoy), setelah kontraksi 3,71% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.6).

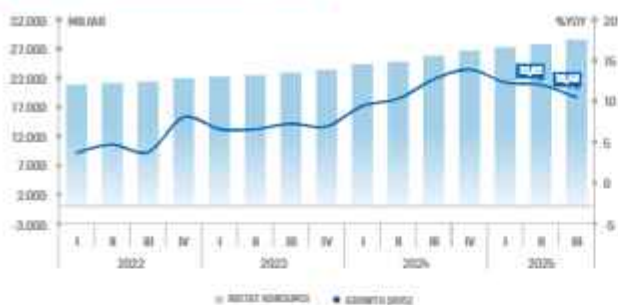
Di tengah kuatnya realisasi konsumsi rumah tangga, sejumlah indikator terkait aktivitas konsumsi bergerak lebih moderat pada triwulan laporan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan kredit konsumsi tetap kuat sebesar 10,18% (yoy), meski termoderasi dari 12,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan

Grafik 1.6 Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Provinsi Lampung



Sumber: PT PLN, diolah

Grafik 1.7 Pertumbuhan Kredit Konsumsi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.8 Jumlah Kedatangan Penumpang di Bandara Radin Inten II



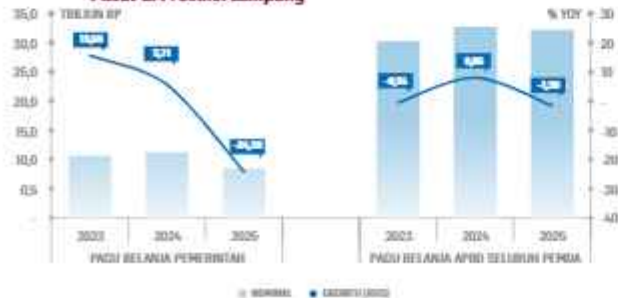
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

serupa juga terlihat pada jumlah kedatangan penumpang di Bandara Radin Inten II, yang tumbuh 0,38% (yoy) setelah mencatat pertumbuhan 5,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dipengaruhi normalisasi mobilitas masyarakat pasca periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan libur sekolah.

1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 meningkat, ditopang oleh perbaikan realisasi belanja pemerintah pusat dan APBD. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,00% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,13% (yoy). Dari sisi APBN, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Lampung terus menunjukkan perbaikan meski masih berkontraksi sebesar 5,46% (yoy) pada triwulan laporan, namun tidak sedalam

Grafik 1.9 Perkembangan Pagu Belanja APBD dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung



Sumber: BPP dan BPP Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.10 Realisasi Belanja APBD dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung



Sumber: Kementerian Keuangan - GPE, diolah (dikirim per 27 November 2025)

Grafik 1.11 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung

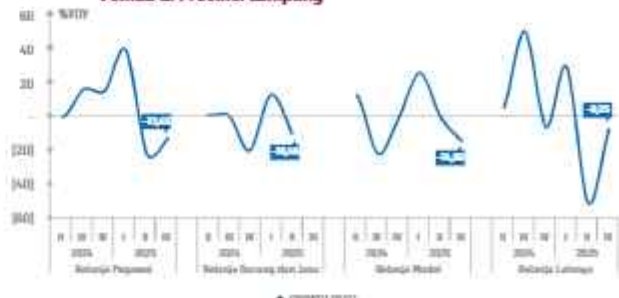


Sumber: BPP, diolah

kontraksi pada dua triwulan sebelumnya (Grafik 1.10). Perkembangan tersebut sejalan dengan percepatan penyaluran belanja barang, belanja modal, serta bantuan sosial pada triwulan III. Pemulihan realisasi belanja pemerintah pusat juga didorong oleh normalisasi program kegiatan dan percepatan pembayaran paket pekerjaan yang biasanya dimulai pada pertengahan tahun anggaran, tecermin dari kontraksi realisasi belanja barang dan belanja modal yang lebih moderat pada triwulan laporan (Grafik 1.11).

Dari sisi APBD, perbaikan konsumsi pemerintah juga ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah daerah. Meskipun pagu belanja APBD tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 1.9), realisasi belanja APBD konsolidasi Pemda Lampung pada triwulan III

Grafik 1.12 Pertumbuhan Realisasi Belanja APBD Konsolidasi Seluruh Pemda di Provinsi Lampung



Sumber: Kementerian Keuangan - GPE, diolah (dikirim per 27 November 2025)

Grafik 1.13 DPK Pemerintah Daerah



Sumber: Laporan Bank Indonesia, Bank Indonesia, diolah

menunjukkan perbaikan, meski masih mencatat kontraksi sebesar 5,95% (yoy), namun tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya [Grafik 1.10]. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi yang lebih moderat pada pos belanja pegawai dan belanja lainnya [Grafik 1.12].

Akselerasi konsumsi pemerintah pada triwulan III 2025 turut didorong oleh peningkatan signifikan Dana Pemerintah ke Daerah (DPK). Pada periode laporan, DPK Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung tumbuh 30,83% (yoy), meningkat dari kontraksi pada triwulan sebelumnya [Grafik 1.13]. Kenaikan yang cukup besar ini mencerminkan percepatan penyaluran berbagai komponen transfer fiskal, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang pada triwulan III untuk mendukung penyelesaian program dan kegiatan APBD.

1.1.3. Investasi

Kinerja investasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 meningkat, ditopang oleh akselerasi realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebesar 6,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 5,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari PMDN yang tumbuh kuat sebesar 239,5% (yoy), terakselerasi dari 91,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya [Grafik 1.14].

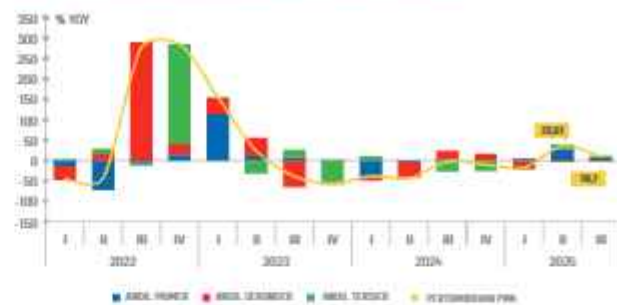
Akselerasi PMDN pada triwulan laporan tercermin pada meningkatnya investasi di seluruh kelompok lapangan usaha. Pada sektor tersier, realisasi investasi meningkat signifikan

Grafik 1.14 Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.15 Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung



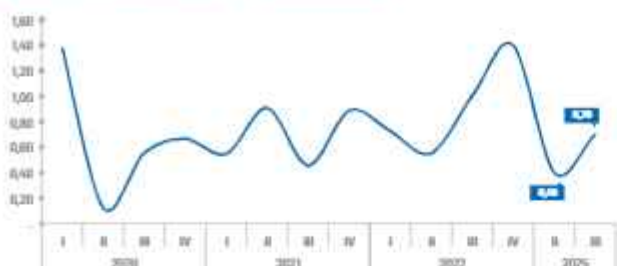
Sumber: BPS, diolah

terutama pada subsektor Listrik, Gas, dan Air, antara lain melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi, serta pada subsektor Transportasi, Perdagangan, dan Telekomunikasi, seiring ekspansi fasilitas penyimpanan barang oleh pelaku usaha. Pada sektor sekunder, investasi didorong oleh subsektor Industri Makanan, termasuk pembangunan pabrik pakan ternak baru, yang menjadi salah satu penopang utama PMDN Lampung. Sementara itu, pada sektor primer, peningkatan PMDN berasal dari subsektor Pertambangan dan Tanaman Pangan, termasuk perluasan lahan dan peningkatan kapasitas produksi di beberapa wilayah sentra.

Di sisi lain, penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Lampung tetap tumbuh positif meski melambat. Realisasi PMA meningkat 10,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 35,6% (yoy) pada triwulan sebelumnya [Grafik 1.15]. Kinerja positif PMA pada triwulan laporan terutama didorong oleh investasi pada sektor primer dan tersier, khususnya pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, serta subsektor Transportasi, Perdagangan, dan Telekomunikasi, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan logistik dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, realisasi PMA pada sektor sekunder masih mengalami kontraksi, terutama dipengaruhi oleh menurunnya investasi asing pada subsektor Industri Kimia dan Farmasi serta Industri Kertas dan Percetakan, seiring normalisasi permintaan pasca pemilu.

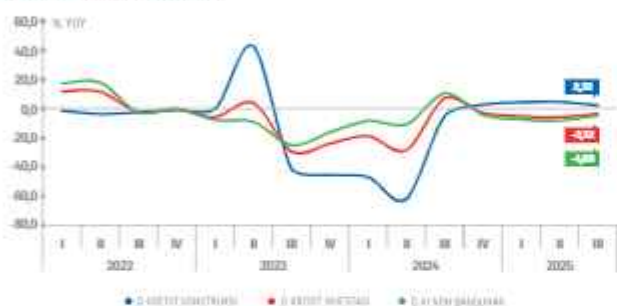
Peningkatan kinerja investasi pada triwulan III 2025 juga terkonfirmasi melalui hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Likert scale investasi tercatat membaik menjadi 0,70, meningkat dari 0,40 pada triwulan sebelumnya [Grafik 1.16]. Kenaikan ini mencerminkan persepsi pelaku usaha yang semakin optimistis terhadap realisasi investasi, didorong oleh perbaikan permintaan domestik, stabilitas makroekonomi, serta kondisi pembiayaan yang relatif kondusif. Beberapa responden liaison juga melaporkan bahwa realisasi investasi pada periode laporan didorong oleh ekspansi kapasitas produksi, pemeliharaan dan pembaruan mesin serta peralatan, serta penyelesaian proyek-proyek yang sempat tertunda pada semester sebelumnya.

Grafik 1.16 Perkembangan Likert Scale Investasi



Sumber: BPS, olahan

Grafik 1.17 Kredit Investasi



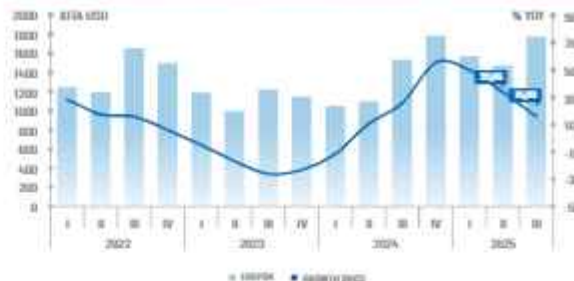
Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia, olahan

Optimisme tersebut turut diperkuat oleh perkembangan **intermediasi perbankan**. Kredit investasi, meskipun masih terkontraksi 3,32% [yoy], menunjukkan perbaikan dibandingkan kontraksi 5,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit konstruksi tetap tumbuh positif sebesar 2,33% (yoy), kendati lebih rendah dibandingkan 4,65% (yoy) pada periode sebelumnya [Grafik 1.17].

1.1.4. Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan, sejalan dengan moderasi ekspor luar negeri yang dipengaruhi oleh normalisasi permintaan global. Total ekspor tumbuh 5,33% (yoy), melambat dibandingkan 7,50% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini konsisten dengan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menunjukkan bahwa ekspor luar negeri nonmigas Lampung tumbuh lebih rendah, baik dari sisi nilai maupun volume. Secara nilai, ekspor meningkat 15,93% (yoy), turun dari 33,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sementara dari sisi volume kembali mencatat kontraksi yang lebih dalam, yakni -10,67% (yoy) dibandingkan -2,22% (yoy) pada periode sebelumnya [Grafik 1.18 dan Grafik 1.19]. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global dan normalisasi harga pada beberapa komoditas utama ekspor Lampung, menyusul tren penyesuaian di pasar internasional. Tekanan terutama terjadi pada kelompok produk pertambangan dan produk pertanian, yang mencatat pelemahan baik dari sisi harga maupun permintaan.

Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung



Sumber: DJBC, olahan

Grafik 1.19 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung

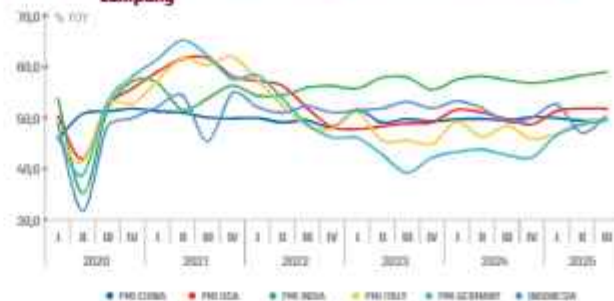


Sumber: DJBC, olahan

Sebaliknya, ekspor produk industri manufaktur masih mencatatkan kinerja yang kuat, didukung oleh permintaan yang relatif stabil di pasar mitra dagang utama.

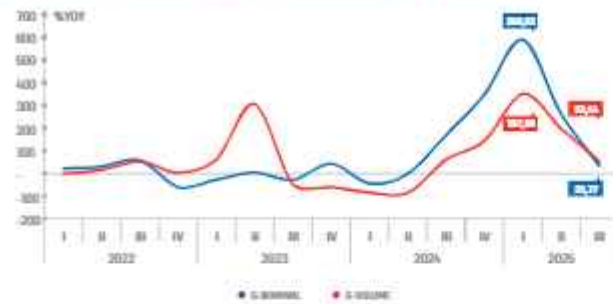
Kinerja ekspor kopi Lampung pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan sejalan dengan normalisasi harga dan permintaan kopi dunia. Nilai ekspor luar negeri komoditas kopi, teh, dan rempah tercatat tumbuh 33,77% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 263,82% (yoy) [Grafik 1.21]. Perkembangan harga dunia turut menunjukkan moderasi. Rata-rata harga kopi robusta global pada triwulan laporan tercatat USD4,24/kg, menurun dari USD5,00/kg pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan pemulihan pasokan dari negara produsen utama. Coffee Market Report [International Coffee Organization, Oktober 2025] melaporkan bahwa stok global diperkirakan meningkat karena membaiknya produksi di berbagai negara produsen,

Grafik 1.20 Prompt Manufacturing Index Mitra Dagang Utama Provinsi Lampung



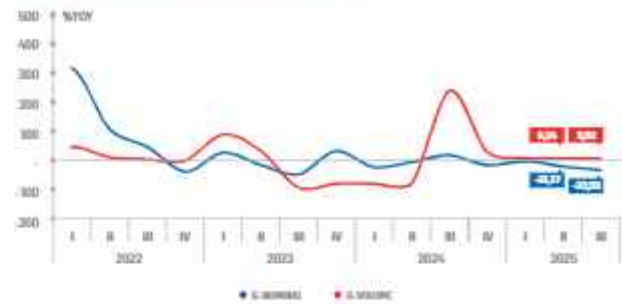
Sumber: Trading Economics & Investing, olahan

Grafik 1.21 Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi, Teh dan Rempah



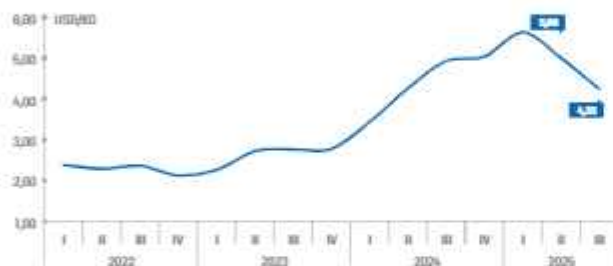
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Batubara



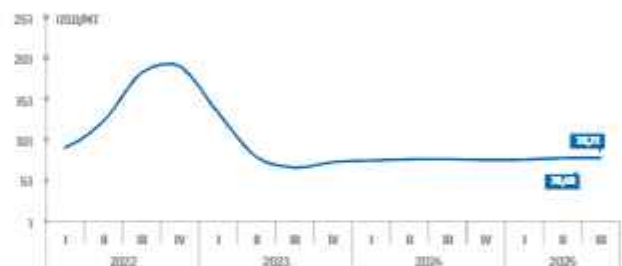
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Harga Kopi Robusta Dunia



Sumber: World Bank, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Harga Batubara Dunia



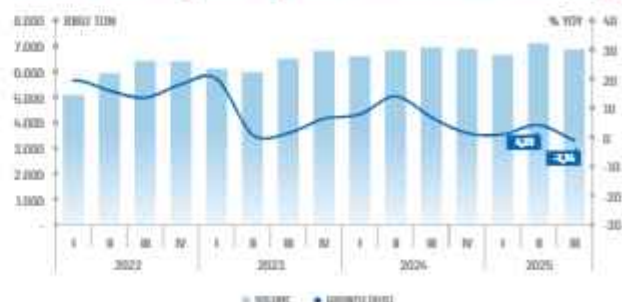
Sumber: Bloomberg, diolah

terutama Vietnam dan Brasil yang memasuki periode panen raya. Normalisasi ekspor robusta dari kedua negara tersebut memperkuat ekspektasi ketersediaan pasokan sehingga menahan potensi kenaikan harga di pasar internasional. Dari sisi domestik, pasokan kopi robusta Lampung juga mulai meningkat seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi, sehingga memberikan tekanan tambahan pada harga di tingkat petani.

Kinerja ekspor batubara Lampung pada triwulan III 2025 menunjukkan perlambatan yang lebih dalam, dipengaruhi oleh kombinasi faktor permintaan dan harga di pasar global. Pada periode laporan, nilai ekspor batubara Lampung berkontraksi 33,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 21,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.23). Pelemahan ini terjadi di tengah pasar batubara global yang masih lesu, dengan harga rata-rata dunia yang relatif stabil pada kisaran USD78,71/mt, hanya sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya USD78,48/mt (Grafik 1.24). Stabilitas harga tersebut lebih mencerminkan faktor musiman didukung tingginya kebutuhan listrik akibat gelombang panas di Asia, bukan karena menguatnya permintaan dasar. Laporan *World Bank Commodity Markets Outlook* (Oktober 2025) mencatat bahwa konsumsi batubara dunia pada semester I 2025 justru turun sekitar 1% (yoy), dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi listrik di China dan India, dua importir terbesar batubara global yang meningkatnya bauran energi terbarukan dan normalisasi permintaan industri. Di Uni Eropa, penggunaan batubara sedikit meningkat akibat penurunan produksi energi

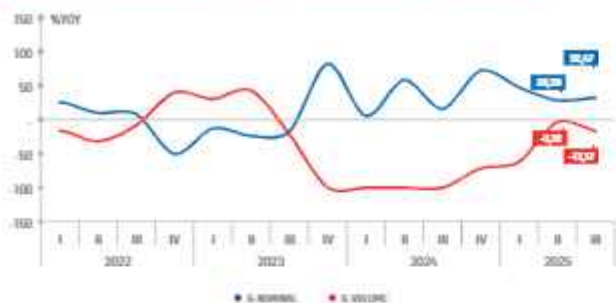
terbarukan, namun skalanya tidak cukup besar untuk menahan perlambatan permintaan global. Pada saat yang sama, produksi batubara dunia justru meningkat, terutama dari China dan Amerika Serikat, sehingga memperkuat kondisi *oversupply* dan menahan ruang pemulihan harga internasional. Di saat permintaan melemah, produksi dunia justru meningkat, terutama dari China dan Amerika Serikat, yang memperkuat kondisi *oversupply* dan menahan peluang pemulihan harga. Dari sisi domestik, arus pasokan batubara yang melalui Lampung juga melambat, tercermin dari kontraksi volume pengiriman batubara Sumatera Selatan-Lampung sebesar 1,14% (yoy), setelah mencatat pertumbuhan positif 4,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sehingga turut membatasi kapasitas ekspor Lampung pada triwulan laporan.

Grafik 1.25 Volume Angkutan Kargo Batubara Sumatera Selatan - Lampung



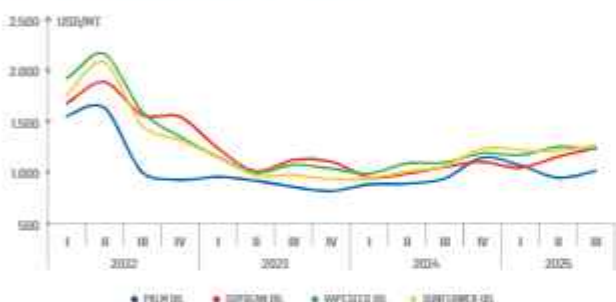
Sumber: PT AN, diolah

Grafik 1.26 Perkembangan Ekspor Lemak Dan Minyak Hewan/Nabati



Sumber: BPS, 2025

Grafik 1.27 Perkembangan Harga CPO Dunia



Sumber: OIL price

Lebih lanjut, perlambatan kinerja ekspor Lampung tertahan oleh ekspor minyak kelapa sawit yang meningkat. Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati tumbuh 32,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 28,39% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun, dari sisi volume, ekspor justru mencatat kontraksi yang lebih dalam, yakni 17,17% (yoy) dibandingkan 3,12% (yoy) pada periode sebelumnya. Divergensi antara nilai dan volume tersebut menggambarkan bahwa peningkatan ekspor lebih banyak dipicu oleh penguatan harga CPO dunia. Kenaikan nilai ekspor selaras dengan peningkatan rata-rata harga CPO global yang naik menjadi USD1.013/mt, dari USD946/mt pada triwulan sebelumnya. Momentum kenaikan ini turut diperkuat oleh meningkatnya harga beberapa minyak nabati substitusi seperti *soybean oil*, *rapeseed oil*, dan *sunflower oil* yang berada pada level lebih tinggi dibandingkan minyak kelapa sawit, sehingga membuat CPO relatif lebih kompetitif di pasar global. Dari sisi permintaan, kuatnya minat pasar internasional terhadap minyak sawit Lampung juga didukung oleh perbaikan aktivitas manufaktur di negara mitra dagang utama. *Prompt Manufacturing Index (PMI)* India dan Amerika Serikat kembali meningkat dan bertahan pada zona ekspansif (>50) pada triwulan III 2025 (Grafik 1.20), menandakan peningkatan output industri dan kebutuhan bahan baku, termasuk minyak nabati. Sementara itu, laporan *World Bank Commodity Markets Outlook* (Oktober 2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi minyak sawit global pada 2025–2026 diperkirakan lebih lambat dibandingkan tren historis. Prospek penawaran yang relatif ketat di tengah permintaan

Grafik 1.28 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Sumber: BPS, 2025

Grafik 1.29 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan

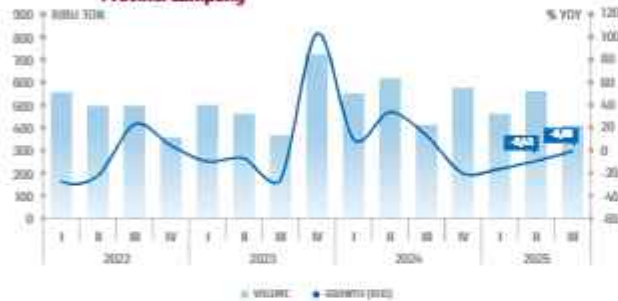


Sumber: BPS, 2025

yang kuat menjaga keseimbangan pasar tetap berpihak pada harga, sehingga menopang penguatan nilai ekspor CPO Lampung pada periode laporan.

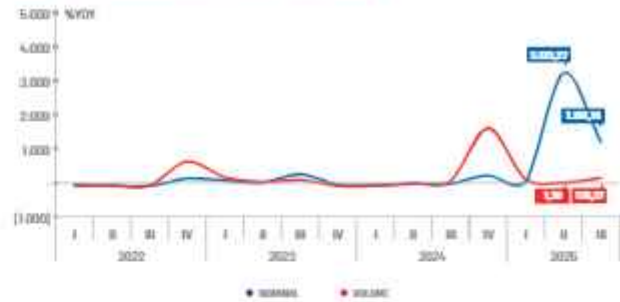
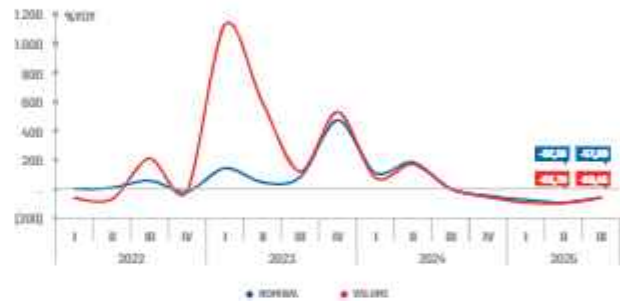
Berdasarkan kontribusinya, komoditas lemak & minyak hewan/nabati (CPO dan RPO); kopi, teh & rempah-rempah; dan bahan bakar mineral (batubara) merupakan komoditas ekspor luar negeri utama Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,09%, 29,20%, dan 9,27% (Grafik 1.27). Adapun negara tujuan ekspor utama Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok dan Belanda dengan pangsa masing-masing sebesar 15,62%; 8,57%; 8,24%; dan 7,58% (Grafik 1.29).

Berbeda dengan ekspor yang melambat, realisasi impor Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 mencatat peningkatan, mengindikasikan meningkatnya kebutuhan input produksi seiring berlanjutnya aktivitas industri dan investasi. Secara keseluruhan, total impor tumbuh 7,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 6,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini sejalan dengan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menunjukkan bahwa impor nonmigas Lampung mencapai USD328,51 juta, tumbuh kuat 23,23% (yoy), berbalik dari kontraksi pada periode sebelumnya (Grafik 1.30). Dari sisi volume, impor nonmigas masih mencatat kontraksi 0,88% (yoy), namun penurunannya jauh lebih moderat dibandingkan -9,43% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.31). Perbaikan pada sisi volume ini menunjukkan bahwa

Grafik 1.30 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung**Grafik 1.31 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Lampung**

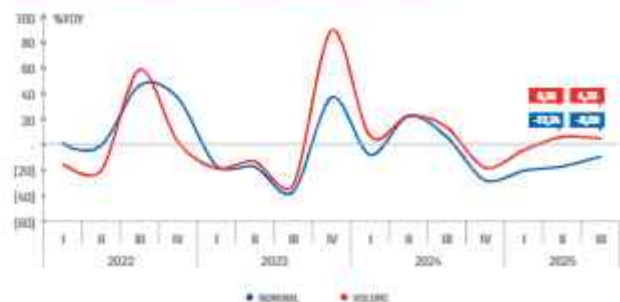
tekanan pengurangan impor mulai mereda, sejalan dengan meningkatnya permintaan industri terhadap bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor pada periode laporan terutama didorong oleh kenaikan impor barang modal, selaras dengan meningkatnya aktivitas investasi di daerah. Selain itu, kontraksi impor barang konsumsi mulai melandai, menandakan membaiknya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, impor bahan baku penolong masih mencatat perlambatan, mencerminkan moderasi aktivitas beberapa subsektor industri pengolahan pada periode laporan.

Realisasi impor barang modal Lampung pada triwulan III 2025 melanjutkan pertumbuhan positif, mencerminkan penguatan aktivitas investasi di daerah. Pada periode laporan, volume impor barang modal tumbuh signifikan sebesar 136,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 1,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Meskipun dari sisi nilai pertumbuhan nominalnya tercatat lebih moderat, realisasi tersebut masih berada di atas rata-rata pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tetap menunjukkan permintaan yang kuat terhadap barang modal (Grafik 1.32). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan alat angkut untuk industri serta barang modal selain alat angkut, seperti berbagai jenis mesin dan peralatan industri yang digunakan dalam perluasan kapasitas produksi maupun pemeliharaan fasilitas usaha. Perkembangan tersebut konsisten dengan kinerja investasi yang menunjukkan akselerasi pada triwulan

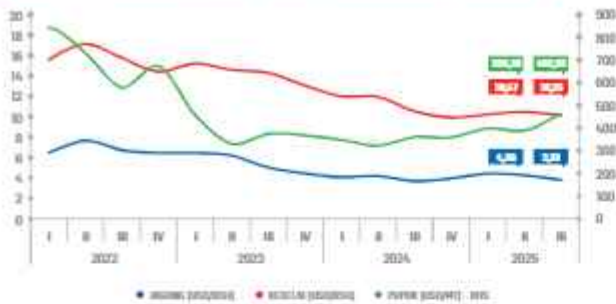
Grafik 1.32 Perkembangan Impor Barang Modal**Grafik 1.33 Perkembangan Impor Barang Konsumsi**

III, dan diperkuat oleh perkembangan pembiayaan, di mana kredit investasi non-bangunan tercatat tumbuh positif sebesar 2,33% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.17).

Realisasi impor barang konsumsi Lampung pada triwulan III 2025 masih mencatat kontraksi, namun penurunannya jauh lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring menguatnya kinerja konsumsi domestik. Volume impor barang konsumsi pada periode laporan terkontraksi 60,46% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi yang jauh lebih dalam pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.33). Perbaikan ini mencerminkan mulai pulihnya permintaan rumah tangga terhadap barang konsumsi impor, sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025. Pemulihan tersebut terutama terlihat pada barang konsumsi tidak tahan lama,

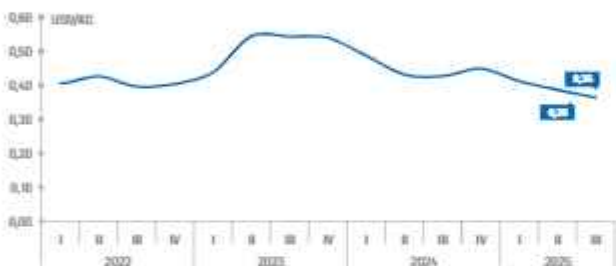
Grafik 1.34 Perkembangan Impor Bahan Baku Penolong

Grafik 1.35 Perkembangan Harga Jagung, Kedelai dan Pupuk Dunia



Sumber: World Bank dan Bloomberg, Global

Grafik 1.36 Perkembangan Harga Gula Dunia



Sumber: Bloomberg, Global

kelompok yang paling cepat merespons perbaikan daya beli masyarakat. Permintaan pada kelompok ini mulai meningkat kembali, sehingga menahan kedalaman kontraksi yang terjadi pada periode sebelumnya. Impor barang konsumsi setengah tahan lama juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari kontraksi yang semakin moderat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang penunjang aktivitas sehari-hari. Sementara itu, impor barang konsumsi tahan lama masih mencatat penurunan.

Realisasi impor bahan baku penolong pada triwulan III 2025 tetap kuat, sejalan dengan kinerja Industri Pengolahan yang masih tumbuh positif. Volume impor bahan baku penolong tercatat tumbuh 4,75% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan 6,16% (yoy) pada triwulan sebelumnya, namun tetap mencerminkan kebutuhan input produksi yang terjaga. Dari sisi nilai, impor bahan baku penolong masih mencatat kontraksi 9,29% (yoy), namun penurunannya jauh lebih moderat dibandingkan -17,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.34). Perkembangan tersebut tidak lepas dari kenaikan harga berbagai komoditas bahan baku impor utama Lampung, salah satunya harga pupuk dunia yang meningkat menjadi USD462,83/kg dari USD388,28/kg pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.35). Secara volume, peningkatan impor bahan baku penolong terutama didorong oleh meningkatnya kebutuhan input pada sektor pertanian dan industri pengolahan, termasuk impor pupuk, bahan kimia organik, bahan kimia anorganik, serta produk kimia khusus yang digunakan dalam berbagai proses produksi. Permintaan yang tetap kuat

Grafik 1.37 Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Sumber: BPS, Global

Grafik 1.38 Distribusi Impor Non Migas Berdasarkan Negara Asal



Sumber: BPS, Global

terhadap kelompok bahan baku tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi di Lampung masih bergerak ekspansif, konsisten dengan pertumbuhan industri pengolahan yang tetap positif pada triwulan III 2025.

Dilihat dari kontribusinya, hewan hidup, pupuk, limbah hasil industri makanan (bungkil jagung dan kedelai) dan gula (gula industri atau rafinasi) merupakan komoditas utama impor non migas luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 dengan kontribusi masing-masing sebesar 15,54%; 12,70%; 10,35%; dan 7,59% (Grafik 1.37). Sementara itu, impor Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 terutama berasal dari Amerika Serikat, Australia, Tiongkok dan Kanada dengan pangsa masing-masing sebesar 38,75%; 22,58%; 6,91%; dan 3,76% (Grafik 1.38).

1.2 ANALISIS PDRB SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 terutama ditopang oleh pemulihan sektor primer. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menjadi motor utama perekonomian dengan pertumbuhan 7,74% (yoy) dan kontribusi 1,96% terhadap total pertumbuhan. Pemulihan sektor ini ditopang oleh peningkatan produksi padi pada periode panen gadu serta masuknya musim panen hortikultura di sejumlah sentra produksi. Selain itu, produksi tanaman pangan lainnya seperti jagung menunjukkan penguatan, sementara produksi ubi kayu masih mengalami perlambatan.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA (% YEAR ON YEAR)	2024				2025			Sumber Pertumbuhan Tw III 25[%]
	I	II	III	IV	I	II	III	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-11,19	0,21	-1,10	3,62	5,42	1,00	7,74	1,96
Pertambangan dan Penggalian	11,37	6,01	2,78	-0,04	-3,32	-3,00	-1,71	-0,08
Industri Pengolahan	6,66	4,78	10,67	14,16	8,79	9,97	4,74	0,89
Pengadaan Listrik, Gas	-16,26	-9,98	-4,61	4,71	7,23	-4,71	-6,86	-0,01
Pengadaan Air	-3,27	0,20	0,15	1,59	4,93	2,50	-0,13	0,00
Konstruksi	6,86	8,22	0,64	-3,38	0,96	6,14	6,96	0,69
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,58	5,36	7,87	7,02	6,46	7,34	3,98	0,58
Transportasi dan Pergudangan	11,44	14,87	10,29	4,06	8,20	7,52	4,62	0,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,67	3,77	5,57	6,22	7,29	8,06	7,35	0,12
Informasi dan Komunikasi	9,34	6,26	9,37	9,54	7,83	3,66	4,33	0,24
Jasa Keuangan	7,70	9,12	3,22	-0,35	3,43	1,14	3,23	0,06
Real Estate	9,84	6,29	7,18	4,01	6,76	2,83	0,38	0,01
Jasa Perusahaan	9,91	9,44	9,10	8,53	3,79	7,46	1,34	0,00
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	15,94	7,00	5,37	0,74	0,67	-1,18	3,23	0,15
Jasa Pendidikan	3,73	0,24	0,88	1,19	2,20	2,17	1,89	0,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,86	8,26	9,23	6,63	7,84	-0,03	2,51	0,03
Jasa Lainnya	9,06	9,09	9,50	13,85	9,66	9,18	3,40	0,04
PDRB	3,30	4,80	4,81	5,32	5,47	5,09	5,04	5,04

Sumber: BPS, diolah

Kinerja sektor sekunder dan tersier juga tetap positif, meskipun beberapa lapangan usaha mencatat perlambatan. Industri Pengolahan tumbuh 4,75% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya namun tetap menjadi kontributor terbesar kedua dengan sumbangan 0,89% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh masih kuatnya permintaan ekspor untuk produk olahan buah, meskipun ekspor olahan minyak kelapa sawit dan karet menunjukkan perlambatan. Sejalan dengan itu, kinerja Perdagangan Besar dan Eceran juga melambat, tumbuh 3,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya akibat normalisasi perdagangan antar daerah pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sementara itu, Lapangan Usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan yang lebih kuat sebesar 6,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh berlanjutnya proyek pembangunan pemerintah maupun swasta, serta sejalan dengan peningkatan kinerja investasi.

Grafik 1.39 Pangsa PDRB Lapangan Usaha



Sumber: BPS, diolah

PDRB Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 masih didominasi oleh tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; dan LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing berkontribusi sebesar 28,38%; 19,44% dan 13,91% terhadap PDRB.

1.2.1. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

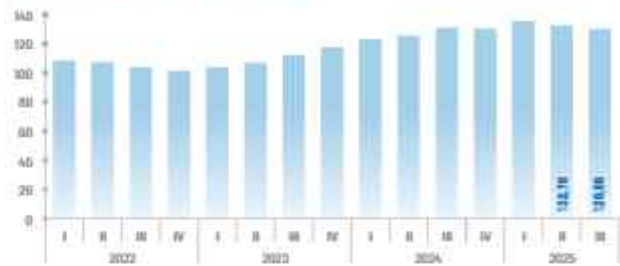
Kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 meningkat, ditopang oleh membaiknya produksi tanaman pangan. Pada periode laporan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,74% (yoy), menguat dibandingkan 1,89% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.2). Penguatan tersebut terutama didorong oleh perbaikan produksi padi seiring berlangsungnya musim panen gadu. Berdasarkan amatan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS amatan Agustus, produksi gabah kering giling (GKG) Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 507,79 ribu ton, atau meningkat 47,66% (yoy), setelah berkontraksi 8,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.40). Selain padi, komoditas tanaman pangan lainnya turut memberikan dorongan positif. Produksi jagung Lampung menunjukkan perbaikan dengan kontraksi yang jauh lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam prognosa Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH). Di sisi lain, produksi ubi kayu diperkirakan masih mengalami penurunan dan bahkan lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya, mencerminkan berlanjutnya penyesuaian produksi di beberapa sentra utama (Grafik 1.41).

Grafik 1.40 Produksi Gabah Kering Giling



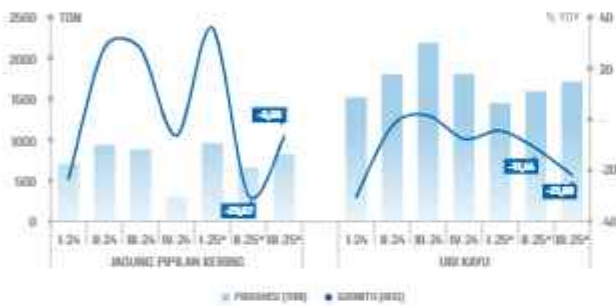
Sumber: BPS, dikali

Grafik 1.43 Nilai Tukar Usaha Pertanian



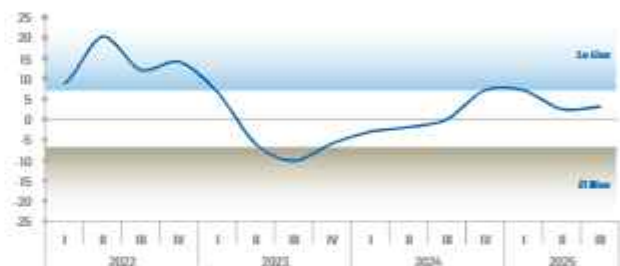
Sumber: BPS, Bank Indonesia

Grafik 1.41 Produksi Jagung dan Ubi Kayu



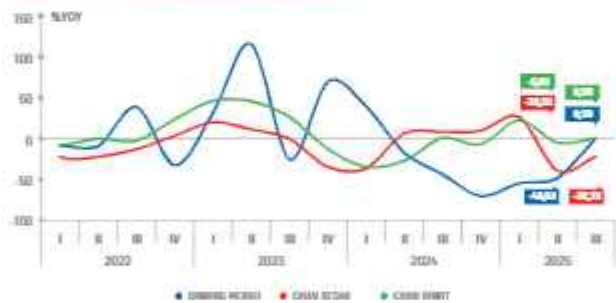
Sumber: BPS, dikali

Grafik 1.44 Southern Oscillation Index



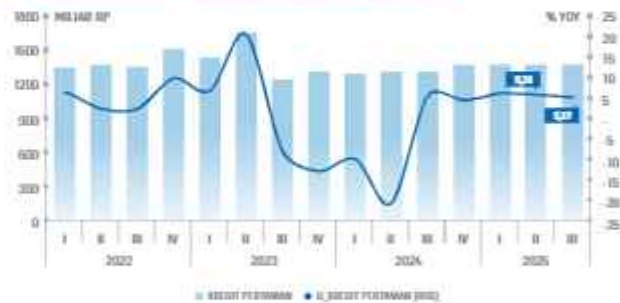
Sumber: BMKG

Grafik 1.42 Produksi Tanaman Hortikultura



Sumber: BPS, Bank Indonesia

Grafik 1.45 Kredit LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Sumber: Laporan Bank Umum, dikali

Perbaikan juga terjadi pada subsektor hortikultura, meskipun beberapa komoditas masih mencatatkan kontraksi. Prognosa produksi bawang merah, cabai besar, dan cabai merah menunjukkan penurunan yang lebih terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan masuknya periode panen di sejumlah wilayah seperti Kota Metro dan Lampung Barat (Grafik 1.42).

Dari sisi pendapatan usaha tani, margin petani masih relatif terjaga meskipun terdapat tekanan dari dinamika harga dan kondisi cuaca. Rata-rata Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada triwulan III 2025 tercatat 129,96, sedikit lebih rendah dibandingkan 132,76 pada triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa kemampuan petani dalam menutup biaya produksi masih berada pada level yang baik. Penurunan NTUP tersebut terutama mencerminkan koreksi harga pada

beberapa komoditas perkebunan utama, khususnya kopi robusta, yang menekan pendapatan petani di subsektor terkait. Lebih lanjut, *Southern Oscillation Index (SOI)* berada dalam zona netral sepanjang triwulan laporan, menunjukkan tidak adanya anomali cuaca yang ekstrem. Meski demikian, curah hujan yang lebih rendah dibandingkan awal tahun memberikan dorongan yang lebih terbatas terhadap produktivitas tanaman pangan (Grafik 1.44).

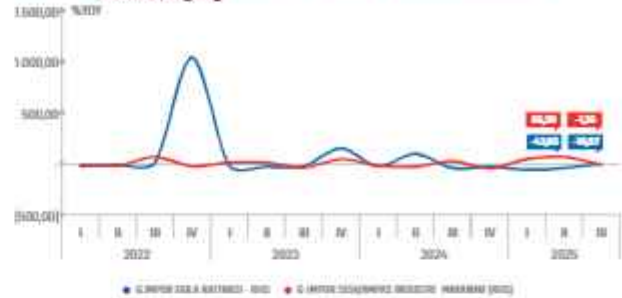
Dukungan pembiayaan perbankan terhadap sektor pertanian juga tetap terjaga. Pertumbuhan kredit untuk Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat 5,17% (yoy), hanya sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa aliran pembiayaan untuk modal kerja dan investasi di sektor ini masih berlangsung stabil (Grafik 1.45).

1.2.2 LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat melambat, seiring penurunan permintaan ekspor komoditas utama. Pada periode laporan, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,74% (yoy), lebih rendah dibandingkan 9,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring normalisasi aktivitas subsektor industri pengolahan makanan minuman pasca puncak musim giling tebu dan pelemahan permintaan luar negeri. Dari sisi permintaan eksternal, realisasi ekspor beberapa komoditas utama industri pengolahan Lampung tercatat mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekspor komoditas lemak & minyak hewani/nabati tercatat melemah pada triwulan laporan, yakni sebesar 25,03% (yoy) setelah tumbuh 64,85% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, ekspor lemak & minyak hewani/nabati berkontraksi sebesar 17,17% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi sebesar 3,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, kinerja impor produk olahan buah tercatat membaik meski masih berkontraksi sebesar 4,88% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya (Grafik 1.46).

Perkembangan konsumsi energi dan impor bahan baku penolong turut mengonfirmasi perlambatan aktivitas industri pengolahan Lampung pada triwulan laporan. Konsumsi listrik industri tumbuh 2,93% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 15,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya, mengindikasikan moderasi aktivitas operasional di sejumlah pabrik (Grafik 1.47). Dari sisi input produksi, kinerja impor bahan baku utama di subsektor industri makanan dan minuman juga menunjukkan pelemahan. Volume impor sisa atau ampas

Grafik 1.48 Pertumbuhan Volume Impor Gula Rafinasi dan Bungkil Kedelai/Jagung

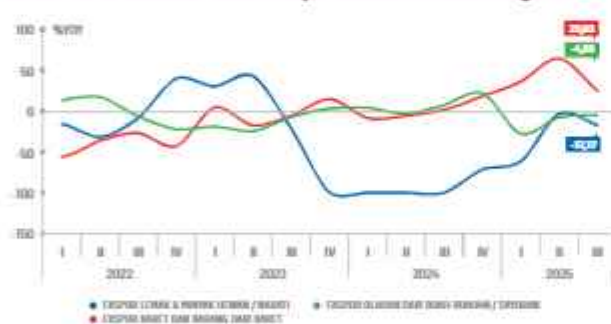


Sumber: BPS, diolah

industri makanan, termasuk bungkil kedelai dan bungkil jagung sebagai bahan baku pakan ternak, tercatat berkontraksi 10,87% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 68,20% (yoy). Sementara itu, impor gula rafinasi untuk industri masih melanjutkan kontraksi sebesar 1,16% (yoy), meskipun tidak sedalam penurunan 45,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan berakhirnya puncak musim giling tebu di Lampung.

Dari sisi pembiayaan, dukungan perbankan terhadap Lapangan Usaha Industri Pengolahan menunjukkan penurunan, sejalan dengan moderasi aktivitas industri pada triwulan laporan. Penyaluran kredit di sektor ini tercatat berkontraksi 1,62% (yoy), melemah dari pertumbuhan kuat 17,68% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.49). Sejalan dengan itu, *Prompt Manufacturing Index (PMI)* Provinsi Lampung pada triwulan III

Grafik 1.46 Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.49 Kredit LU Industri Pengolahan



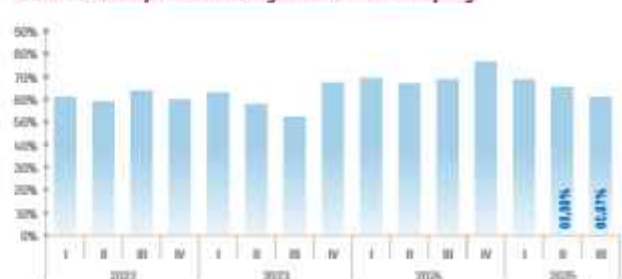
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.47 Konsumsi Listrik Industri



Sumber: PT PLN, diolah

Grafik 1.50 Prompt Manufacturing Index Provinsi Lampung



Sumber: Bank Indonesia, diolah

2025 tetap berada dalam zona ekspansif sebesar 60,97%, tetapi lebih rendah dibandingkan 61,54% pada periode sebelumnya (Grafik 1.50). Perkembangan tersebut mengonfirmasi bahwa aktivitas manufaktur di Lampung masih tumbuh, namun laju ekspansinya bergerak lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya.

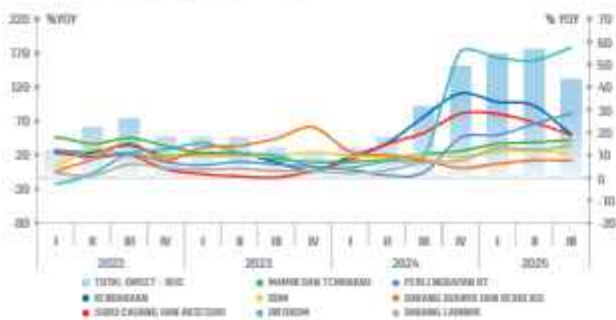
1.2.3. LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan, sejalan dengan moderasi aktivitas perdagangan ritel. Sektor ini tumbuh sebesar 3,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan 7,33% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan omset penjualan eceran, terutama pada kelompok kendaraan, suku cadang, aksesoris, serta bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi penekan utama kinerja perdagangan ritel pada periode laporan (Grafik 1.51). Perlambatan kelompok otomotif dalam SPE mencerminkan lemahnya penjualan produk pendukung kendaraan, seperti suku cadang dan aksesoris, serta berkurangnya konsumsi BBM, bukan semata-mata penjualan unit kendaraan baru.

Di sisi lain, indikator penjualan kendaraan baru justru mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendaftaran kendaraan bermotor baru (BBN1) yang pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,34% (yoy) setelah berkontraksi 0,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.52). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari penjualan kendaraan roda dua dan tiga, serta perbaikan pada penjualan truk, sementara kendaraan roda empat masih mencatat kontraksi meskipun dengan kedalaman yang lebih moderat (Grafik 1.52).

Intermediasi perbankan turut mendukung perkembangan tersebut. Penyaluran kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat berkontraksi 4,72% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,94% (yoy), sejalan dengan melemahnya aktivitas perdagangan (Grafik 1.53). Sebaliknya, kredit kendaraan bermotor tumbuh 5,34% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,18% (yoy), sejalan dengan peningkatan penjualan kendaraan baru (Grafik 1.54).

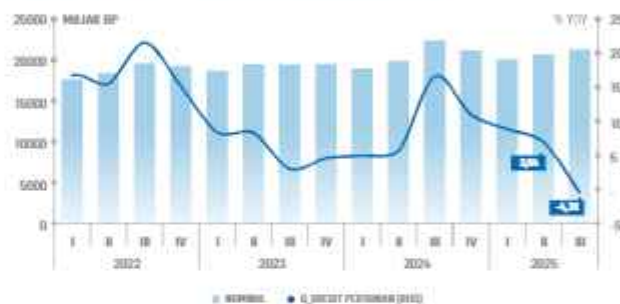
Grafik 1.51 Omset Penjualan Eceran



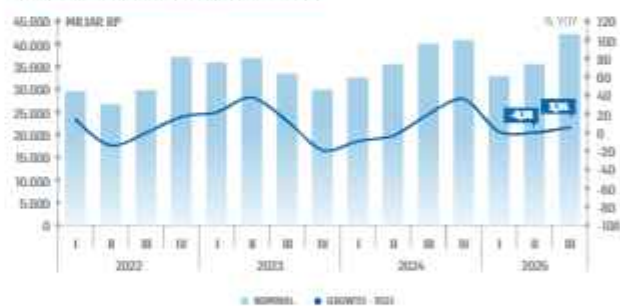
Grafik 1.52 Pertumbuhan Jumlah Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru (BBN1) di Provinsi Lampung



Grafik 1.53 Kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran



Grafik 1.54 Kredit Kendaraan Bermotor

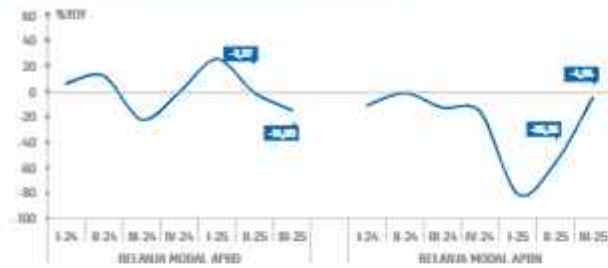


1.2.4 LU Konstruksi

Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 meningkat, ditopang oleh berlanjutnya proyek pembangunan pemerintah dan swasta. Pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 6,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 6,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya, mencerminkan aktivitas konstruksi yang tetap ekspansif pada periode laporan.

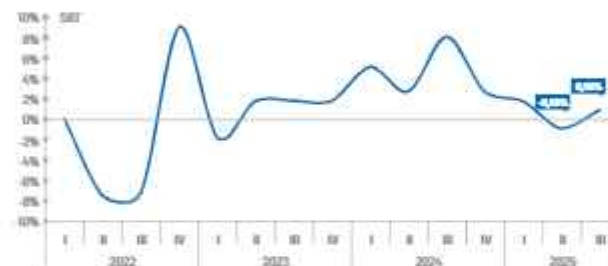
Dari sisi pemerintah, peningkatan kinerja sektor konstruksi antara lain ditopang oleh percepatan penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk program prioritas di bidang ketahanan pangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, progres konstruksi program optimalisasi lahan di Provinsi Lampung yang mencakup rehabilitasi bangunan, pintu air, dan jaringan irigasi telah mencapai 100% per Oktober 2025, menjadi

Grafik 1.55 Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal



Sumber: SUPRI & SUPRI, diolah

Grafik 1.56 Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi



Sumber: SUPRI, diolah

capaian tertinggi di Sumatera. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan di beberapa daerah turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas konstruksi. Perkembangan tersebut sejalan dengan membaiknya realisasi belanja modal APBN, yang meskipun masih terkontraksi 4,94% (yoy), namun lebih baik dibandingkan penurunan pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.55), sehingga mendukung akselerasi penyelesaian proyek fisik pemerintah

Selain proyek pemerintah, aktivitas pembangunan swasta turut mendukung kinerja positif LU Konstruksi pada triwulan laporan. Permintaan terhadap properti, perumahan, serta proyek infrastruktur penunjang kegiatan usaha tetap kuat, sehingga mendorong pelaku swasta untuk melanjutkan ekspansi konstruksi. Hal ini juga terkonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, di mana Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi LU Konstruksi pada triwulan III 2025 kembali positif sebesar 0,90%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,90% (Grafik 1.56). Indikator turunan lainnya juga memperkuat perkembangan kinerja konstruksi. Pengadaan semen di Provinsi Lampung masih tumbuh solid sebesar 7,96% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.57). Dari sisi pembiayaan, kredit konstruksi tetap tumbuh positif sebesar 2,33% (yoy), meskipun melambat dari 4,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menandakan bahwa dukungan perbankan terhadap aktivitas konstruksi tetap baik (Grafik 1.58).

Grafik 1.57 Realisasi Pengadaan Semen di Provinsi Lampung



Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah

Grafik 1.58 Kredit Konstruksi



Sumber: Laporan Bank Indonesia, diolah

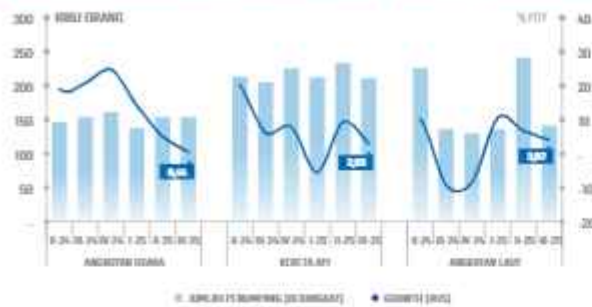
1.2.5 LU Transportasi dan Pergudangan

Kinerja Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan, dipengaruhi oleh normalisasi mobilitas masyarakat pasca periode *high season* Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pertumbuhan LU ini tercatat sebesar 7,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan 8,20% (yoy) pada triwulan sebelumnya, mencerminkan moderasi pada aktivitas angkutan penumpang maupun barang.

Dari sisi transportasi penumpang, perlambatan terjadi pada seluruh moda angkutan utama. Jumlah penumpang angkutan udara, laut, dan kereta api masing-masing tumbuh 0,44% (yoy), 2,92% (yoy), dan 3,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan sebelumnya (Grafik 1.59). Penurunan laju pertumbuhan ini selaras dengan siklus musiman, di mana mobilitas masyarakat cenderung menurun setelah tingginya aktivitas perjalanan selama periode libur keagamaan dan sekolah. Meskipun aktivitas transportasi penumpang melambat, aktivitas pariwisata tetap kuat. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tujuan Lampung tumbuh tinggi sebesar 58,13% (yoy), meski sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan daya tarik pariwisata Lampung masih terjaga dan tetap menjadi salah satu pendorong permintaan jasa transportasi (Grafik 1.60).

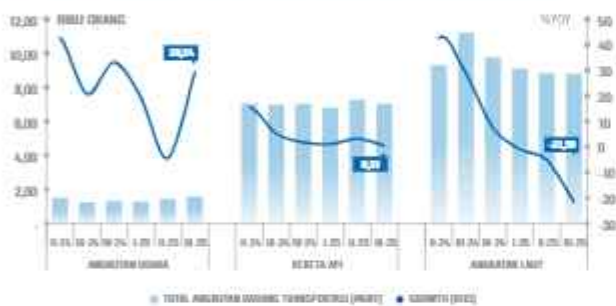
Dari sisi transportasi barang, kinerja sektor juga menunjukkan moderasi. Arus barang melalui moda laut mengalami kontraksi

Grafik 1.59 Perkembangan Penumpang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api



Sumber: BPS, olahan

Grafik 1.61 Perkembangan Barang Angkutan Udara, Laut dan Kereta Api



Sumber: BPS, olahan

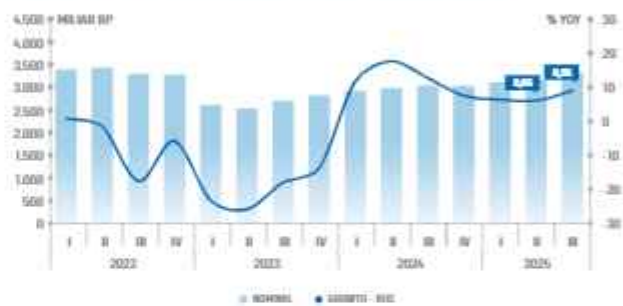
lebih dalam sebesar 21,59% (yoy), sejalan dengan indikasi aktivitas perdagangan antar daerah yang melambat. Angkutan barang melalui kereta api juga melambat meski tetap tumbuh positif 0,50% (yoy), sementara angkutan barang melalui udara justru tumbuh kuat sebesar 29,24% (yoy) setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya sehingga turut menopang kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada periode laporan (Grafik 1.61).

Grafik 1.60 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Provinsi Lampung



Sumber: BPS, olahan

Grafik 1.62 Kredit LU Transportasi, Pegudangan dan Infokom



Sumber: Laporan Bank Umum, olahan

Dari sisi pembiayaan, dukungan intermediasi perbankan terhadap LU Transportasi dan Pergudangan tetap kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit LU Transportasi, Pergudangan, dan Infokom yang mencapai 8,96% (yoy), meningkat dibandingkan 6,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.62). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas operasional transportasi melambat, ekspansi usaha dan kebutuhan pembiayaan pelaku industri masih berjalan.

Buku 1 :

Fenomena *Commodity Trap* pada Perekonomian Lampung

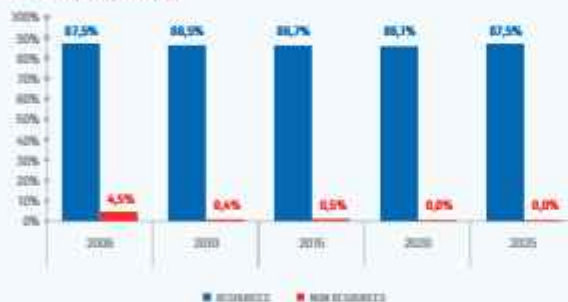
Lampung saat ini termasuk sebagai salah satu daerah yang sangat bergantung pada sektor komoditas (*commodity dependent*) sebagai sumber pendapatan perekonomian. Ekspor luar negeri hampir seluruhnya berasal dari penjualan bahan komoditas seperti kopi, kelapa sawit, karet dan nanas. Data menunjukkan bahwa sektor komoditas mendominasi ekspor ke luar negeri dari tahun 2008 hingga September 2025 yang mencapai hampir 90% dari total ekspor sementara barang non-komoditas yang berasal dari industri pengolahan relatif kecil (grafik 1).

Sebagai termasuk salah satu daerah *commodity dependent*, perekonomian Lampung berpotensi mengalami suatu fenomena *commodity trap* yang berada pada *state of dependence* dalam waktu yang relatif lama. UNCTAD (2021) mengemukakan bahwa perekonomian suatu daerah (negara atau provinsi) akan mengalami tiga kondisi (*states*) yaitu *non-commodity dependent*, *commodity dependent* dan *strongly commodity dependent*. *Non-commodity dependent* yaitu daerah yang memiliki kurang dari 60% ekspor (luar negeri atau antar daerah) berasal dari sektor komoditas. Sedangkan

commodity dependent adalah daerah yang antara 60% - 80% pendapatan eksportnya berasal dari sektor komoditas, sementara *strongly commodity dependent* memiliki lebih dari 80% eksportnya dari sektor komoditas. Negara maju sebagian besar merupakan *non-commodity dependent*, sebaliknya negara-negara berkembang sebagian besar berada dalam *commodity dependent* dan *strongly commodity dependent*.

Daerah *commodity dependent* yang berada dalam *commodity trap* dalam jangka panjang akan mengalami permasalahan struktural perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi, rendahnya indeks pembangunan manusia, dan volatilitas pendapatan masyarakat yang tinggi (UNCTAD 2021). Beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini yaitu (1) bahan komoditas bersifat *price-inelastic of demand* sehingga *supply shock* akan menyebabkan fluktuasi harga komoditas yang sangat tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada fluktuasi pendapatan eksportir dan rendahnya kemampuan berinvestasi, (2) fenomena *Dutch Disease* dimana meningkatnya pendapatan dari sektor

Grafik 81.1 Distribusi Komoditas Ekspor Resources dan Non Resources di Provinsi Lampung



Sumber: BPS, elstat

Grafik 81.3 Rata-rata Tenaga Kerja Sektoral Tahun 2010 - 2024 (Ribu Orang)



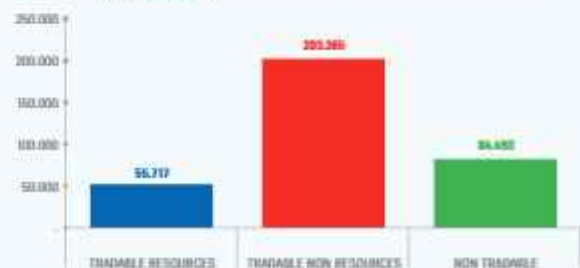
Sumber: BPS, elstat

Grafik 81.2 Perkembangan Struktur Ekonomi Provinsi Lampung



Sumber: BPS, elstat

Grafik 81.4 Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral 2015-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber: BPS, elstat

komoditas (*tradable resources*) akan berdampak pada *spending effect* yaitu menurunnya pendapatan dari sektor industri (*tradable non-resources*) dan *resource movement effect* yaitu beralihnya tenaga kerja produktif dari sektor industri (*tradable non-resources*) ke sektor jasa (*non-tradable*). Menurunnya kontribusi *output* dari sektor industri (*tradable non-resources*) berdampak kurang menguntungkan bagi perekonomian mengingat sektor tersebut memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar dan memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya.

Fenomena Dutch Disease melalui *spending effect* sudah terjadi pada perekonomian Lampung. *Commodity trap* menyebabkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi Provinsi Lampung. Kenaikan pendapatan di sektor *tradable resources* mengakibatkan semakin banyak tenaga kerja beralih dari sektor *tradable resources* ke *non-tradable*. Sektor *tradable resources* mengalami penurunan andil di perekonomian yaitu dari 40% dari total ekonomi di tahun 2010 menjadi sekitar 30% di tahun 2024, sebaliknya sektor *non-tradable* pada periode yang sama mengalami peningkatan andil perekonomian dari sekitar 40% menjadi sekitar 50% dari total ekonomi (grafik 2). Pergeseran struktur ekonomi tersebut berdampak pada rendahnya *output* ekonomi yang berasal sektor *tradable non-resources* dimana pada periode yang sama andil perekonomiannya relatif stabil di sekitar 19% dari total ekonomi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penurunan *output* dari sektor *tradable non-resources* tersebut berdampak kurang menguntungkan bagi perekonomian Lampung mengingat sektor ini merupakan sektor pendorong utama perekonomian.

Fenomena commodity trap yang menyebabkan terjadinya *Dutch Disease* pada *resource movement effect* juga telah berlangsung pada perekonomian Lampung khususnya sejak tahun 2010. Rata-rata pada periode

2010 – 2024, tenaga kerja di Provinsi Lampung sebanyak sekitar 1,8 juta (44% dari total tenaga kerja) bekerja di sektor *tradable resources* yang terdiri sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan (grafik 3). Sementara sektor *non-tradable* (yang terdiri dari perdagangan, konstruksi, transportasi dan aneka jasa) merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Lampung yaitu sekitar 1,9 juta (48%), sisanya hanya sekitar 400 ribu yang bekerja di sektor *tradable non-resources* (industri pengolahan).

Kedua sektor yang menyerap tenaga kerja yang paling banyak di Lampung yaitu sektor *tradable resources* dan *non-tradable* memiliki produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah dibandingkan sektor *tradable non-resources*. Data dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan bahwa sektor *tradable resources* yang merupakan sektor utama penyumbang ekspor di Lampung memiliki produktivitas tenaga kerja yang paling rendah di antara kedua sektor lainnya yaitu sebesar Rp 55 juta per tahun, sebaliknya sektor *tradable non-resources* yang belum berkontribusi terhadap ekspor Lampung justru memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi yang mencapai Rp 200 juta per tahun. *Fenomena commodity trap* menyebabkan *resource movement effect* dimana terjadi pergeseran alokasi tenaga kerja dari *tradable resources* ke *non tradable resources* yang berproduktivitas rendah, bukan ke *tradable non-resources* yang berproduktivitas tinggi.

Perekonomian Lampung dalam jangka panjang akan mengalami tantangan untuk keluar dari *commodity trap* tersebut. Pembangunan yang menekankan sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi akan menjadi kunci bagi suatu daerah dapat keluar dari *commodity trap*. UNCTAD (2025) merekomendasikan dua strategi pembangunan agar suatu daerah keluar dari *commodity trap* yaitu (1) fokus pada peningkatan sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan (2) diversifikasi barang ekspor.

Buku 2 :

Lampung Bergerak! Strategi Investasi Inklusif Lampung di LEIF 2025

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil menarik antusiasme tinggi investor internasional dalam gelaran Lampung *Economic and Investment Forum (LEIF)* 2025. Acara yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025), ini mencatatkan keberhasilan signifikan.

Bank Indonesia Provinsi Lampung selaku Pembina Forum Investasi Lampung (FOILA) turut serta dalam memberikan dukungan penuh, karena momentum ini tentu dapat memperkuat ekosistem investasi berkelanjutan. Forum ini digelar bersama stakeholders lainnya, seperti PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kementerian Perhubungan, PT. Geothermal Energy Tbk, PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7, PT. Cipta Cakra Murdaya, dan PT. Horizon Agro Industry. LEIF menjadi ajang strategis untuk mempromosikan potensi investasi daerah, memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus menegaskan posisi Lampung sebagai magnet investasi baru di tingkat nasional.

Pemprov Lampung mempertegas komitmennya dalam transisi energi nasional dengan menandatangani *Letter of Intent (LoI)* bersama PT Bakrie Power di ajang Lampung *Economic and Investment Forum (LEIF)* 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret kolaborasi antara Pemprov Lampung dan sektor swasta, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyebut penandatanganan LoI ini sebagai sinyal kuat bagi investasi yang ramah lingkungan dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan daerah. "Hal ini sejalan dengan agenda transisi energi menuju ekonomi berkelanjutan nasional," ujar Gubernur.

Pamerkan 11 Proyek Unggulan dan Aset Potensial

Dalam Forum tersebut, Pemprov Lampung juga memamerkan 11 proyek investasi unggulan yang siap digarap. Proyek-proyek strategis tersebut meliputi:

- Pariwisata: Bakauheni Harbour City, Batu Tumpang Tourism, Agripark Kemiling
- Energi Baru Terbarukan: Floating Solar Power Plant Bendungan Marga Tiga dan Bendungan Way Jepara serta proyek Gunung Tiga Geothermal Power Plant oleh Pertamina Geothermal Energy.
- Industri: Kawasan Industri Way Kanan dan Starch Amilum Excipients in Medication Formula Lampung Tengah
- Infrastruktur dan Logistik: Kota Baru Area, Sebalang Port dan Betan Subing Terminal & Double Track Railway.

Selain itu, Pemprov membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.

Puncak keberhasilan LEIF 2025 ditandai dengan penandatanganan 15 *Letter of Intent (LoI)* untuk berbagai proyek strategis daerah. Kehadiran puluhan investor asing dari berbagai negara, seperti Jepang, Belgia, Filipina, Malaysia, hingga Tiongkok, membuktikan adanya peningkatan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi dan stabilitas ekonomi Lampung. Pencapaian ini merupakan langkah nyata Pemprov Lampung dalam mengakselerasi pembangunan dan menarik modal global.



Keunggulan Infrastruktur Jadi Magnet Utama

Gubernur Mirzani Djausal menambahkan, Pemprov Lampung tengah berfokus pada aksi “merajut dan mengkapitalisasi” keunggulan infrastruktur yang ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Lampung daerah yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bimo Epyanto, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, turut mengamini potensi besar ini. Bimo Epyanto menyoroti keunggulan strategis dari sisi lokasi dan konektivitas logistik Lampung yang semakin baik.

Senada, Imam Soejoedi menegaskan bahwa Lampung merupakan pilihan yang tepat bagi investasi di sektor pangan dan EBT. Ia pun menekankan bahwa kolaborasi

lintas sektor—antara pemerintah, swasta, dan UMKM—menjadi kunci untuk menciptakan rantai nilai investasi yang produktif dan sukses di wilayah tersebut.

Sebagaimana ditekankan oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, kebijakan pembangunan kini berfokus pada hilirisasi lima komoditas unggulan guna menjadikan daerah ini pusat produksi bernilai tinggi, didukung oleh PDRB yang kuat dan infrastruktur logistik yang strategis. Kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Investasi/BKPM, semakin menguatkan bahwa Lampung merupakan pilihan yang tepat untuk investasi berkualitas dan berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor dan visi pembangunan yang jelas, LEIF 2025 menjadi langkah awal yang monumental untuk menjadikan Lampung daerah ramah investasi dan motor penggerak ekonomi baru di Sumatra.







02

Keuangan Daerah

- **Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung menunjukkan penurunan pada 2025.** Pagu pendapatan menurun sebesar -4,60% (yoy) dari Rp33,58 triliun pada 2024 menjadi Rp32,03 triliun. Kondisi ini didorong oleh penurunan pagu seluruh komponen pendapatan daerah. Selain itu, pagu belanja turut menurun sebesar -4,29% (yoy) yang juga didorong oleh hampir keseluruhan komponen pembentuk Belanja Daerah kecuali belanja pegawai yang secara pagu mengalami peningkatan sebesar 6,14% (yoy) dibandingkan dengan pagu pada 2024.
- **Realisasi belanja konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung pada triwulan III 2025 mencapai Rp17,98 Triliun dari total pagu Belanja Daerah tahun 2025 yang senilai Rp32,52 triliun.** Realisasi belanja ini sedikit melambat apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang tumbuh lebih tinggi dengan capaian realisasi Rp18,52 triliun.
- **Di sisi APBN Lampung, realisasi pendapatan pada triwulan III 2025 tercatat Rp 7,98 triliun atau 71,68% dari target, meningkat 5,33% (yoy) dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2024.** Peningkatan pendapatan ini didukung baik oleh kinerja pajak maupun non pajak. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp6,71 triliun dengan kontribusi terbesar datang dari pajak perdagangan internasional pada pos bea keluar dengan realisasi Rp 1,51 triliun atau 397,65% dari target Rp381,95 miliar.
- **Di sisi belanja, realisasi APBN belanja negara di Lampung mencapai Rp23,08 triliun hingga akhir triwulan III 2025.** Angka ini telah mencapai 71,58% dari pagu anggaran sebesar Rp32,25 triliun, menurun 5% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024 senilai Rp24,53 triliun dari total target Rp 33,46 triliun (73,32%).

2.1 GAMBARAN UMUM

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung menunjukkan penurunan pada 2025. Pagu pendapatan menurun sebesar -4,60% (yoy) dari Rp33,58 triliun pada 2024 menjadi Rp32,03 triliun. Kondisi ini didorong oleh penurunan pagu seluruh komponen pendapatan daerah. Selain itu, pagu belanja turut menurun sebesar -4,29% (yoy) yang juga didorong oleh hampir keseluruhan komponen pembentuk Belanja Daerah kecuali belanja pegawai yang secara pagu mengalami peningkatan sebesar 6,14% (yoy) dibandingkan dengan pagu pada 2024.

Pada triwulan III 2025, realisasi pendapatan konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung mencapai Rp21,36 triliun atau sebesar 66,69% dari total pagu pendapatan Tahun 2025 yang senilai Rp 32,03 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp18,89 triliun atau 61,67% dari target sebesar Rp 32,26 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada komponen selain itu, percepatan transfer pemerintah ke daerah juga tumbuh 7,33%, sehingga turut mendorong kinerja pendapatan pada triwulan laporan.

Sementara itu, realisasi belanja konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung pada triwulan III 2025 mencapai Rp17,98 Triliun dari total pagu Belanja Daerah tahun 2025 yang senilai Rp32,52 triliun. Realisasi belanja ini sedikit melambat apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang tumbuh lebih tinggi dengan capaian realisasi Rp18,52 triliun. Berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan realisasi pada triwulan laporan didorong oleh komponen Belanja Barang dan Jasa dan Pegawai yang tumbuh masing-masing 6,36% (yoy) dan 1,53% (yoy). Selain itu, realisasi pada

komponen belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja subsidi juga mengalami pertumbuhan masing-masing 5,18% (yoy), 7,59% (yoy) dan 308,27% (yoy).

Di sisi APBN Lampung, realisasi pendapatan pada triwulan III 2025 tercatat Rp 7,98 triliun atau 71,68% dari target, meningkat 5,33% (yoy) dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2024. Peningkatan pendapatan ini didukung baik oleh kinerja pajak maupun non pajak. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp6,71 triliun dengan kontribusi terbesar datang dari pajak perdagangan internasional pada pos bea keluar dengan realisasi Rp 1,51 triliun atau 397,65% dari target Rp381,95 miliar.

Di sisi belanja, realisasi APBN belanja negara di Lampung mencapai Rp23,08 triliun hingga akhir triwulan III 2025. Angka ini telah mencapai 71,58% dari pagu anggaran sebesar Rp32,25 triliun, menurun 5% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024 senilai Rp24,53 triliun dari total target Rp 33,46 triliun (73,32%). Penurunan ini didorong oleh pos belanja pemerintah pusat utamanya belanja barang dan belanja modal yang masing-masing berkontraksi 38,77% (yoy) dan 36,91% (yoy). Kinerja pos transfer ke daerah juga mengalami kontraksi 1,06% (yoy) pada triwulan laporan.

2.2 APBD DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

2.2.1 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung

Secara keseluruhan realisasi pendapatan APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 telah mencapai Rp21,36 triliun atau 66,69% dari target Rp32,03 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan III 2024 yang sebesar 61,67%. Komponen Pendapatan APBD

Tabel 2.1 Pagu dan realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi dan Kab/Kota Provinsi Lampung Periode Triwulan III Tahun 2025

URAIAN	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025			Growth TW III 25' - Tw III 24'	
	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
BELANJA DAN TRANSFER	32.343.505.090.938	18.520.253.584.013,00	57,20%	32.526.885.543.111	17.988.741.052.090,00	55,30%	0,57%	-2,87%
BELANJA OPERASI	26.324.682.379.074	15.968.633.822.303	60,66%	26.894.678.850.995	15.783.291.671.968	58,60%	2,17%	-1,18%
Belanja Pegawai	12.679.888.275.985	7.858.478.371.830	61,98%	13.271.359.870.369	7.979.075.032.280	60,12%	4,66%	1,53%
Belanja Barang dan Jasa	8.216.817.555.380	4.393.727.595.628	53,47%	8.791.352.297.023	4.673.090.572.845	53,11%	6,99%	6,36%
Belanja Bunga	45.485.962.608	24.334.940.332	53,50%	40.762.281.207	17.360.071.512	42,59%	-10,38%	-28,66%
Belanja Subsidi	4.734.056.949	1.244.867.300	26,30%	9.593.485.195	5.082.429.500	52,98%	102,65%	308,27%
Belanja Hibah	1.991.111.981.189	1.270.218.411.078	63,79%	1.226.590.823.564	504.537.399.907	41,13%	-38,40%	-60,28%
Belanja Bantuan Sosial	27.272.196.147	13.343.556.451	48,93%	30.800.099.984	14.034.166.470	45,57%	12,94%	5,18%
Belanja Bantuan Keuangan	3.359.372.350.815	2.407.266.079.675	71,86%	3.524.219.993.653	2.590.111.999.444	73,49%	4,91%	7,59%
BELANJA MODAL	4.041.422.144.909	1.576.914.652.909	39,02%	4.160.672.906.080	1.477.339.896.435	35,51%	2,95%	-8,31%
Belanja Modal	4.041.422.144.909,33	1.576.914.652.909,00	39,02%	4.160.672.906.080	1.477.339.896.435	35,51%	2,95%	-6,31%
BELANJA TIDAK TERUGA	124.158.127.472	29.468.614.421	23,73%	110.838.539.258	44.983.778.958,00	40,59%	-10,73%	52,65%
Belanja Tidak Tertuga	124.158.127.472,00	29.468.614.421,00	23,73%	198.730.269.569	49.227.777.346	24,77%	60,06%	67,05%
TRANSFER	1.853.242.439.484	945.236.494.380	51,00%	1.360.487.246.778	683.125.704.741	50,21%	-26,59%	-27,73%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.853.242.439.483,63	945.236.494.380,00	51,00%	1.360.487.246.778	683.125.704.741	50,21%	-26,59%	-27,73%

Tabel 2.2 Pagu dan realisasi Pendapatan APBD provinsi dan Kab/Kota Provinsi Lampung Periode Triwulan III Tahun 2025

URAIAN	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025			Growth TW III 25' - Tw III 24'	
	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	32.262.847.545.968	19.894.529.319.845	61,67%	32.039.681.026.142	21.367.939.282.264,00	66,69%	-0,69%	7,41%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.125.386.368.263	4.182.937.936.997	51,48%	8.055.353.974.033	4.740.308.415.223,00	58,85%	-0,86%	13,32%
Pendapatan Pajak Daerah	4.734.627.053.344	3.177.184.356.333	67,11%	5.754.275.471.506	3.326.816.468.015	57,82%	21,53%	4,71%
Pendapatan Retribusi Daerah	814.174.243.016	580.160.569.347	71,26%	1.336.097.972.738	825.086.497.344	61,75%	54,10%	42,21%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	898.573.920.581	126.209.654.773	18,07%	102.170.560.387	71.156.731.327	69,66%	-85,37%	-43,62%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.878.011.143.322	299.383.356.544	15,94%	882.859.979.392	517.268.718.537	58,95%	-54,05%	72,78%
PENDAPATAN TRANSFER	23.937.083.893.736	15.676.031.884.158	65,48%	23.820.823.453.588	16.594.229.430.272,00	69,66%	-0,49%	5,86%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	22.265.960.057.009	14.944.578.258.620	66,67%	22.279.907.259.541	15.932.226.323.284	71,51%	0,06%	7,33%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	1.671.123.836.727	831.453.625.538	49,75%	1.540.916.194.047	662.003.106.988	42,96%	-7,79%	-20,38%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	199.577.283.969	35.550.498.690	17,81%	163.503.598.521	33.401.436.769,00	20,43%	-18,08%	-6,05%
Pendapatan Hibah	16.402.659.735	487.019.977	3,03%	60.816.000.000	6.413.840.000	10,56%	270,77%	1190,46%
Dana Darurat								
Pendapatan lainnya	183.174.624.234	35.063.478.713	19,14%	102.687.598.521	26.987.595.769	26,28%	-43,94%	-23,01%

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi 58,85%, Transfer ke daerah dan Dana Daerah (TKDD) terealisasi 69,66%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar 20,43%. (Tabel 2.2).

Dari komponen PAD, sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih menjadi pendorong realisasi pendapatan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung dengan realisasi masing-masing sebesar 57,82% dan 61,75%. Sementara untuk komponen TKDD, transfer pemerintah ke daerah juga tumbuh 7,33% yang turut mendorong kinerja pendapatan provinsi Lampung pada triwulan laporan.

Dari komponen PAD, pendapatan dari sektor pajak dan retribusi mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan capaian realisasi pendapatan masing-masing sebesar Rp 3,45 triliun (67,27%) dan Rp 839,12 miliar (60,24%) pada triwulan III 2025. Pemprov Lampung terus mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perpanjangan waktu pemutihan pajak untuk kendaraan yang diperpanjang hingga 6 Desember 2025.

Selain itu, untuk memaksimalkan pendapatan retribusi daerah, Pemprov melalui Bapenda berinovasi dengan memanfaatkan digitalisasi, yaitu peluncuran aplikasi SAIBARA (Sewa Aset dan Retribusi Barang Daerah) yang telah di-launching pada 24 November 2025. Melalui aplikasi ini, transaksi retribusi dan sewa aset akan dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui QRIS dan Virtual Account yang terhubung langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Lampung, sehingga peredaran dana menjadi lebih transparan dan *real-time*.

Secara spasial di level kabupaten/kota, persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi pada triwulan laporan dicapai oleh Kabupaten Lampung Selatan (76,28% atau Rp. 1,85 triliun dari total pendapatan Rp2,43 triliun). Sementara, realisasi pendapatan terendah berasal dari Kabupaten Lampung Timur dengan realisasi sebesar 59,66% atau Rp 1,39 triliun dari total pendapatan Rp2,34 triliun.

2.2.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD pada triwulan III 2025 meningkat. Realisasi PAD Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 secara keseluruhan sebesar Rp4,74 triliun, atau 58,85%, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,518 triliun atau 51,48%. Secara persentase, realisasi pertumbuhan PAD pada triwulan III 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya adalah tumbuh positif 13,32 (yoy).

Adapun peningkatan realisasi PAD utamanya didorong oleh peningkatan pada sektor pajak dan retribusi daerah yang masing-masing tumbuh sebesar 4,71% (yoy) dan 42,21% (yoy).

Berbagai strategi dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong pendapatan pada tahun 2025, diantaranya memperluas penerapan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini mencakup integrasi data wajib pajak, penggunaan kanal pembayaran non-tunai, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak, selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung juga melakukan perpanjangan waktu pemutihan pajak kendaraan hingga 6 Desember 2025. Upaya ini diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Target dari Pendapatan Transfer PAD Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 masih menjadi **komponen terbesar** dengan pangsa mencapai 74,35% atau sebesar Rp23,82 triliun dari keseluruhan target pendapatan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 yang sebesar Rp32,03 triliun. Pendapatan Transfer ini bersumber dari komponen Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp22,27 triliun (pangsa 93,53%), dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp1,54 triliun (pangsa 6,47%).

Hingga triwulan III 2025, realisasi Pendapatan Transfer mencapai sebesar Rp16,59 triliun atau 69,66% dari target yang sejumlah Rp 23,82 triliun. Realisasi capaian ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 15,67 triliun atau 65,49% dari total target Rp 23,93 triliun.

Secara spasial, dana paling besar yang diterima Lampung berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,13 triliun dengan realisasi Rp1,63 triliun atau 76,35%. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Lampung mendapatkan Rp184,96 miliar dengan realisasi Rp123,72 miliar atau 66,89%. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,07 triliun dengan realisasi Rp 304,34 miliar atau baru terealisasi sebesar 28,36%.

2.2.1.3 Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos pendapatan lainnya yang sah mencakup pendapatan hibah, dan pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercatat meningkat. Pada triwulan III 2025, realisasi pada pos lain-lain pendapatan yang sah tercatat sebesar Rp 33,40 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 35,55 miliar (turun 6,05% yoy). Namun secara kinerja terhadap target, realisasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 20,43%, lebih tinggi dibanding capaian pada periode sama tahun 2024 yang sebesar 17,81%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai realisasi secara nominal menurun, ritme penyerapan anggaran pada tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.2 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung

Pada triwulan III 2025, pagu anggaran belanja APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024. Pagu anggaran belanja APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung tercatat menurun 4,29% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dari Rp 32,34 triliun menjadi Rp 32,61 pada periode laporan.

Pagu belanja daerah terdiri atas komponen belanja pegawai sebesar Rp13,27 triliun atau dengan pangsa 40,69%, belanja barang dan jasa sebesar Rp8,79 triliun, dengan pangsa 26,96%, Belanja modal sebesar Rp4,16 triliun dengan pangsa 12,76%, belanja lainnya sebesar Rp6,39 triliun atau 19,60%.

Realisasi belanja APBD triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp17,99 triliun dari target Rp 32,61 triliun atau 55,17%, lebih rendah dari realisasi belanja periode yang sama tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 18,52 atau 57,26%. Secara nominal, realisasi terbesar pada Belanja Daerah adalah komponen belanja pegawai yang telah mencapai Rp7,97 triliun atau terealisasi 60,12% dari pagu sebesar Rp13,27 triliun. Realisasi lainnya oleh komponen belanja barang dan jasa, tercatat Rp4,67 triliun, disusul dengan belanja modal sebesar Rp1,47 triliun, serta belanja lainnya dengan nominal realisasi sebesar Rp3,86 triliun pada triwulan III 2025 (Tabel 2.2).

Dalam rangka mendukung program Asta Cita Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung terus melanjutkan pelaksanaan tujuh program prioritas yang menjadi tulang punggung APBD 2025. Ketujuh program prioritas tersebut adalah:

- 1) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- 2) Lampung Lumbung Pangan Nasional;
- 3) Lampung Lumbung Energi Terbarukan;
- 4) Optimalisasi BUMDes dan Koperasi untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa.
- 5) Stabilisasi Harga Pangan Lokal untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok, diantaranya melalui upaya operasi pasar murah;
- 6) Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan untuk memastikan setiap anak Lampung mendapatkan pendidikan yang layak, dan
- 7) Peningkatan kondisi jalan Provinsi dan Desa

Selain itu, untuk mendukung upaya digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas transaksi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia secara kontinyu melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan 15 (lima belas) kabupaten/kota untuk mendorong perluasan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

2.3 APBN di Provinsi Lampung Tahun 2025

2.3.1 Anggaran APBN di Provinsi Lampung Tahun 2025

Pagu Pendapatan APBN di Provinsi Lampung pada 2025 mengalami penurunan. Pada 2025, anggaran pendapatan APBN Provinsi Lampung mengalami penurunan dengan nominal Rp11,12 Triliun, menurun -0,81% (yoy) dibandingkan pagu pada periode yang sama tahun 2024 dengan nominal Rp11,21 triliun. Pada triwulan III 2025, realisasi pendapatan senilai Rp 7,98 triliun, tercapai 71,68% dari target Rp 11,13 triliun dan berhasil tumbuh 5,33% (yoy) dari periode yang sama tahun 2024.

Alokasi anggaran Belanja APBN di provinsi Lampung pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp32,25 Triliun atau menurun -3,62% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan tersebut berasal dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yaitu komponen Belanja Barang (-31,97% yoy). Namun, penurunan tertahan oleh peningkatan pada komponen anggaran BPP lainnya yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja sosial yang masing-masing mengalami peningkatan 4,81% (yoy), 1,27% (yoy) dan 3,02% (yoy).

Tabel 2.3 Anggaran Pendapatan APBN Provinsi Lampung Tahun 2025

	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025			Growth TW III 25' - Tw III 24'	
	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN DAN HIBAH	11.211.606.715.594	7.581.202.031.179	67,62%	11.139.941.548.000	7.985.382.400.983	71,68%	-0,64%	5,33%
I. Penerimaan Dalam Negeri	11.211.606.715.594	7.581.202.031.179	67,62%	11.139.941.548.000	7.985.382.400.983	71,68%	-0,64%	5,33%
1. Penerimaan Perpajakan	10.166.053.367.594	6.386.121.358.897	62,82%	10.032.303.406.000	6.705.117.243.286	66,84%	-1,11%	5,00%
a. Pajak Dalam Negeri	8.843.161.912.594	5.750.298.267.897	65,03%	8.196.132.865.000	4.959.143.674.286	53,93%	-3,99%	-13,76%
i. Pajak Penghasilan	3.958.153.993.740	2.750.655.898.522	69,49%	3.569.364.888.000	1.888.200.092.435	52,90%	-9,82%	-31,35%
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4.576.700.271.000	2.770.615.719.840	60,54%	5.552.283.809.000	2.709.764.119.035	48,80%	21,32%	-2,20%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	153.563.576.854	92.796.943.842	60,43%	34.337.719.000	18.272.667.886	53,53%	-77,77%	-80,31%
iv. Cukai	2.246.315.000	9.679.762.000	439,82%	6.050.560.000	14.252.403.000	235,56%	169,35%	44,26%
v. Pajak lainnya	152.497.756.000	126.349.925.693	82,85%	34.296.079.000	328.574.391.930	958,05%	-77,51%	160,05%
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.321.891.455.000	635.823.091.000	48,10%	836.170.551.000	1.745.973.569.000	208,81%	-36,74%	174,60%
i. Bea Masuk	548.862.044.000	387.114.371.000	70,53%	454.211.088.000	227.119.269.000	50,00%	-17,24%	-41,33%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	773.029.411.000	248.708.720.000	32,17%	381.959.463.000	1.518.854.300.000	397,65%	-50,59%	510,70%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.045.553.348.000	1.195.080.672.282	114,19%	1.107.638.143.000	1.280.266.157.697	115,59%	5,84%	7,13%

Sumber: Birelati APBN Provinsi Lampung

2.3.2 Realisasi APBN di Provinsi Lampung

Pada triwulan III 2025, Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp7,98 triliun, tercapai 71,68% dari target. Peningkatan pendapatan negara ini sebagian besar didukung oleh kinerja penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp6,71 triliun, menjadi tulang punggung pertumbuhan tersebut. Kontribusi terbesar datang dari pajak perdagangan internasional.

Pajak perdagangan internasional mencatatkan penerimaan sebesar Rp1,74 triliun, melonjak 174,60%. Lonjakan ini didominasi oleh bea keluar yang mencapai Rp1,51 triliun, menunjukkan aktivitas ekspor yang kuat di Lampung. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya juga berkontribusi positif sebesar Rp1,28 triliun, melampaui pagu Rp1,10 triliun.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara di Lampung mencapai Rp23,08 triliun hingga akhir triwulan III 2025. Angka ini telah mencapai 71,58% dari pagu anggaran sebesar Rp32,25 triliun. Meskipun realisasi cukup tinggi, terdapat pergeseran prioritas belanja dalam pengelolaan APBN Lampung.

Pergeseran ini terlihat dari adanya perlambatan belanja pemerintah pusat, dengan realisasi sebesar Rp5,76 triliun dari pagu Rp9,48 triliun. Perlambatan ini terutama terjadi pada komponen belanja barang dan belanja modal yang terkonsentrasi masing-masing sebesar 38,77% (yoy) dan 36,91% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, transfer ke daerah juga mengalami kontraksi sebesar 1,06% (yoy) dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa komponen seperti belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, insentif fiskal, dan dana desa. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian strategi dalam alokasi anggaran.

Meskipun terjadi kontraksi pada beberapa pos, pengelolaan belanja yang efisien ini tetap mendukung tujuan fiskal. Hal ini juga memastikan sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Kebijakan ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN Provinsi Lampung Tahun 2025

	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025			Growth TW II 25' - Tw II 24'	
	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Realisasi (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
B. BELANJA NEGARA	33.462.860.446.000	24.534.920.424.824	73,32%	32.258.086.712.000	23.084.805.218.005	71,58%	-3,62%	-20,03%
I. Belanja Pemerintah Pusat	11.027.596.464.000	7.029.466.393.441	63,74%	9.485.140.603.000	5.764.229.266.475	60,77%	-13,98%	-38,65%
1. Belanja Pegawai	4.112.102.138.000	3.273.768.454.043	79,61%	4.310.090.167.000	3.440.359.624.879	79,82%	4,81%	5,09%
2. Belanja Barang	5.489.124.133.000	3.117.561.054.312	56,80%	3.738.905.426.000	1.909.029.331.463	51,04%	-31,99%	-38,77%
3. Belanja Modal	1.372.586.693.000	613.378.585.086	44,69%	1.390.039.280.000	387.000.160.133	27,84%	1,27%	-36,91%
4. Belanja Sosial	43.783.500.000	24.738.000.000	56,50%	45.105.750.000	27.840.150.000	61,72%	3,02%	12,54%
II. Transfer ke Daerah	22.435.072.982.000	17.505.454.031.383	78,03%	22.764.946.109.000	17.320.575.951.530	76,08%	1,47%	-1,06%

Sumber: Birelati APBN Provinsi Lampung



Perkembangan Inflasi

- Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,17% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,27% (yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut terpantau lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,65% (yoy). Tekanan Inflasi Provinsi Lampung triwulan III 2025 yang melambat ini disebabkan oleh turunnya tarif sekolah sejalan dengan kebijakan penghapusan uang komite yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2025 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,65% (yoy) dan tingkat inflasi sebesar 5,02% (yoy). Di sisi lain, kelompok Pendidikan dengan andil sebesar -1,23% (yoy) tercatat mengalami deflasi sebesar 18,20% (yoy).
- Perkembangan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak minimnya pasokan karena belum masuknya masa panen di triwulan III 2025. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan tarif sekolah melalui penghapusan uang komite bertujuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi tekanan inflasi ke depan, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung program swasembada pangan pemerintah dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
- Selanjutnya, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk melemahnya permintaan domestik dan global sebagai dampak ketidakpastian global, ketersediaan pupuk, serta mulai masuknya periode masa panen pada triwulan IV 2025.

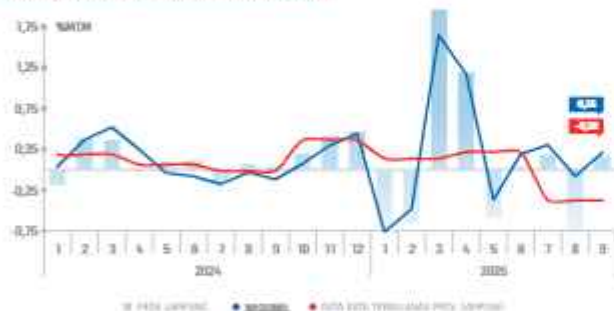
3.1. INFLASI UMUM GABUNGAN DUA KOTA DAN DUA KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

3.1.1. Inflasi Bulanan

Tingkat inflasi Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 sebesar 0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional sebesar 0,21% (mtm). Rata-rata IHK Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 secara bulanan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan II 2025 yang mencatat inflasi sebesar 0,22% (mtm) [Grafik 3.1]. Secara garis besar, melambatnya tekanan inflasi sepanjang triwulan III 2025 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan turunnya tekanan inflasi pada kelompok Pendidikan meskipun tetap diimbangi oleh tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau [Grafik 3.2] seiring dengan penurunan tarif biaya pendidikan karena dihapusnya uang komite serta belum masuknya masa panen pada triwulan III 2025.

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Juli 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Juni 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm) [Grafik 3.1]. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,30% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Juli dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,31% (mtm). Sementara itu, secara tahunan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Juli 2025 mengalami inflasi

Grafik 3.1 Inflasi Lampung dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.2 Sumbangan Inflasi Bulanan Juli, Agustus, dan September 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.1 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Juli 2025

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
BAWANG MERAH	0,13	BAWANG PUTIH	(0,06)
TOMAT	0,07	DAGING AYAM RAS	(0,03)
CABAI RAWIT	0,04	SUSU CAIR KEMASAN	(0,02)
BERAS	0,03	KETIMUN	(0,02)
BIMBINGAN BELAJAR	0,03	MAKANAN RINGAN/SNACK	(0,02)

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.3 Sumbangan Inflasi Bulanan Juli 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

sebesar 2,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,27% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar sebesar 2,37% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Juli 2025 terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau [Grafik 3.3]. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah, tomat, cabai rawit, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,13%; 0,07%; 0,04%; dan 0,03% (mtm) (Tabel 3.1). Kenaikan harga bawang merah sejalan dengan tertahannya produksi bawang merah di sentra produksi Jawa Barat akibat musim gadu dan hama penyakit tanaman pasca hujan. Adapun kenaikan harga cabai rawit dipicu penurunan volume produksi akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dan belum masuknya masa panen di sentra produksi di Provinsi Lampung. Sementara itu, Kenaikan harga beras sejalan dengan masuknya musim tanam gadu menjelang panen kedua di bulan September-Oktober 2025.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan Juli 2025 tertahan oleh penurunan harga bawang putih, daging ayam ras, dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,06%; -0,03%; dan -0,02% (mtm) (Tabel 3.1). Penurunan harga bawang putih didukung oleh kelancaran pasokan pasca realisasi impor dari Tiongkok pada bulan sebelumnya yang turut menjaga stabilitas distribusi di pasar domestik. Adapun penurunan harga daging ayam ras terjadi seiring kenaikan pasokan ayam hidup pada tingkat produsen di tengah permintaan yang relatif stabil. Sejalan dengan itu, penurunan harga susu cair kemasan juga dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang relatif stabil.

Tabel 3.2 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Agustus 2025

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
BAWANG MERAH	0,14	SEKOLAH MENENGAH ATAS	[0,84]
BERAS	0,06	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	[0,39]
PARFUM	0,03	TOMAT	[0,14]
SUSU CAIR KEMASAN	0,02	CABAI RAWIT	[0,07]
MARTABAK	0,02	BAWANG PUTIH	[0,06]

Sumber : BPS Provinsi Lampung, elaborasi

Grafik 3.4 Sumbangan Inflasi Bulanan Agustus 2025



Sumber : BPS Provinsi Lampung, elaborasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Agustus 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 1,47% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Juli 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm) (Grafik 3.1). Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan deflasi nasional sebesar 0,08% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Agustus dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm). Sementara itu, secara tahunan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Agustus 2025 mengalami inflasi sebesar 1,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,63% (yoy), serta dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,31% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada bulan Agustus 2025 terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok pendidikan serta kelompok makanan, minuman dan tembakau (Grafik 3.4). Adapun komoditas utama penyumbang deflasi adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, tomat, cabai rawit, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar -0,84%; -0,39%; -0,14%; -0,07% dan -0,06% (mtm) (Tabel 3.2). Penurunan biaya sekolah menengah dipicu oleh implementasi kebijakan penghapusan pungutan komite sekolah pada SMA, SMK, dan SLB negeri yang digantikan oleh dukungan pendanaan operasional melalui APBD mulai tahun ajaran 2025/2026. Sementara itu, turunnya harga tomat dan cabai rawit sejalan dengan meningkatnya pasokan pada periode panen, sedangkan penurunan harga bawang putih ditopang oleh kelancaran pasokan pasca realisasi impor dari Tiongkok yang menjaga stabilitas distribusi di pasar domestik.

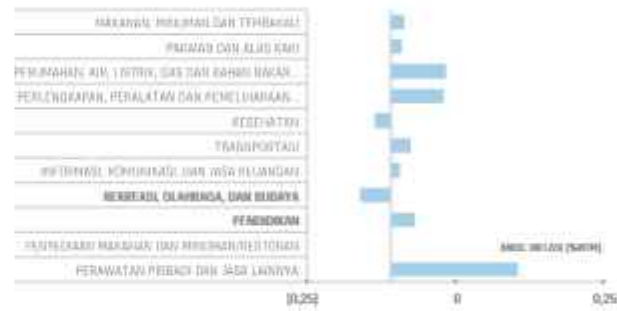
Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam pada bulan Agustus 2025 tertahan oleh kenaikan harga bawang merah dan beras dengan andil sebesar 0,14% dan 0,05% (mtm) (Tabel 3.2). Peningkatan

Tabel 3.3 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi September 2025

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
CABAI MERAH	0,13	BAWANG MERAH	[0,26]
DAGING AYAM RAS	0,12	VITAMIN	[0,03]
EMAS PERHASAN	0,06	TOMAT	[0,03]
SALAK	0,03	MAKANAN HEWAN PELIHARAAN	[0,02]
DEODORANT	0,02	SUSU CAIR KEMASAN	[0,02]

Sumber : BPS Provinsi Lampung, elaborasi

Grafik 3.5 Sumbangan Inflasi Bulanan September 2025



Sumber : BPS Provinsi Lampung, elaborasi

harga kedua komoditas tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume produksi akibat belum masuknya masa panen di sentra produksi di Provinsi Lampung. Selain itu, naiknya harga beras sejalan dengan masuknya musim tanam gadu menjelang panen kedua di bulan September-Oktober.

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan September 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2025 yang mengalami deflasi sebesar 1,47% (mtm) (Grafik 3.1). Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,21% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan September dalam 3 (tiga) tahun

Tabel 3.4 Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (pangsa % mtm)

KELompok INFLASI	JUL-25	AGS-25	SEP-25
Umum			
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,13	[0,22]	0,01
Pakaian dan Alas Kaki	[0,00]	[0,01]	0,01
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,01	[0,00]	0,03
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan	0,01	[0,04]	0,03
Kesehatan	[0,00]	[0,00]	[0,01]
Transportasi	0,02	[0,03]	0,01
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	[0,00]	0,01	0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	[0,00]	[0,02]
Pendidikan	0,03	[1,24]	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,01	0,02	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	[0,02]	0,04	0,08

Sumber : BPS Provinsi Lampung, elaborasi

terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,57% (mtm). Sementara itu, secara tahunan IHK di Provinsi Lampung pada bulan September 2025 mengalami inflasi sebesar 1,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,05% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,65% (yoy).

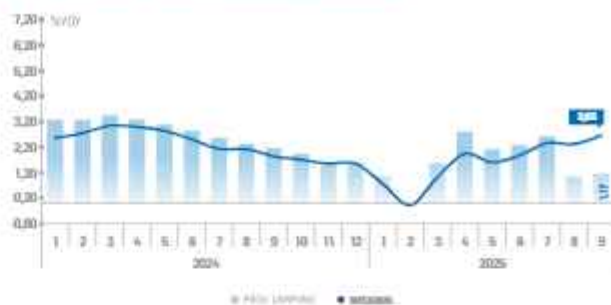
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada September 2025 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (Grafik 3.5). Adapun komoditas utamanya ialah cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,13%; 0,12%; 0,05% (mtm) (Tabel 3.3). Peningkatan harga cabai merah dipengaruhi oleh habisnya masa panen sehingga menurunkan ketersediaan pasokan, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras disebabkan jumlah pasokan DOC (day old chicks) yang cenderung menurun. Sementara itu, peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan September 2025 tertahan oleh penurunan harga bawang merah, vitamin, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar -0,26%; -0,03%; dan -0,03% (mtm) (Tabel 3.3). Penurunan harga bawang merah dan tomat sejalan dengan pola musiman dari produksi dan distribusi komoditas hortikultura pasca berakhirnya periode panen.

3.1.2. Inflasi Tahunan

Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,17% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,27% (yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut terpantau lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,65% (yoy) (Grafik 3.6). Tekanan Inflasi Provinsi

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Juni 2025

Lampung triwulan III 2025 yang melambat ini disebabkan oleh menurunnya tarif pendidikan sejalan dengan penghapusan uang Komite. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas pangan strategis seiring dengan belum masuknya masa panen turut mengimbangi. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2025 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,65% (yoy) dan tingkat inflasi sebesar 5,02% (yoy). Di sisi lain, kelompok Pendidikan dengan andil sebesar -1,23% (yoy) tercatat mengalami deflasi sebesar 18,20% (yoy) (Tabel 3.5).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terpantau mengalami peningkatan tekanan inflasi yaitu sebesar 5,02% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,28% (yoy). Pada triwulan III 2025, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar pertama, yaitu 1,65% (yoy) (Tabel 3.6).

Dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, subkelompok makanan merupakan penyumbang utama inflasi kelompok dengan andil yang tercatat sebesar 1,46% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi pada subkelompok makanan adalah bawang merah, cabai merah, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,65%; 0,26%; dan 0,14% (yoy). Hal ini sejalan dengan mulai mulai terbatasnya pasokan seiring dengan belum masuknya masa panen pada triwulan III 2025. Selanjutnya, subkelompok rokok dan tembakau merupakan penyumbang inflasi kedua dengan andil sebesar 0,31% (yoy). Komoditas utama penyumbang tekanan inflasi pada subkelompok tersebut adalah sigaret kretek mesin (skm), sigaret kretek tangan (skt), dan sigaret putih mesin (spm) dengan andil masing-masing 0,12%; 0,07%; dan 0,03% (yoy). Hal ini seiring dengan meningkatnya harga bahan baku tembakau. Lebih lanjut, subkelompok minuman tidak beralkohol turut menyumbang andil sebesar 0,05% (yoy) didorong oleh komoditas kopi bubuk serta air kemasan dengan andil sebesar 0,03% dan 0,02% (yoy), sejalan dengan harga kopi dunia yang mencapai 2.237,80 BRL/bag yang mengalami kenaikan jika dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.7). Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi pada subkelompok ini tertahan oleh sumbangan deflasi dari komoditas bawang putih, cumi-cumi,

Tabel 3.5 Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)

KELOMPOK INFLASI	II-25	III-25
Umum	2,27	1,17
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,10	1,65
Pakaian dan Alat Kaki	0,01	[0,04]
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0,23	0,21
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	[0,02]	[0,00]
Kesehatan	0,05	0,01
Transportasi	0,06	0,05
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	[0,05]	[0,04]
Rokreasi, Olahraga, dan Budaya	0,13	0,10
Pendidikan	0,36	[1,23]
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,10	0,12
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,32	0,34

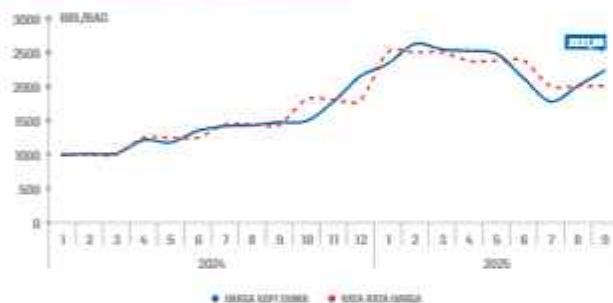
Sumber: BPS Provinsi Lampung, Oktober 2025

Tabel 3.6 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau (% yoy)

KOMODITAS INFLASI	Inflasi [% yoy]		KOMODITAS DEFLASI	Inflasi [% yoy]	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU (1,10%)					
MAKANAN (1,46%)					
BAWANG MERAH	76,68	0,86	BAWANG PUTIH	-13,79	-0,13
CABAI MERAH	76,95	0,26	CUMI-CUMI	-16,65	-0,04
BERAS	3,30	0,14	AYAM HIDUP	-7,39	-0,04
MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL (0,06%)					
Kopi Bubuk	2,64	0,03	MINUMAN RINGAN	-4,66	0,00
AIR KEMASAN	3,11	0,02			
ROKOK DAN TEMBAKAU (0,31%)					
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	4,18	0,12			
SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	5,07	0,07			
SIGARET PUTIH MESIN (SPM)	5,58	0,03			

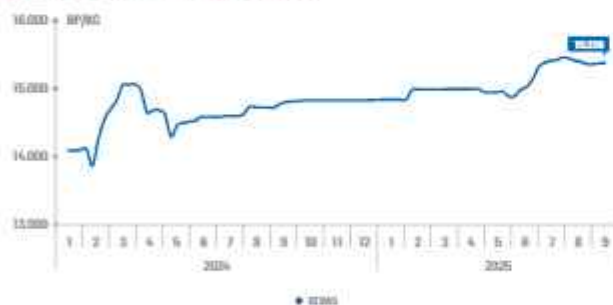
Sumber : SPI Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Harga Kopi Dunia



Sumber : Bloomberg, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Beras

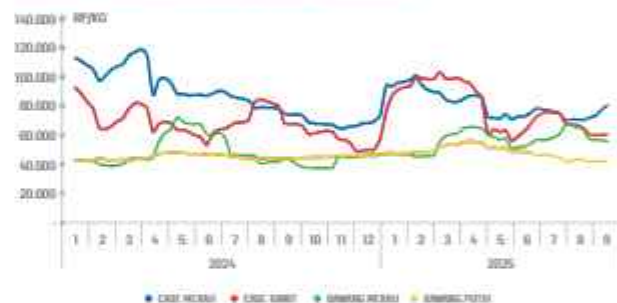


Sumber : Bank Indonesia, diolah

dan ayam hidup dengan andil masing-masing sebesar -0,13%; -0,04%; dan -0,04% (yoy). Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan kelancaran distribusi dan realisasi impor terutama pada komoditas bawang putih.

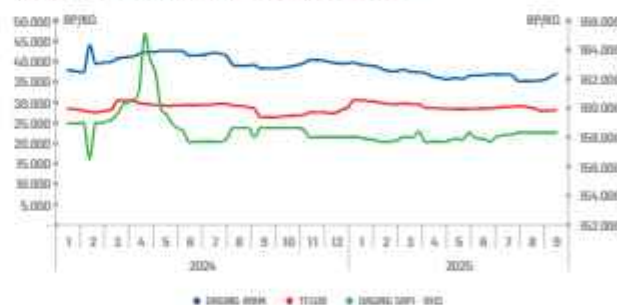
Pada periode laporan, harga beras kembali melanjutkan tren peningkatannya. Saat ini harga beras senilai Rp15.378 pada triwulan III 2025, naik jika dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat senilai Rp15.027 (Grafik 3.8). Penyebab kenaikan harga

Grafik 3.9 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan



Sumber : Bank Indonesia, diolah

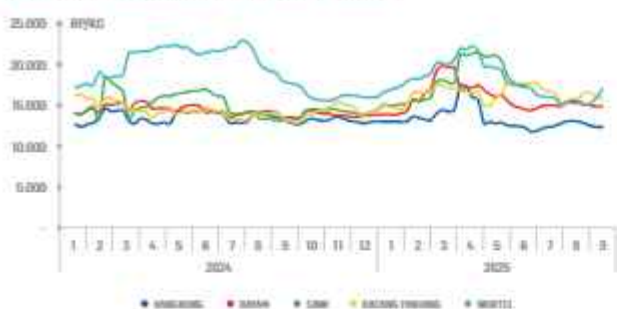
Grafik 3.10 Perkembangan Harga Daging dan Telur



Sumber : Bank Indonesia, diolah

beras sejalan dengan belum masuknya masa panen terutama pada wilayah sentra produksi pangan antara lain Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Mesuji. Hal ini menyebabkan turunnya pasokan beras.

Di sisi lain, tingkat inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terkendali di tengah menurunnya pasokan pangan komoditas strategis pada triwulan III 2025. Mengacu kepada data Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia hingga triwulan III 2025, harga bawang putih tercatat senilai Rp42.144

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Sayur Sayuran


Sumber: BPS Indonesia, diolah

menunjukkan penurunan dari harga Rp46.050 pada triwulan sebelumnya. Di samping itu, harga cabai rawit tercatat senilai Rp60.666 turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu Rp66.603. Lebih lanjut, harga komoditas telur ayam ras berdasarkan SPH triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp28.038 turun terkendali jika dibandingkan Rp28.469 pada triwulan sebelumnya. Penurunan harga cabai rawit dan bawang putih seiring dengan kelancaran distribusi di tengah tingginya permintaan selama triwulan III 2025.

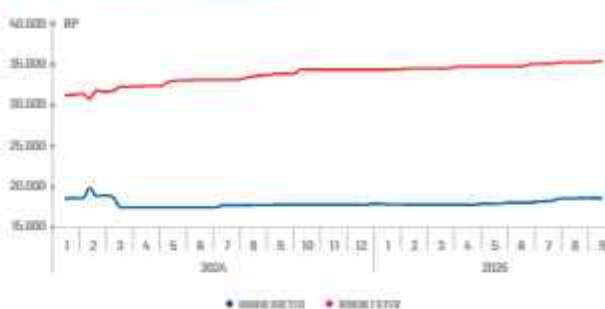
Kelompok Pendidikan

Pada triwulan III 2025, kelompok pendidikan tercatat mengalami deflasi sebesar 18,20% (yoy) dengan andil sebesar -1,23% (yoy), turun signifikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 5,59% (yoy) dengan andil sebesar 0,36% (yoy) (Tabel 3.7). Deflasi pada kelompok pendidikan terutama didorong oleh deflasi pada subkelompok pendidikan menengah dengan andil sebesar -1,25% (yoy) serta subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini dengan andil -0,02%. Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi yang terjadi pada subkelompok pendidikan tinggi dengan andil sebesar 0,01% (yoy). Turunnya tarif pendidikan tercatat disumbang oleh sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama dengan penurunan masing-masing sebesar -54,63% (yoy) dan -45,14% (yoy) (Tabel 3.7). Penerapan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghapuskan uang komite pada sekolah dasar hingga sekolah menengah atas pada tahun ajaran baru 2025/2026 menjadi penyebab utama deflasi yang terjadi pada kelompok Pendidikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 3.7 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

KOMODITAS INFLASI	Inflasi (% yoy)		KOMODITAS DEFLASI	Inflasi (% yoy)	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
PENDIDIKAN [-1,23%]					
PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI [-0,02%]					
			SEKOLAH DASAR	-2,79	-0,02
PENDIDIKAN MENENGAH [-1,25%]					
			SEKOLAH MENENGAH ATAS	-54,63	-0,86
			SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	-45,14	-0,40
PENDIDIKAN TINGGI [0,01%]					
PENDIDIKAN TINGGI	0,59	0,01			

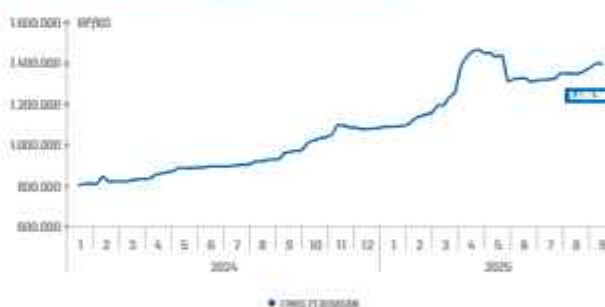
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Rokok


Sumber: BPS Indonesia, diolah

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,51% dengan andil sebesar 0,34%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 5,10% (yoy) dengan andil sebesar 0,32% (Tabel 3.8). Komoditas utama pendorong tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari peningkatan harga pada emas perhiasan dan tarif gunting rambut pria dengan andil sebesar 0,35% (yoy) dan 0,02% (yoy), serta sabung wajah dan deodorant dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Sumbangan deflasi yang diberikan oleh popok bayi sekali pakai/diapers dengan andil -0,03% (yoy) serta parfum, bedak, dan tissue dengan andil masing-masing sebesar -0,01% (yoy), menahan laju inflasi kelompok yang lebih tinggi. Lebih lanjut,

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Emas Perhiasan


Sumber: BPS Indonesia, diolah

Tabel 3.8 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

KOMODITAS INFLASI	Inflasi [% yoy]		KOMODITAS DEFLASI	Inflasi [% yoy]	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA (0,34%)					
PERAWATAN PRIBADI (0,02%)					
TARIF GUNTING RAMBUT PRIA	9,35	0,02	PARFUM	-2,06	-0,01
SABUN WUJAH	6,91	0,01	BEDAK	-2,65	-0,01
DEODORANT	7,54	0,01	TISSU	-3,18	-0,01
PERAWATAN PRIBADI LAINNYA (0,32%)					
EMAS PERHIASAN	42,63	0,35	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-5,32	-0,03

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.9 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)

KOMODITAS INFLASI	Inflasi [% yoy]		KOMODITAS DEFLASI	Inflasi [% yoy]	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN (0,12%)					
JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN (0,12%)					
ES	5,44	0,03			
NASI DENGAN LAUK	1,30	0,03			
MARTABAK	6,79	0,02			

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.10 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

KOMODITAS INFLASI	Inflasi [% yoy]		KOMODITAS DEFLASI	Inflasi [% yoy]	
	Perubahan	Andil		Perubahan	Andil
TRANSPORTASI (0,05%)					
PEMBELIAN KENDARAAN (0,06%)					
MOBIL	4,88	0,05			
SEPEDA MOTOR	1,87	0,02			
PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI (0,02%)					
TARIF JALAN TOL	12,91	0,01	BENSIN	-0,95	-0,04
CUCI KENDARAAN	6,94	0,01	PENGHARUM MOBIL	-15,92	0,00
PELUMAS/OLI MESIN	3,83	0,01	SOLAR	-0,06	0,00
JASA ANGKUTAN PENUMPANG (-0,02%)					
TARIF KENDARAAN TRAVEL	2,24	0,00	ANGKUTAN UDARA	-15,60	-0,02
TARIF KENDARAAN RODA 4 ONLINE	2,54	0,00			

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

harga emas perhiasan terus melanjutkan kenaikannya sepanjang periode triwulan III 2025. Hal ini dibuktikan dengan harga emas perhiasan pada triwulan III 2025 terpantau senilai Rp1.893.500, naik secara signifikan jika dibandingkan Rp1.373.703 pada triwulan sebelumnya [Grafik 3.12].

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 1,45% (yoy) dengan andil sebesar 0,12% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1,29% (yoy), dengan andil sebesar 0,10% (yoy) [Tabel 3.9]. Tekanan inflasi yang terjadi pada subkelompok jasa penyediaan makanan dan minuman terutama berasal dari

peningkatan harga pada komoditas es, nasi dengan lauk, dan martabak dengan andil masing masing komoditas sebesar 0,03%; 0,03%; dan 0,02% (yoy) [Tabel 3.9]. Terjadanya tekanan inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran disebabkan oleh stabilnya permintaan masyarakat yang disandingi dengan pasokan (nasi, ikan, sayuran) yang memadai di tengah kenaikan harga bahan baku pangan.

Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi pada periode triwulan III 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,51% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% (yoy), turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,57% (yoy) dengan andil sebesar

Grafik 3.14 Perkembangan Harga Tiket Angkutan Udara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Harga Bensin



Sumber: Bank Indonesia

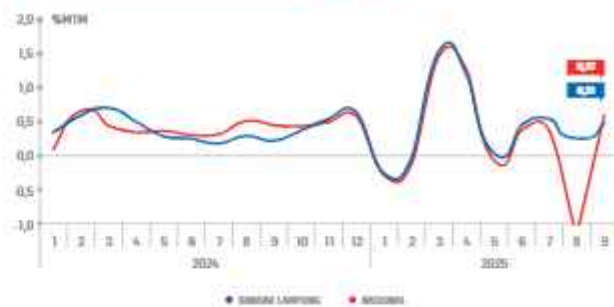
0,06% (yoy) (Tabel 3.10). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh subkelompok pembelian kendaraan dengan andil sebesar 0,06% (yoy) yang disertai kenaikan harga komoditas mobil dan sepeda motor dengan andil masing-masing sebesar 0,05% dan 0,02% (yoy). Subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi turut mendorong laju inflasi pada kelompok ini, dengan andil sebesar 0,02% (yoy) terutama pada komoditas tarif jalan tol, cuci kendaraan, dan pelumas/oli mesin dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Di sisi lain, tarif angkutan udara pada subkelompok jasa angkutan penumpang menyumbang deflasi dengan andil -0,02% (yoy) sejalan dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (DTP) selama periode hari libur sekolah pada periode triwulan III 2025 (Grafik 3.12). Lebih lanjut, bensin dengan andil -0,04% (yoy) menahan tingkat inflasi kelompok yang lebih tinggi. Penurunan harga bensin seiring dengan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) (Grafik 3.13).

3.2. INFLASI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

3.2.1. Inflasi Kota Bandar Lampung

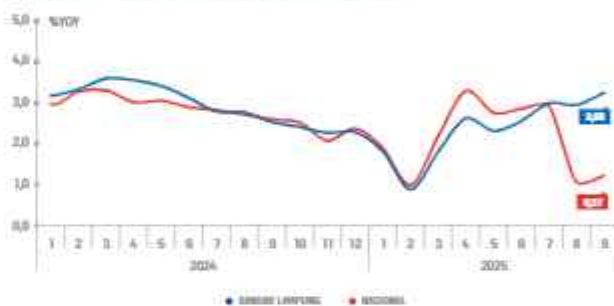
Pada bulan Juli 2025, IHK Kota Bandar Lampung tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) (Grafik 3.14). Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 2,30% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan

Grafik 3.16 Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung



Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, diolah

Grafik 3.17 Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung



Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, diolah

dengan bulan sebelumnya, yakni 2,10% (yoy) (Grafik 3.15). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi bulan Juli 2025 di Kota Bandar Lampung adalah tomat, bawang merah, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,06%; 0,06%; dan 0,05% (mtm).

Selanjutnya, Kota Bandar Lampung di bulan Agustus 2025 mengalami deflasi sebesar 1,81% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,08% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2025 tercatat sebesar 0,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,10% (yoy). Deflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2025 terutama disumbang oleh penurunan tarif sekolah menengah atas serta sekolah menengah pertama dengan andil sebesar -1,11% dan -0,36% (mtm) serta turunnya harga komoditas antara lain tomat dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar -0,14% dan -0,09% (mtm).

Pada bulan September 2025, Kota Bandar Lampung terpantau mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 1,81% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada bulan September 2025 tercatat sebesar 0,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 0,19% (yoy). Inflasi Kota Bandar Lampung pada bulan September 2025 terutama disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,18%; 0,10%; dan 0,08% (mtm).

3.2.2. Inflasi Kota Metro

Setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro pada bulan Juli 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,32% (mtm), meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, Kota Metro pada bulan Juli 2025 mencatatkan inflasi sebesar 2,26% (yoy), naik jika dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 1,81% (yoy). Dilihat dari sumbernya, cabai rawit, bawang merah, dan beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pada Juli 2025 dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,09%; dan 0,08% (mtm).

Pada bulan Agustus 2025, Kota Metro mengalami deflasi sebesar 0,66% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan inflasi sebesar 0,32% (mtm) pada periode sebelumnya. Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada Agustus 2025 tercatat sebesar 1,60% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,26% (yoy). Deflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2025 terutama didorong oleh penurunan tarif sekolah menengah atas dengan andil sebesar -0,47% (mtm) serta turunnya harga beberapa komoditas antara lain cabai rawit, tomat, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar -0,14%; -0,05%; dan -0,04% (mtm).

Metro kembali mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm) pada bulan September 2025, setelah sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,66% (mtm) pada periode sebelumnya. Inflasi di Kota Metro pada September 2025 secara tahunan tercatat sebesar 1,99% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi sebesar 1,60% (yoy)

pada bulan sebelumnya. Adapun tekanan inflasi pada periode ini didorong oleh peningkatan harga dari beberapa komoditas seperti cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,41%; 0,18%; dan 0,16% (mtm).

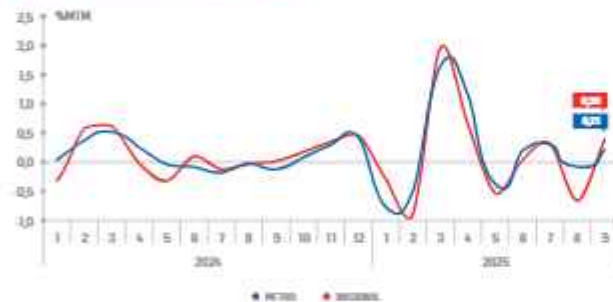
3.2.3. Inflasi Kabupaten Mesuji

Sejak tahun 2024, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur menjadi dua Kabupaten tambahan wilayah penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji menyumbang sekitar 6% terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kabupaten Mesuji pada bulan Juli 2025 mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi sebesar 2,72% (mtm) pada bulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, Kabupaten Mesuji tercatat mengalami inflasi pada Juli 2025 sebesar 2,94% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,52% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi adalah tomat, cabai merah, dan kacang panjang dengan andil masing-masing sebesar 0,05% (mtm).

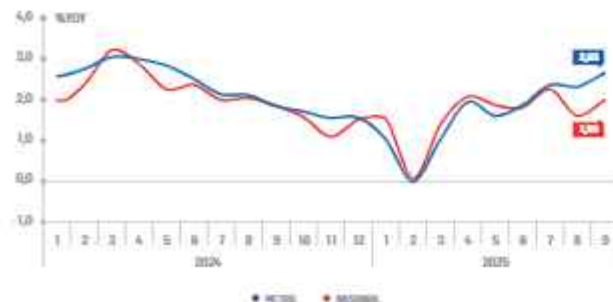
Pada bulan Agustus 2025, Kabupaten Mesuji mengalami deflasi sebesar 0,40% (mtm) dari bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm). Inflasi di Kabupaten Mesuji pada bulan Agustus 2025 secara tahunan tercatat sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan

Grafik 3.18 Inflasi Bulanan Kota Metro



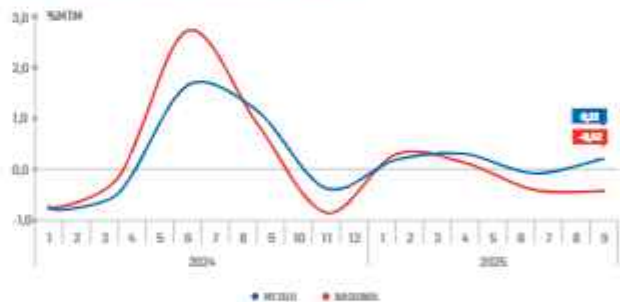
Sumber: BPS Kota Metro, (dibuat)

Grafik 3.19 Inflasi Tahunan Kota Metro



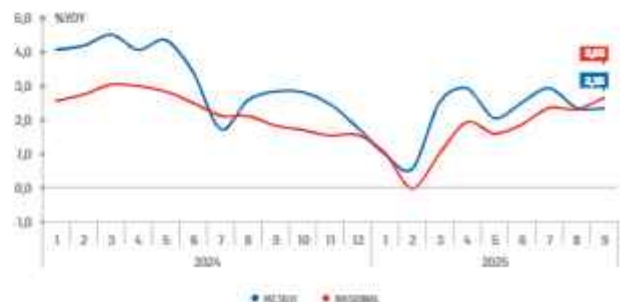
Sumber: BPS Kota Metro, (dibuat)

Grafik 3.20 Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji



BPS Kota Mesuji, (dibuat)

Grafik 3.21 Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji



BPS Kota Mesuji, (dibuat)

sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 2,94% (yoy). Turunnya tarif sekolah menengah atas berperan sebagai pendorong utama deflasi pada bulan Agustus 2025 dengan andil sebesar -0,46% (mtm). Lebih lanjut, penurunan harga beberapa komoditas seperti tomat, telur ayam ras, dan terong juga turut menyumbang deflasi dengan andil masing-masing sebesar -0,16%; -0,05%; dan -0,03% (mtm).

Selanjutnya, Kabupaten Mesuji kembali mengalami deflasi pada bulan September 2025 sebesar 0,42% (mtm), melanjutkan deflasi pada periode sebelumnya yang tercatat sebesar 0,40% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Mesuji pada September 2025 tercatat sebesar 2,35% (yoy), stabil jika dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 2,35% (yoy). Adapun deflasi pada periode ini didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, dan terong yang menyumbang andil masing-masing sebesar -0,39%; -0,08%; dan -0,05% (mtm).

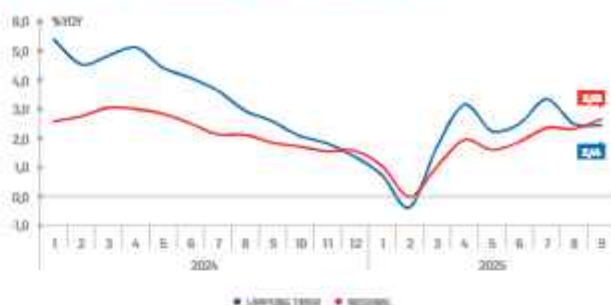
3.2.4. Inflasi Kabupaten Lampung Timur

Seperti Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah baru penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur menyumbang sekitar 28% terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Timur pada bulan Juli 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,38% (mtm), meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm). Inflasi tahunan di Kabupaten Lampung Timur pada Juli 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih tinggi dari 2,48% (yoy) yang tercatat pada periode sebelumnya. Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah, tomat, dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,31%; 0,10%; dan 0,07% (mtm).

Pada bulan Agustus 2025, Kabupaten Lampung Timur mengalami deflasi sebesar 1,18% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi sebesar 0,38% (mtm) pada bulan sebelumnya. Tingkat inflasi tahunan di Kabupaten Lampung Timur pada Agustus 2025 tercatat inflasi sebesar 2,48% (yoy),

Grafik 3.23 Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kab. Lampung Timur, diolah

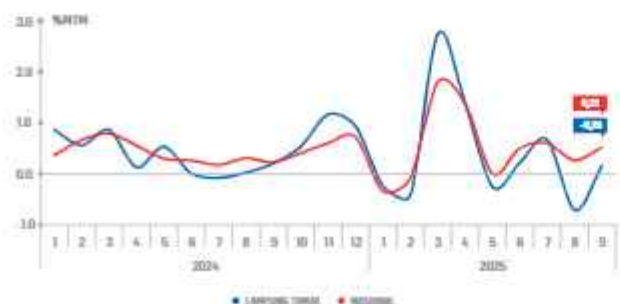
lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi sebesar 3,35% (yoy) pada bulan sebelumnya. Deflasi yang terjadi pada bulan Agustus 2025 terutama didorong oleh penurunan tarif sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah dasar dengan andil masing-masing sebesar -0,61%; -0,42%; dan 0,17% (mtm) serta penurunan harga beberapa komoditas seperti bawang putih, tomat, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar -0,17%; -0,14%; dan -0,06% (mtm).

Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami deflasi secara bulanan pada bulan September 2025 sebesar 0,19% (mtm), meningkat jika dibandingkan dengan deflasi pada periode sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 1,18% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada September 2025 tercatat sebesar 2,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi sebesar 2,48% (yoy) pada periode sebelumnya. Deflasi terutama didorong oleh penurunan harga beberapa komoditas antara lain bawang merah, tomat, dan telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar -0,58%; -0,05%; dan -0,03% (mtm).

3.3. INFLASI SUMATERA

Dari 41 Kabupaten/Kota di Sumatera (SBH 2022), terdapat sebanyak 15 kabupaten/kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional. Secara keseluruhan, tingkat inflasi 2 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung tercatat berada pada posisi ke-32 hingga ke-41 di wilayah Sumatera, lebih rendah jika dibandingkan posisi pada triwulan sebelumnya. Tidak ada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tingkat inflasinya tercatat lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional. Tingkat inflasi Kabupaten Lampung Timur yang sebesar 2,44% (yoy), Kabupaten Mesuji sebesar 2,35% (yoy), Kota Metro yang sebesar 1,99% (yoy), serta Kota Bandar Lampung sebesar 0,37% (yoy) tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,65% (yoy). Keempatnya masing-masing menduduki peringkat 32, 33, 37, dan 41 di wilayah Sumatera. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat inflasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung cukup terkendali dalam kisaran target capaian jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera.

Grafik 3.22 Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kab. Lampung Timur, diolah

c. Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Menghadapi risiko inflasi pada triwulan IV 2025, beberapa langkah dilakukan oleh TPID Provinsi Lampung dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam rentang target $2,5\% \pm 1\%$, antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara berkelanjutan berkoordinasi dengan BULOG hingga harga kembali sampai dengan HET.
- Memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi kepada petani sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
- Melakukan monitoring harga dan pasokan, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (<http://www.bi.go.id/hargapangan>), khususnya pada komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya yaitu daging dan telur ayam ras, serta aneka cabai, serta komoditas lainnya yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga.

2. Ketersediaan Pasokan

- Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK, yaitu Toko MAPAN di Kota Metro, toko TAPIS di Kota Bandar Lampung, dan toko TOPIK di Kabupaten Lampung Selatan, serta SIGER Mart di Kota Bandar Lampung.
- Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas-komoditas defisit dan berisiko defisit dengan daerah sentra produksi.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat realisasi program swasembada pangan di Provinsi Lampung terutama penanaman padi menggunakan varietas unggul, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit unggul dan resisten terhadap perubahan cuaca, serta optimalisasi bantuan traktor/alsintan.
- Berkoordinasi dengan Pemda dan DKPTPH terkait data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan pasokan melalui penyusunan neraca pangan.

3. Kelancaran Distribusi

- Memastikan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
- Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan Lampung menuju Jakarta, Batam, Medan, dan Bali.
- Penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
- Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan

Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalur distribusi Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.

- Pemberian dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk pengiriman pasokan ke beberapa toko pengendalian inflasi bekerjasama dengan BULOG.

4. Komunikasi efektif

- Melakukan rapat koordinasi secara formal, rutin dilaksanakan setiap minggu, dan secara informal dalam rangka menjaga *awareness* TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
- Pelaksanaan *High Level Meeting (HLM)* yang dipimpin oleh kepala daerah untuk meningkatkan *awareness* terkait inflasi di seluruh daerah IHK maupun non-IHK.
- Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam melakukan ajakan perilaku berbelanja bijak.
- Pemanfaatan media digital luar ruang berupa videotron untuk penyampaian informasi terkini inflasi di wilayah Kota Bandar Lampung.
- Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.

d. Quick Wins Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Diperlukan upaya untuk menahan laju inflasi saat ini dan ke depan, berbagai langkah melalui pengambilan kebijakan yang bersifat *quick win* dan perbaikan faktor struktural, diantaranya:

- Pelaksanaan operasi pasar/Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan fokus komoditas beras, aneka cabai, daging & telur ayam ras, serta komoditas lainnya.
- Sinergi pengendalian dan stabilisasi harga pangan dan hortikultura secara *end to end*.
- Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra Provinsi, dengan fokus komoditas beras, serta KAD dengan (i) Brebes untuk komoditas Bawang Merah; (ii) Riau untuk komoditas telur ayam ras, beras, dan jagung; (iii) Kulon Progo untuk komoditas cabai merah.
- Pelaksanaan pemeriksaan kesiapan angkutan, pelabuhan, bandara, jalan tol, sarana prasarana pendukung, dan personil, penambahan *extra flight*, persiapan layanan *e-ticketing* serta pos pengamanan dan layanan, perencanaan rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran distribusi.
- Penguatan upaya Perluasan Area Tani (PAT) untuk komoditas pangan pada periode masa tanam gadu September-Oktober.
- Mempercepat realisasi pupuk bersubsidi bagi petani padi dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Boks 3 :

Sinergi Stabilitas Pasokan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang Optimal

Bank Indonesia terus mendorong berbagai upaya untuk mengoptimalkan dan menjaga stabilitas pasokan komoditas pangan strategis, salah satunya melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang mempertemukan daerah surplus dan daerah defisit untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan. Pada triwulan laporan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memfasilitasi terjalannya KAD antara Pemerintah Kota Metro dan Kabupaten Kulon Progo untuk komoditas cabai merah.

Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung pelaksanaan penandatanganan kerja sama *business to business* (B2B) antara pelaku usaha dari Provinsi Riau dan Provinsi Lampung untuk komoditas telur ayam ras dan jagung. Berikut penjelasan masing-masing kegiatan.

A. KAD Kota Metro dan Kabupaten Kulon Progo

Kegiatan yang berlangsung pada 17–18 November 2025 di D.I. Yogyakarta ini diikuti oleh perwakilan Pemkot Metro, Pemkab Kulon Progo, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Agenda mencakup paparan teknis, kunjungan ke sentra produksi cabai, pasar lelang, hingga sharing program unggulan TPID Sleman. Seluruh rangkaian memberikan pemahaman konkret mengenai pengelolaan budidaya, mekanisme distribusi, standar kualitas, dan pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok. Dengan demikian, agenda ini memperkaya perspektif daerah dalam mengembangkan strategi pengendalian inflasi yang adaptif.

Dalam sesi utamanya, kedua daerah secara resmi menandatangani KAD yang mencakup kerja sam *Government to Government* dan *Business to Business*, termasuk kesepakatan antara Koperasi Cabai Paku Sejahtera Kulon Progo dan *offtaker* Kota Metro. Kesepakatan tersebut meliputi pola pasokan, pertukaran data harga, dan penerapan standar kualitas produk sebagai fondasi stabilitas harga. Indikasi ini menunjukkan bahwa penguatan rantai pasok membutuhkan kepastian hubungan dagang yang terstruktur dan saling menguntungkan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa sinergi Metro–Kulon Progo menjadi bentuk nyata implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kolaborasi antardaerah dianggap penting untuk menekan volatilitas harga cabai yang memiliki kontribusi signifikan terhadap inflasi Kota Metro. Oleh karena itu, kerja sama ini berperan sebagai katalis bagi penguatan strategi jangka panjang pada aspek budidaya, distribusi, dan edukasi pasar.

Lebih lanjut, studi banding yang dilakukan mencakup praktik baik seperti kios inflasi Segoro Amarto, sistem hilirisasi produk cabai, hingga pemanfaatan data sebagai *early warning system*. Metro juga memperoleh pembelajaran mengenai digitalisasi pasar lelang dan manajemen operasi pasar kolaboratif sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan lokal. Untuk itu, rangkaian kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis pemerintah daerah, tetapi juga memperluas kerangka kerja kolaboratif dalam pengendalian inflasi.

Gambar 1: Penandatanganan KAD Kota Metro dan Kabupaten Kulon Progo



Dengan terlaksananya kerja sama dan pertukaran pengetahuan ini, Pemerintah Kota Metro berharap rantai pasok cabai dapat terjaga lebih stabil, sehingga mendukung pengendalian inflasi, meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Gambaran ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat resiliensi ekonomi daerah.

B. KAD B2B Pelaku Usaha Provinsi Riau dan Provinsi Lampung

Dalam upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi antar daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung bersama TPID Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Kegiatan ini meliputi kunjungan lapangan ke sentra produksi pangan strategis seperti telur ayam

ras dan jagung, forum sharing program TPID, serta penandatanganan kerja sama *Business to Business* (B2B) antara pelaku usaha dari kedua provinsi.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 7-8 Oktober 2025 ini diharapkan menjadi langkah kolaboratif untuk memperkuat rantai pasok pangan antarwilayah, menekan laju inflasi, serta mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2025.

Pada penandatanganan KAD B2B ini dilakukan oleh PT. Riau Pangan Bertuah yang bekerjasama dengan DPD PERPADI Lampung untuk komoditi Beras, Koperasi PPN Lampung sejahtera untuk komoditi Telur Ayam dan CV Rehan Putra Dua untuk Komoditi Jagung. Kegiatan yang turut di hadiri oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau, Disperindagkop dan UKM Riau, Dinas Pangan tanaman Pangan dan Hortikultura Riau ini, juga

Gambar 2: Penandatanganan KAD B2B Pelaku Usaha Provinsi Riau dan Provinsi



Gambar 3: Kunjungan Lapangan





melakukan peninjauan lapangan ke mesin penggilingan padi milik Perpadi Lampung dengan Kapasitas 2000 ton per hari, serta kunjungan ke kandang ayam petelur serta gudang jagung pipil. Dengan adanya MoU ini, diharapkan kerja sama *business to business* (B2B) antar pelaku usaha dapat segera terwujud untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, dan telur ayam ras - menjadikan Lampung sebagai mitra penting dalam penyediaan pangan berkualitas bagi Riau.

Stabilisasi pasokan pangan strategis merupakan salah satu kunci keberhasilan pengendalian inflasi daerah, mengingat tingginya kontribusi pangan bergejolak (*volatile food*) terhadap inflasi Provinsi Lampung. Implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) diyakini dan diharapkan menjadi instrumen kolaboratif yang mempertemukan daerah surplus dan daerah defisit melalui mekanisme distribusi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan penguatan KAD tersebut, Provinsi Lampung diharapkan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan, menurunkan risiko gejolak harga, serta meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di masa mendatang.



Stabilitas Keuangan Daerah

- **Kinerja kredit rumah tangga pada triwulan III 2025 tetap kuat.** Pada triwulan III 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp28,56 triliun atau tumbuh 10,48% (yoy). Kualitas kredit Rumah Tangga juga tetap terjaga baik di tengah pertumbuhan kredit yang tercermin dari besaran Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang berada di bawah ambang batas 5%. Kinerja kredit yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan III 2025 yang mencapai Rp 47,25 triliun atau 74,25% dari total DPK.
- **Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan III 2025 terdeselerasi,** tumbuh 1,30% (yoy) dari 8,73% (yoy) pada triwulan II 2025. Kinerja penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari penyaluran kredit pada LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (1,61%;yoy), LU Industri Pengolahan (-0,13%;yoy), LU Konstruksi (2,61%;yoy), LU Perdagangan Besar dan Eceran (-5,16%;yoy), serta LU Transportasi dan Pergudangan (15,73%;yoy).
- **Kredit UMKM pada triwulan III 2025 tumbuh positif meski melambat.** Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,55 Triliun atau tumbuh 0,72% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh lebih tinggi sebesar 1,95% (yoy).
- Secara umum, di tengah pertumbuhan kredit perbankan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025, **kualitas kredit yang tercermin pada Non-Performing Loan (NPL) relatif rendah dan stabil sebesar 2,38%**, masih di bawah ambang batas risiko kredit ($\leq 5\%$).

4.1 PEMBIAYAAN DAERAH

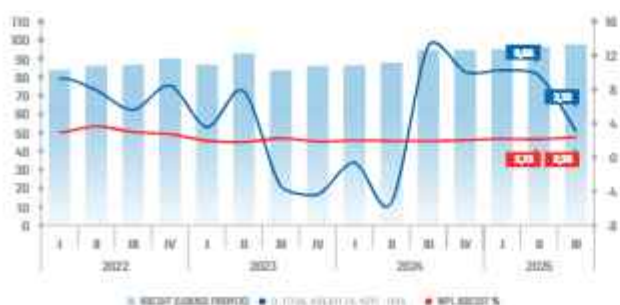
Penyaluran kredit di Provinsi Lampung berdasarkan lokasi proyek tetap tumbuh dengan risiko yang terjaga. Pada triwulan III 2025, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 3,12% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,66% (yoy). Kinerja pertumbuhan kredit triwulan III 2025 juga mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13,30% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut tetap diiringi dengan kualitas risiko yang terkendali, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,38%, masih berada di bawah ambang batas risiko kredit ($\leq 5\%$) dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,13% (Grafik 4.1).

Kredit yang tumbuh tinggi pada periode laporan, utamanya didorong oleh jenis kredit konsumsi yang tumbuh tinggi sebesar 10,48% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,02% dan triwulan yang sama pada tahun 2024 sebesar 12,69% (yoy). Selain itu, kredit modal kerja juga mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 2,81% (yoy), melambat cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,27% (yoy) dan triwulan yang sama tahun 2024 sebesar 15,43% (yoy).

Kinerja penyaluran kredit yang tumbuh positif pada triwulan III 2025, sedikit tertahan oleh pertumbuhan pada kredit investasi yang mengalami kontraksi pada periode ini sebesar -3,32 % (yoy). Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan kinerja kredit investasi pada triwulan II 2025 yang terkontraksi lebih dalam sebesar -5,86%, sedangkan kinerja kredit investasi pada triwulan berjalan menurun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,26% (yoy) (Grafik 4.2).

Sementara itu, berdasarkan jenis usahanya, penyaluran kredit konvensional dan pembiayaan syariah masing-masing tumbuh sebesar 2,64% (yoy) dan 15,44% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik 4.3). Pertumbuhan kredit konvensional ini sedikit melambat dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 2,88% (yoy), namun tetap lebih baik dibandingkan kondisi triwulan III 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,03% (yoy). Demikian pula untuk pembiayaan syariah yang mengalami perlambatan dibandingkan triwulan II 2025 (16,94%;yoy) maupun triwulan III 2024 (18,80%;yoy), namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi.

Grafik 4.1 Perkembangan Kredit dan NPL Prov. Lampung



Sumber: LBB Bank Indonesia, 2025

Grafik 4.2 Kredit Prov. Lampung berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBB Bank Indonesia, 2025

Secara spasial, kredit Rumah Tangga Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan positif didukung dengan beberapa pelonggaran kebijakan makroprudensial yang berlanjut, seperti insentif berupa kelonggaran uang muka (*down payment*) nol persen, insentif pada penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR), dan insentif kredit kendaraan bermotor (KKB).

Dari sisi sektoral, penyaluran kredit pada lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran tercatat mengalami kontraksi masing masing sebesar 0,13% (yoy) dan 5,16% (yoy). Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar dan menjadi motor utama pendorong pertumbuhan kinerja kredit korporasi di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 dengan pangsa sebesar 39,13% dan 25,37%.

Kinerja perbankan dalam penyaluran kredit pada sektor UMKM pada periode laporan juga masih tercatat positif pada triwulan III 2025, walaupun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sinergi pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait untuk mengembangkan UMKM menjadi salah satu *push factor* yang mendorong terjadinya peningkatan kredit pada sektor ini. Pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan laporan utamanya didorong oleh UMKM sektor kecil.

Secara umum, kinerja intermediasi perbankan Provinsi Lampung pada periode triwulan III 2025 dalam kondisi yang terjaga dengan perolehan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang tercatat sebesar 116,62. Meskipun demikian, kondisi LDR perbankan ini telah

Grafik 4.3 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Usaha (Konvensional dan Syariah)



Sumber: LBB Bank Indonesia, 2025

melampaui batas sehat, yakni 92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan di Lampung tetap agresif menyalurkan kredit meskipun pertumbuhan DPK melambat.

4.1.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga (RT) memiliki peran besar dalam perekonomian Lampung. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 5,04% (yoy) dan juga merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga se-Sumatera, relatif stabil dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,09% (yoy). Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran sektor rumah tangga yang memiliki andil terbesar sebagai penopang utama perekonomian Lampung (60,49% PDRB), yang tumbuh sebesar 4,94% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkatkan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,67% (yoy) (Grafik 4.4).

Dukungan dari sektor konsumsi rumah tangga tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia dengan capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang secara rata-rata pada triwulan III 2025 masih berada di atas batas optimis indeks, atau senilai 114,25. Positifnya IKK didorong oleh pertumbuhan positif rata-rata triwulanan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK), yang masing-masing senilai 104,88 dan 123,61 (Grafik 4.5).

Pada triwulan III 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh dengan realisasi sebesar Rp28,59 triliun atau tumbuh 10,48% (yoy) (Grafik 4.6). Pertumbuhan tersebut sedikit melambat

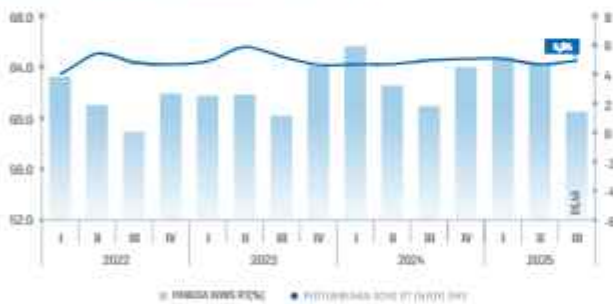
dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh 12,02% (yoy) dan periode yang sama tahun 2024 sebesar 12,69% (yoy).

Pertumbuhan kredit di sektor rumah tangga, didukung baik oleh peningkatan pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), kinerja positif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Multiguna yang masing-masing tumbuh sebesar 43,95% (yoy), 10,70% (yoy) dan 9,31% (yoy) (Grafik 4.7).

Secara spasial, penyaluran KKB menempati pertumbuhan tertinggi pada periode laporan, dengan pertumbuhan 43,95% (yoy) pada triwulan III 2025, relatif stabil dengan triwulan sebelumnya sebesar 43,20% (yoy). Hal ini sejalan dengan periode panen raya kopi robusta Lampung pada bulan Mei-Agustus yang turut berdampak meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap industri otomotif. Selain itu, kebijakan pemerintah utamanya untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) yang memperpanjang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penjualan Kendaraan Bermotor Emisi Karbon Rendah (*Low Carbon Emission Vehicle* atau LCEV) listrik tertentu (*hybrid*) hingga akhir tahun 2025, turut mendorong peningkatan penyaluran kredit pada sektor ini.

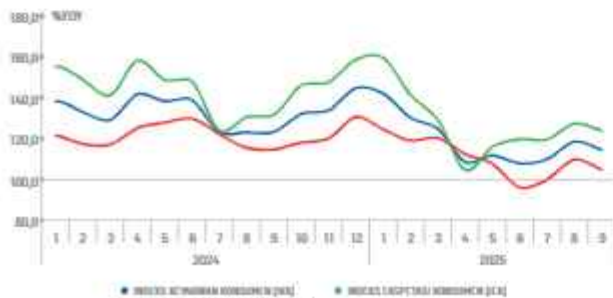
Di sisi lain, KPR tetap tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu tumbuh 9,71% (yoy) menjadi 10,70% (yoy) pada triwulan berjalan saat ini. Berlanjutnya insentif berupa pelonggaran rasio *Loan to Value (LTV) / Financing to Value (FTV)* untuk kredit / pembiayaan properti serta insentif fiskal berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti terutama menyasar segmen menengah.

Grafik 4.4 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga



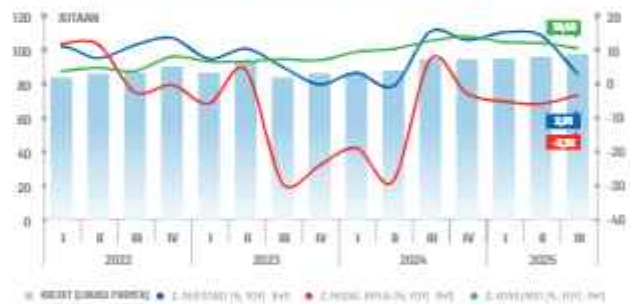
Sumber: BPS, Provinsi Lampung, statistik

Grafik 4.5 - Indeks Keyakinan Konsumen



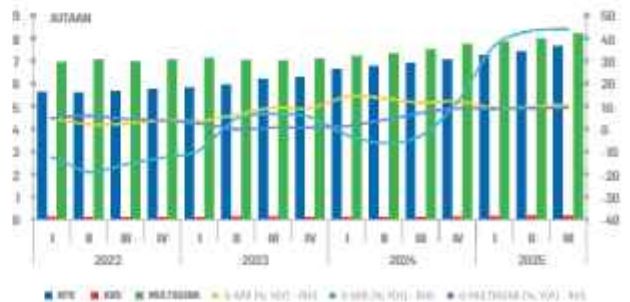
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, statistik

Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



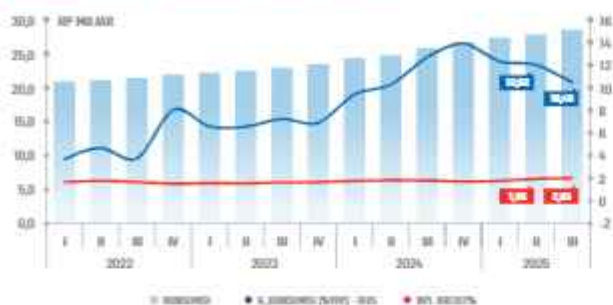
Sumber: LRT Bank Indonesia, statistik

Grafik 4.7 Kredit Konsumsi RT berdasarkan Jenis Penggunaannya



Sumber: LRT Bank Indonesia, statistik

Grafik 4.8 NPL Kredit Konsumsi Provinsi Lampung



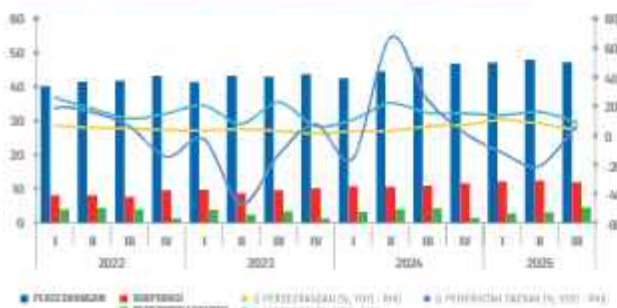
Sumber: LRAI Bank Indonesia, diolah

Selain itu, insentif PPN DTP juga diberikan untuk pembelian rumah komersial dengan nilai di bawah Rp 5 miliar yang mendorong pertumbuhan kredit Rumah Toko atau Rumah Kantor. Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat turut berupaya memberikan subsidi bunga dan program perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan penyaluran KPR di Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Bank Indonesia menetapkan pada 1 April 2025, akan memberlakukan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari semula 4% menjadi 5% terutama untuk sektor perumahan. Kebijakan yang juga bertujuan untuk mendukung program Asta Cita di bidang perumahan ini diyakini akan semakin mendorong peningkatan penyaluran KPR di periode kedepan, termasuk Provinsi Lampung.

Sementara itu, kredit multiguna turut menjadi penyangga kuatnya kinerja kredit di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025, dengan pertumbuhan 9,31% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,05% (yoy) maupun dari triwulan III 2024 yang tumbuh 7,02% (yoy). Kredit multiguna tetap menjadi salah satu kredit yang tingkat pemanfaatannya digemari Masyarakat karena lebih fleksibel dibandingkan kredit lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.

Grafik 4.9 DPK Rumah Tangga berdasarkan Jenis Penggunaannya



Sumber: LRAI Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LRAI Bank Indonesia, diolah

Kualitas kredit Rumah Tangga terjaga baik ditengah peningkatan kinerja kredit yang tercermin dari besaran *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah yang berada di bawah ambang batasnya 5%. NPL kredit RT pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 2,03%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,95%, namun relatif rendah dan stabil (Grafik 4.8).

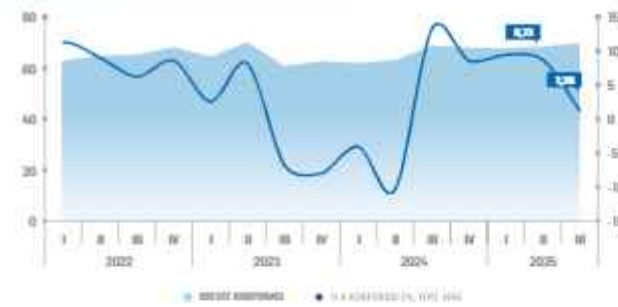
Kinerja kredit yang baik sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga pada triwulan III 2025 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp47,25 Triliun atau 74,25% dari total DPK. Pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,57% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 7,91% (yoy) dan triwulan III 2024 yang tumbuh 6,16% (yoy). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan III 2025 didominasi oleh tabungan (pangsa 77,05%), deposito (pangsa 21,29%), dan giro (pangsa 1,66%) (Grafik 4.9).

Pertumbuhan DPK rumah tangga pada triwulan laporan terjadi karena pertumbuhan pada DPK tabungan sebesar 5,60% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,05% (yoy) dan triwulan III 2024 sebesar 10,7% (yoy). Kinerja DPK pada instrumen deposito juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,63% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,29% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK rumah tangga tersebut, tertahan oleh kinerja instrumen giro yang mengalami kontraksi sebesar 41,59% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar 42,52% (yoy) (Grafik 4.10).

4.1.2 Asesmen Sektor Korporasi

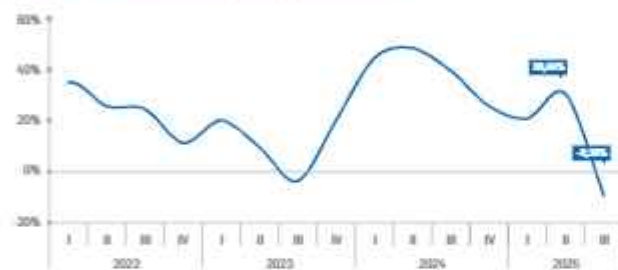
Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan III 2025 melambat namun tetap baik. Kredit perbankan Provinsi Lampung untuk korporasi pada triwulan III 2025 mencapai Rp69,68Triliun atau tumbuh 1,30% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,73% (yoy) dan triwulan III pada tahun sebelumnya sebesar 12,69% (yoy) (Grafik 4.11). Pertumbuhan kredit di sektor korporasi ini turut mendorong kinerja kredit Provinsi Lampung secara menyeluruh karena memiliki pangsa

Grafik 4.11 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LRT Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 SBT Perkembangan Kegiatan Usaha



Sumber: Bank Indonesia (Survei Daya Saing), diolah

yang dominan, yaitu sebesar 71,40% dari total kredit yang disalurkan. Kinerja kredit korporasi yang melambat sejalan dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kegiatan Usaha yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,39%, menurun cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,46% (Grafik 4.12).

Secara sektoral, peningkatan kredit korporasi didorong oleh LU utama Provinsi Lampung, yaitu LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (1,61%; yoy), LU Industri Pengolahan (-0,13%; yoy), LU Konstruksi (2,61%; yoy), LU Perdagangan Besar dan Eceran (-5,16%; yoy), serta LU Transportasi dan Pergudangan (15,73%; yoy) (Grafik 4.13).

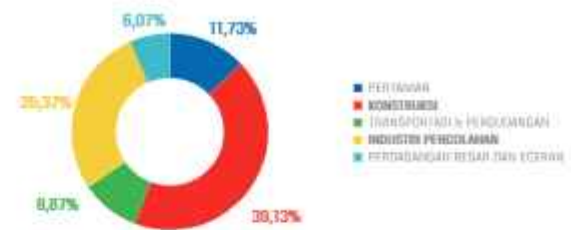
Pertumbuhan kredit pada LU Pertanian di periode laporan tercatat sebesar 1,61% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan

Grafik 4.13 Kredit Korporasi berdasarkan Sektoral



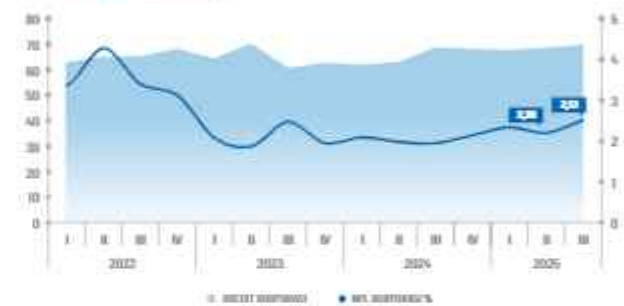
Sumber: LRT Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Pangsa Kredit Korporasi



Sumber: LRT Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 NPL Kredit Korporasi



Sumber: LRT Bank Indonesia, diolah

sebelumnya yang tumbuh 1,17% (yoy). Kinerja pertumbuhan ini juga sejalan dengan musim tanam padi (pasca panen) dan periode panen raya kopi.

Kinerja kredit LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2025 terkontraksi sebesar 0,13% (yoy), melambat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,65% (yoy) dan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 31,38% (yoy). Penurunan kinerja kredit tersebut menandakan bahwa aktivitas manufaktur di Lampung melambat pada triwulan berjalan.

Selanjutnya, dilihat berdasarkan risiko kreditnya, NPL kredit korporasi tetap terjaga pada level yang rendah. Pada triwulan III 2025, NPL kredit korporasi tercatat 2,51%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,20% (Grafik 4.15).

Grafik 4.16 DPK Kredit Korporasi



Sumber: LRT Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, pertumbuhan DPK korporasi di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 9,17% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 16,03% (yoy). Pertumbuhan DPK korporasi didukung oleh pertumbuhan instrumen tabungan dan deposito yang masing-masing tercatat sebesar 39,71% (yoy) dan 12,44% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing 28,75% (yoy) dan 9,25% (yoy). Sementara untuk komponen giro mengalami kontraksi sebesar 0,04% (yoy), setelah periode sebelumnya tumbuh sebesar 15,65% (yoy). Penurunan kinerja Giro sejalan dengan adanya efisiensi anggaran pemerintah.

4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Kredit UMKM pada triwulan III 2025 tumbuh positif meski melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,55 Triliun atau tumbuh 0,72% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh lebih tinggi sebesar 1,95% (yoy) (Grafik 4.16).

Berdasarkan pangsaanya, kredit UMKM mikro masih mendominasi dengan pangsa sebesar 50,09%, diikuti dengan UMKM kecil sebesar 35,04% dan UMKM menengah dengan pangsa 14,87% (Grafik 4.17). Ditinjau dari skala usaha, penyaluran Kredit UMKM mikro dan menengah melambat. Sedangkan, kredit usaha kecil mengalami pertumbuhan positif. Kredit usaha mikro dan menengah berkontraksi lebih dalam masing-masing menjadi -4,99% (yoy) dan -14,99% (yoy),

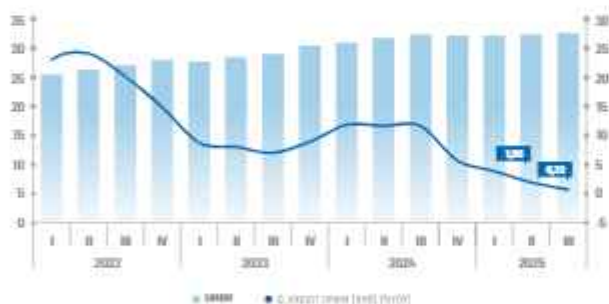
melemah dibandingkan triwulan II 2025 yang berkontraksi sebesar -2,23% (yoy) dan -10,93% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh sebesar 20,53% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 16,26% (yoy) (Grafik 4.18).

Meskipun terdapat pelemahan di beberapa segmen kredit UMKM, secara umum kinerja kredit UMKM tetap kuat dan mencerminkan kondisi pasar UMKM yang stabil sekaligus prospektif. Kinerja positif ini mencerminkan tingginya kepercayaan sektor perbankan untuk terus memberikan dukungan pembiayaan kepada para pelaku UMKM di Provinsi Lampung.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan dukungan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang kokoh. Untuk mendukung upaya tersebut salah satunya diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kontribusi UMKM, salah satunya dilakukan melalui pemasaran produk UMKM secara global. Namun demikian, persaingan pasar global saat ini tidak mudah. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

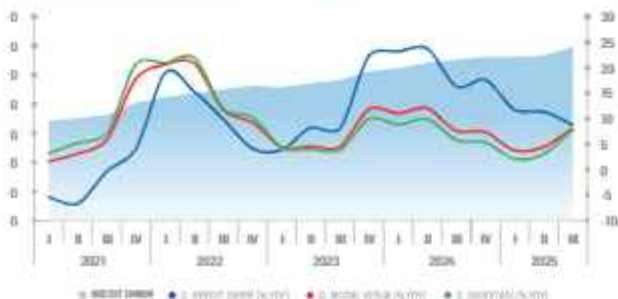
Bank Indonesia terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM yang dilakukan melalui kebijakan baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*. Dari sisi *demand*, UMKM diarahkan untuk

Grafik 4.17 Pertumbuhan Kredit UMKM



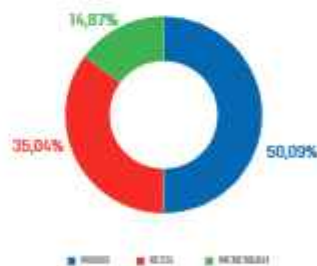
Sumber: LBB Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Kredit UMKM berdasarkan Jenis



Sumber: LBB Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Pangsa Kredit UMKM



Sumber: LBB Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Kredit UMKM berdasarkan Jenis



Sumber: LBB Bank Indonesia, diolah

meningkatkan kapabilitasnya sehingga mampu masuk ke dalam kategori *bankable*, melalui berbagai bentuk program bantuan teknis berlandaskan 3 pilar, yaitu (1) Korporatisasi, melalui penguatan kelembagaan dan perluasan mitra, (2) Peningkatan kapasitas secara *end-to-end*, melalui penguatan kewirausahaan dan perluasan pasar dan (3) Pembiayaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan perluasan digitalisasi keuangan. Khususnya dalam pilar pembiayaan, Bank Indonesia mendorong percepatan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan data & informasi UMKM yang potensial mendapat pembiayaan (BISAID), penyediaan dan pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara digital (SIAPIK), serta fasilitasi pelaksanaan business matching pembiayaan bersama perbankan.

Untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, terdapat beberapa upaya Bank Indonesia dari sisi supply, antara lain (1) Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui penerapan PBI No.23/13/PBI/2021 dan telah disempurnakan melalui PBI No.24/3/PBI/2022, yang merupakan rasio untuk menggambarkan porsi pembiayaan inklusif untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM serta Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR); (2) Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang ditetapkan BI melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata, atas penyaluran kredit bank kepada sektor tertentu (minerba, non minerba, perumahan dan pariwisata), inklusif (termasuk KUR), ultra mikro; dan hijau yang berlaku efektif 1 Oktober 2023 melalui penerapan PBI No.11 Tahun 2023; dan (3) Kehadiran Bi-Fast sebagai wujud dukungan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan perbankan

digital dan memperluas jangkauan perbankan ke daerah terdepan dan terluar, sebagai salah satu inovasi kanal Sistem Pembayaran Non Tunai yang cepat, murah, mudah, aman dan handal.

Dukungan lain Bank Indonesia kepada UMKM juga diwujudkan pada Keputusan rapat Dewan Gubernur November 2025 yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 4,75%. Keputusan ini salah satunya bertujuan untuk terus mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan dan menjadi stimulus bagi para pelaku UMKM. Dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan untuk ekspansi atau menjaga arus kas, terutama dalam menghadapi tekanan biaya produksi pasca kenaikan upah dan harga bahan baku.

Sebagai wujud dukungan di tingkat regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung turut mengembangkan UMKM agar lebih kuat dan berdaya saing antara lain melalui (1) Program Unggulan, meliputi pemberian pelatihan, pendampingan, penyediaan informasi, serta fasilitasi akses keuangan dan pasar dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperkuat kelembagaan, serta mendorong hilirisasi produk agar lebih berdaya saing; dan (2) Pemberdayaan Usaha Syariah, meliputi kegiatan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren berbasis pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern, yang memiliki peran penting dalam membangun pondasi ekonomi nasional yang kuat, serta diharapkan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal yang fokus pada bahan baku, teknologi pengolahan, sertifikasi halal, dan pemisahan produk halal dari kontaminasi, melalui serangkaian program pendampingan dan bimbingan teknis.

Boks 4 :

LAMPUNG BEGAWI 2025: Semangat Tak Henti Dorong UMKM Lampung Naik Kelas

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menyelenggarakan Lampung Begawi 2025, sebuah perhelatan tahunan yang menjadi wadah sinergi budaya, kreativitas, dan penguatan ekonomi daerah. Acara yang digelar pada 3-5 Oktober 2025 di Lampung City Mall ini menghadirkan lebih dari 70 UMKM unggulan, festival kuliner, pertunjukan busana, festival musik, serta berbagai forum edukasi yang terbuka untuk umum dan gratis bagi masyarakat.

Mengusung tema "Sinergi, Digitalisasi, dan Inklusivitas untuk Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan", Lampung Begawi tahun ini hadir sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak sekaligus etalase pencapaian UMKM Lampung. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan efisiensi pembayaran digital

melalui QRIS, dan perluasan pasar produk lokal untuk memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selama penyelenggaraan, Lampung Begawi menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan edukasi, budaya, dan hiburan. Mulai dari *talkshow* interaktif mengenai literasi keuangan, kewirausahaan, dan digitalisasi; *business matching* ekspor dan pembiayaan; pertunjukan busana wastra Lampung, hingga festival kuliner dan hiburan musik dari seniman lokal maupun nasional. UMKM unggulan binaan dan mitra Bank Indonesia Lampung turut memamerkan produk terbaiknya di bidang kuliner, fesyen, dan kriya.

Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Selama tiga hari pelaksanaan, Lampung Begawi 2025 berhasil menarik lebih dari 18 ribu pengunjung, dengan nilai transaksi tenant kuliner mencapai Rp500,6 juta dan tenant wastra

Gambar 1. Opening Ceremony Lampung Begawi 2025



Gambar 2. Business Matching UMKM Ekspor



Gambar 3. Signing Ceremony Komitmen Ekspor



Gambar 4. Pagelaran Busana dengan Sahabat Difabel



sebesar Rp460 juta. Tidak hanya itu, kegiatan *business matching* juga menghasilkan komitmen ekspor antara pelaku UMKM Lampung dan buyer internasional dengan total nilai *Letter of Intent* mencapai Rp5,5 miliar, serta komitmen pembiayaan sebesar Rp10,46 miliar sebagai bukti nyata dukungan perbankan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM daerah.

Pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi lintas pihak dalam membuka peluang baru bagi UMKM Lampung untuk naik kelas. "Lampung Begawi bukan sekadar festival, melainkan wadah edukasi, promosi, dan perluasan jejaring bagi pelaku usaha UMKM Lampung. Melalui digitalisasi dan pendampingan yang berkesinambungan, kami ingin memastikan produk Lampung tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, pada sambutannya dalam Penutupan Lampung Begawi 2025 (5/10).

Selain menjadi ajang promosi produk UMKM unggulan, Lampung Begawi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan berkarya. Kegiatan seperti *M*, ekonomi kreatif, dan mendorong investasi daerah,

pelatihan *content creator*, pertunjukan boneka Radin Inten II, dan pertunjukan busana wastra Lampung menjadi bukti bahwa kreativitas anak muda dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian budaya dan ekonomi kreatif. Gubernur Lampung menegaskan harapannya bahwa rangkaian kegiatan Lampung Begawi dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam mengembangkan daya saing UMK.

Gambar 5. Sambutan Gubernur Lampung



Boks 5 :

Hilirisasi Kopi Robusta: Prioritas Pasar Domestik atau Ekspor?

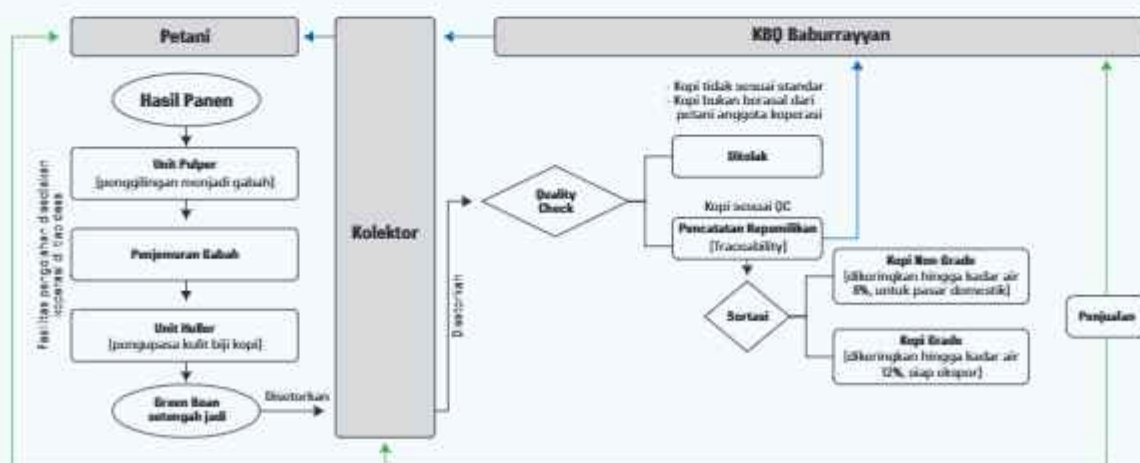
Kopi robusta merupakan komoditas unggulan di Indonesia, dengan Lampung sebagai salah satu produsen terbesar yang pada tahun 2024 mencapai 120.379 ton, berkontribusi hampir 15% dari produksi nasional. Namun, posisi strategis ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi nilai tambah yang optimal bagi kesejahteraan petani maupun perekonomian daerah. Di tengah dinamika pasar global dan meningkatnya permintaan kopi dalam negeri, pilihan strategi hilirisasi: apakah fokus pada pasar domestik atau ekspor, menjadi isu kebijakan yang mendesak untuk dijawab.

Kesesuaian produk dengan preferensi pasar global menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Pasalnya, berdasarkan diskusi yang dilakukan Bank Indonesia dengan organisasi pemerintah daerah hingga pelaku usaha kopi di Lampung, *green bean* masih menempati urutan teratas jenis yang diminati. Dengan umur simpan yang panjang dan konsistensi rasa yang terjaga, *green bean* lebih unggul dibandingkan *roasted bean* atau produk olahan turunannya yang memiliki keterbatasan umur simpan. Terbukti dari data 2024 yang dirilis BPS bahwa ekspor kopi Indonesia 76,88% didominasi oleh *green bean*. Oleh karena itu, menjual produk olahan kopi saat ini justru dapat menggeser tren permintaan pasar kopi robusta Indonesia menjadi kurang kompetitif, sehingga ekspor kopi perlu didorong menjadi produk semi olahan.

Tantangan daya saing ekspor kopi robusta Lampung kemudian teridentifikasi menjadi tiga hal: mutu, kelembagaan, dan akses pasar. Pertama, mutu *green bean* masih bervariasi karena proses hulu yang belum seragam: pemetikan campuran hingga minimnya sortasi, sehingga petani sering menjual kopi bentuk asalan atau *non-grade* dengan harga rendah. Kedua, petani masih bergerak sporadis karena kelembagaan yang belum kuat sehingga belum memiliki mekanisme *traceability* dan standar mutu kolektif. Ketiga, akumulasi kedua permasalahan tersebut membuat akses pasar terhambat karena adanya keterbatasan akses terhadap sertifikasi seperti: *Organic*, *Rainforest Alliance*, *Fairtrade*, dan lainnya. Padahal, sertifikasi tersebut yang dapat membuat *green bean* memiliki grade tinggi dan mampu menembus pasar premium di pasar Eropa, Amerika, hingga Jepang.

Oleh karena itu, kesiapan teknis dan kelembagaan perlu diprioritaskan, misalnya dengan pembentukan koperasi dengan proses bisnis yang lebih matang. Salah satu model yang dapat direplikasi adalah KBQ Baburayyan sebagai koperasi pemasok kopi Gayo terbesar dari Aceh Tengah. Tak hanya memfasilitasi infrastruktur pengolahan pascapanen, koperasi dapat memastikan *traceability* dengan *quality check* dan standar prosedur yang tepat sehingga tercipta rantai pasok yang terorganisasi dengan baik (Gambar 1). Koperasi juga berperan sangat penting dalam sertifikasi petani, membuka akses terhadap pasar premium bernilai tambah tinggi dan kesejahteraan.

Gambar 1. Proses Bisnis KBQ Baburayyan







Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

- Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp0,84 triliun. Kondisi ini sejalan dengan kinerja ekonomi yang stabil. Sementara, kondisi aliran uang kartal *outflow* menurun sebesar 2,64% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya dengan *outflow* sebesar 34,30% (yoy).
- Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (RTGS)* tumbuh melambat yakni kontraksi sebesar 9,73% (yoy) pada triwulan III 2025. Berlawanan dengan RTGS, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami ekspansi sebesar 0,50% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit meningkat sebesar 19,53% (yoy), melanjutkan tren triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 11,24% (yoy).
- Sampai dengan September 2025, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 739.802 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatra. Sementara, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.387.227. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 1,84% (qtoq) dari triwulan sebelumnya.

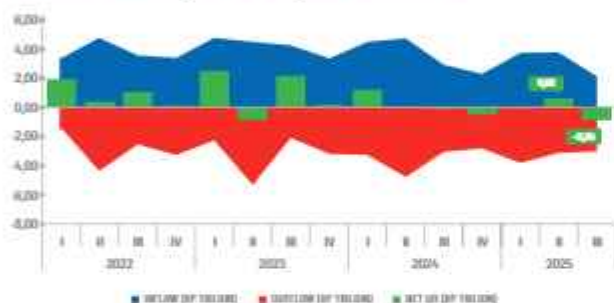
5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah aliran uang masuk dari Perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke Perbankan (*outflow*), termasuk dukungan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti penukaran uang melalui Bank Indonesia, Kas Keliling, dan Kas Titipan.

5.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp0,84 triliun. Sedangkan pada triwulan sebelumnya mengalami *net inflow* sebesar Rp0,62 triliun. Kondisi *net outflow* pada triwulan III 2025

Grafik 5.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan



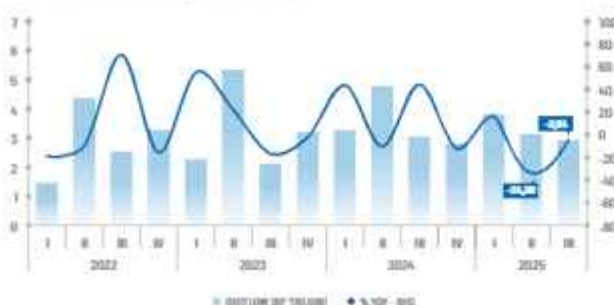
Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Aliran Uang Kartal Inflow



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Aliran Uang Kartal Outflow



Sumber : Bank Indonesia, diolah

sejalan dengan dengan kinerja ekonomi yang stabil (Grafik 5.1). Secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa aliran uang kartal inflow tercatat menurun sebesar 27,24% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik 5.2), hal ini sejalan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat menurun sebesar 20,55% (yoy). Selanjutnya, aliran uang kartal outflow juga tercatat menurun sebesar 2,64% (yoy) (Grafik 5.3), meningkat dari triwulan sebelumnya dengan outflow 34,30% (yoy).

5.1.2 Penyediaan Uang Layak Edar

Dalam pelaksanaan tugas pada bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengedaran uang ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan tentunya dalam kondisi yang layak edar.

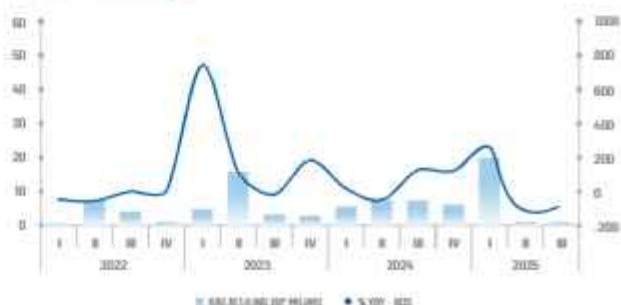
Sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang layak edar (*clean money policy*) tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) baik secara langsung melalui loket penukaran kantor Bank Indonesia dan kas keliling, serta bersinergi dengan Perbankan untuk turut menerima penukaran uang. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitasnya (*soil level*), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Grafik 5.4 Penukaran Uang Melalui BI



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Kas Keliling



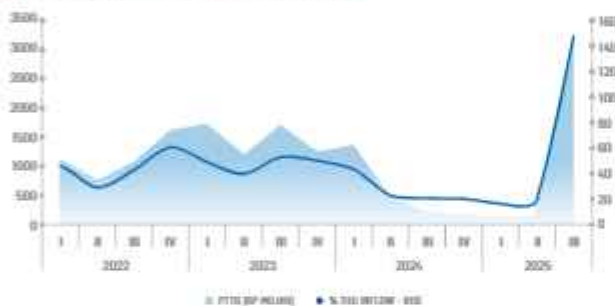
Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Kas Titipan



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7 Perkembangan Pemusnahan UTLE



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Pada triwulan III 2025, penukaran uang melalui Bank Indonesia tercatat sebesar Rp13,39 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp11,71 miliar (Grafik 5.4). Namun terjadi penurunan jumlah penukaran uang oleh masyarakat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara lebih rinci pada triwulan III 2025, penukaran melalui kas keliling tercatat sebesar Rp1,5 miliar meningkat jika dibandingkan dengan Rp940 juta triwulan sebelumnya (Grafik 5.5).

Selanjutnya, KPwBI Provinsi Lampung tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) khususnya di daerah terpencil melalui kegiatan kas titipan dan kas keliling 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung saat ini memiliki 1 (satu) Kas Titipan yang berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat dengan Bank Pengelola PT BRI KC Liwa. Kas Titipan Liwa memiliki 4 (empat) Bank Peserta yang terdiri dari BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BPD Lampung. Adapun selama triwulan III 2025, transaksi keluar kas titipan Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp203,95 miliar (Grafik 5.6), mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp272,02 miliar.

Pada periode laporan, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp3,1 triliun. Dibandingkan dengan nominal inflow, persentase pemusnahan tersebut tercatat sebesar 149,09%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,29% dan menjadi persentase tertinggi sepanjang periode pemusnahan (Grafik 5.7).

5.1.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu

Pada triwulan III 2025, terdapat temuan uang palsu sebanyak 806 lembar di Provinsi Lampung (Grafik 5.8). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 534 lembar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang palsu yang ditemukan meningkat sebesar 21,57% (yoy).

Adapun nominal temuan uang palsu terbanyak ialah Rp100.000. Sementara itu, untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) tercatat ditemukan 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000, dan 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000. Upaya pencegahan dan penanganan uang palsu tetap terus dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan edukasi program Cinta Bangsa Pahami Rupiah yang mencakup materi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui berbagai platform. Selain itu, sinergi dengan perbankan dan pihak aparaturnya hukum juga dilakukan sebagai upaya untuk terus menurunkan tindak kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.

5.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement (RTGS)* mencatatkan pertumbuhan negatif pada triwulan III 2025. Berbeda dengan transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang tercatat tetap mengalami pertumbuhan positif.

Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terekspansi sebesar 0,50% (yoy), kondisi ini tumbuh dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 6,63% (yoy) (Grafik 5.9). Berdasarkan jenisnya, fenomena menguatnya transaksi kliring tersebut didorong oleh pertumbuhan kliring kredit yang tercatat meningkat 18,7% dibandingkan triwulan sebelumnya.

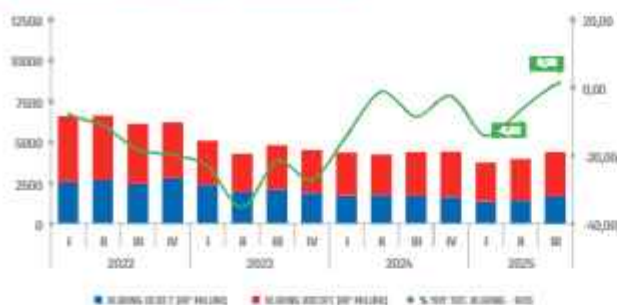
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nominal transaksi kliring kredit juga mengalami peningkatan sebesar 11,16% (yoy). Berbeda dengan transaksi kliring debit yang berkontraksi sebesar 16,56% (yoy).

Grafik 5.8 Temuan Uang Palsu



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi Kliring



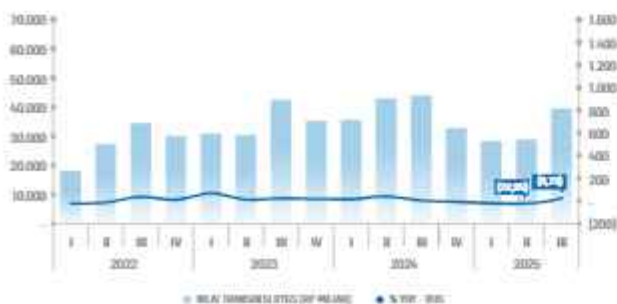
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya berlawanan dengan SKNBI, nilai transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh negatif, yakni menurun sebesar 9,73% (yoy) (Grafik 5.10). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi RTGS meningkat yakni dari Rp28,18 miliar menjadi sebesar Rp39,67 miliar. Adapun perkembangan transaksi RTGS tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Hal ini juga menjadi indikasi perubahan *landscape* penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.

Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), serta tersedia setiap saat (24/7), Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan dimaksud. Dengan kehadiran BI-FAST, diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional melalui penyediaan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional eksisting yang terbatas pada jam operasional tertentu.

Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *real-time* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address* (antara lain nomor handphone dan email) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan

Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). BI-FAST telah diimplementasikan mulai Desember 2021 melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*, yang kemudian akan dikembangkan melalui kanal lainnya, a.l. QRIS, ATM, dan EDC.

5.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN UANG ELEKTRONIK

Sejalan dengan peningkatan akseptasi pembayaran non tunai, preferensi metode pembayaran masyarakat mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat, serta aman melalui berbagai platform. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan berjalannya kegiatan sistem pembayaran nasional.

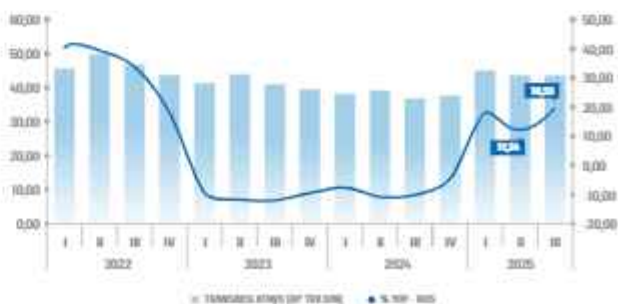
5.3.1. Perkembangan Transaksi APMK

Pada periode laporan, nominal transaksi kartu ATM/Debit tercatat meningkat sebesar 19,53% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang juga terekspansi sebesar 11,24% (yoy) (Grafik 5.11). Pertumbuhan transaksi kartu ATM/Debit yang meningkat tersebut terpantau juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, dimana indeks pengeluaran konsumsi untuk barang tahan lama menunjukkan angka yang optimis (>100) pada periode triwulan III 2025 memiliki nilai rata-rata sebesar 107,33 (Grafik 5.12).

Berkontradiksi dengan perkembangan kartu ATM/Debit, transaksi pembayaran melalui kartu kredit pada triwulan III 2025 mengalami penurunan sebesar 33,49% (yoy) (Grafik 5.13), tidak sejalan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 7,35% (yoy).

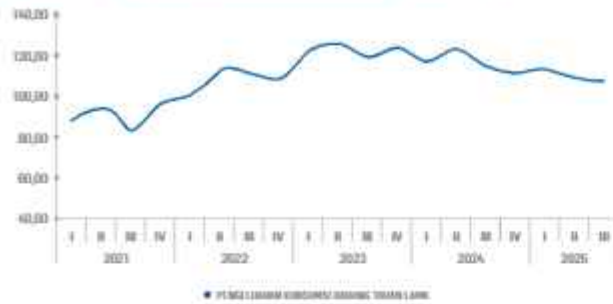
Secara lebih rinci, berdasarkan jenis transaksinya terlihat bahwa penyusutan transaksi kartu kredit disebabkan oleh menurunnya transaksi belanja yang pada periode sebelumnya tercatat terekspansi sebesar 8,04% (yoy) menjadi terkontraksi

Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D



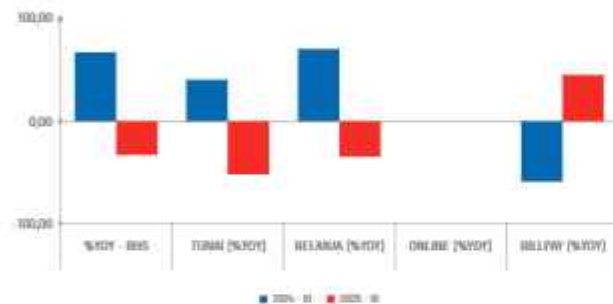
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahun Lama



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)



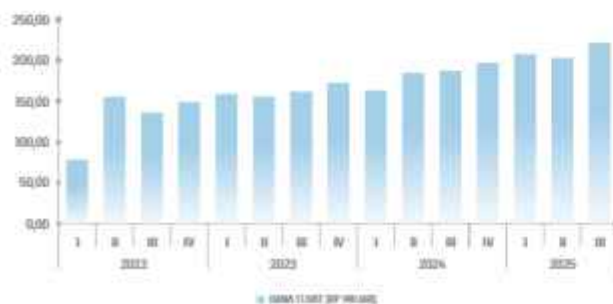
Sumber: Bank Indonesia, diolah

sebesar 33,32% (yoy). Selaras dengan transaksi tunai yang juga mengalami penurunan sebesar 50,16% (yoy), melanjutkan tren triwulan sebelumnya yang juga menurun sebesar 27,19% (Grafik 5.14).

5.3.2. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

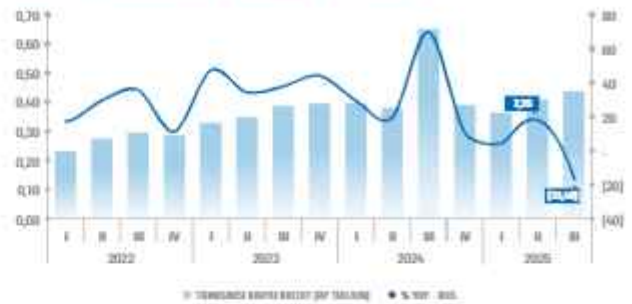
Pada triwulan III 2025, dana *float* atau nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna tercatat sebesar Rp215,49 miliar (Grafik 5.17), naik dibandingkan triwulan II 2025 dengan nilai Rp203,12 miliar. Berdasarkan jenis transaksinya, perkembangan uang elektronik pada triwulan III 2025 mengalami pertumbuhan pada transaksi belanja sebesar 12,26% (yoy) meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 10,75% (yoy). Hal ini selaras dengan transaksi transfer yang juga mengalami peningkatan sebesar 26,43%

Grafik 5.16 Perkembangan Dana Float UE



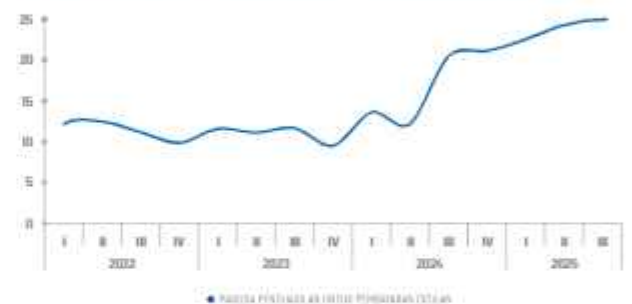
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.15 Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)



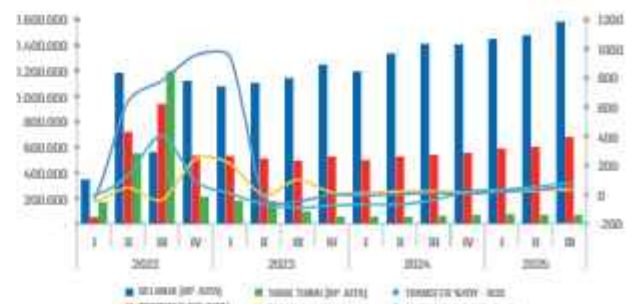
Sumber: Bank Indonesia, diolah

(yoy), didukung dengan transaksi tarik tunai yang mengalami peningkatan sebesar 54,57% (yoy) (Grafik 5.17).

Berdasarkan pangsaanya, transaksi uang elektronik pada periode laporan sebagian besar berasal dari transaksi belanja dengan pangsa mencapai 67,17% (Grafik 5.18). Sementara itu, pada kedua jenis transaksi lainnya, yaitu tarik tunai dan transfer pangsaanya masing-masing sebesar 3,97% dan 28,86%.

Secara umum, tren peningkatan penggunaan digitalisasi pembayaran di Provinsi Lampung juga tergambar dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yakni dari 5,58 di tahun 2021 menjadi sebesar 5,63 di tahun 2022. Peningkatan tersebut ditopang oleh komponen penggunaan yang meningkat sebesar 3,31% (Grafik 5.19).

Grafik 5.17 Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi



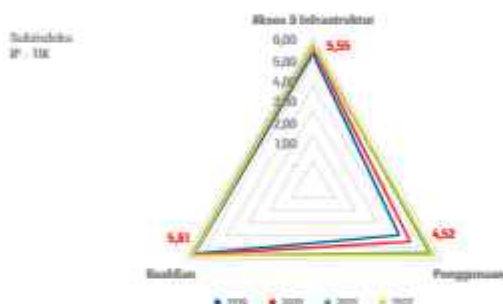
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.18 Pangsa Transaksi UE Triwulan III 2025



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi



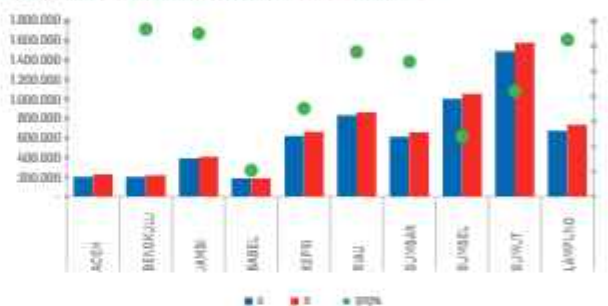
Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.21 Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan



Sumber : Bank Indonesia, diolah

5.4. PERKEMBANGAN MERCHANT & PENGGUNA QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)

Sampai dengan September 2025, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 739.802 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera (Grafik 5.20).

Sampai dengan September 2025, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.387.227 (Grafik 5.23). Jumlah ini mengalami pertumbuhan 1,84% (qtq) dari triwulan sebelumnya.

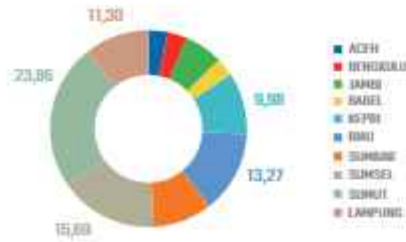
Berbagai strategi program perluasan QRIS telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam rangka perluasan QRIS pada triwulan III tahun 2025, antara lain:

- Edukasi dan sosialisasi kepada siswa/i Sekolah Menengah Atas dan komunitas di Provinsi Lampung termasuk daerah 3T dalam program SIGMA QRIS (Sinergi Generasi eMAs pakai QRIS)
- Dukungan penyelenggaraan HLM TP2DD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pembayaran e-retribusi di Pasar Pulung Kencana.
- Perlombaan olahraga QRIS 3x3 Siger Slam di 3 wilayah [Tulang Bawang Barat, Pringsewu, dan Bandar Lampung]

bersamaan dengan pameran tenant UMKM yang pembayarannya menggunakan QRIS.

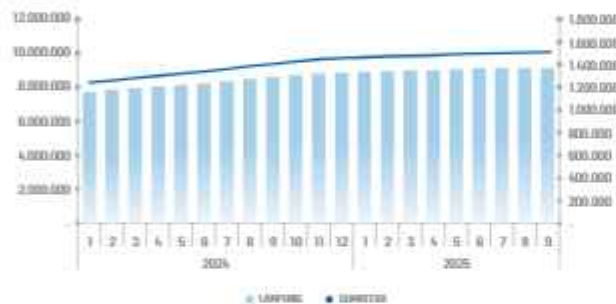
- Dukungan penyelenggaraan Kufiner Lampung Festival untuk mendorong penggunaan QRIS dalam bertransaksi, dan memberikan reward kepada tenant dengan jumlah transaksi dan nominal terbanyak menggunakan QRIS.
- Perlombaan volume scan QRIS menggunakan website berbasis sistem kepada pegawai non organik dan petugas kliring.
- Dukungan penyelenggaraan bagi wajib pajak di Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung yang melakukan pembayaran pajak PBB-P2 menggunakan QRIS.
- Peningkatan pengalaman penggunaan QRIS dalam rangka kemerdekaan RI dan PQN dengan scan QRIS untuk photobooth dan games di area kegiatan QRIS 3x3 siger slam.
- Pelaksanaan QRIS Jelajah Budaya Indonesia dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai QRIS.
- Dukungan penyelenggaraan High Level Meeting TP2DD Provinsi Lampung untuk meningkatkan koordinasi antar TP2DD di provinsi Lampung.
- Pelaksanaan kegiatan SIGER Fest berupa lomba edukatif, run dengan wakaf produktif, dan kuliner festival menggunakan QRIS untuk meningkatkan akseptasi pembayaran digital di masyarakat.

Grafik 5.22 Pangsa Merchant QRIS di Sumatera



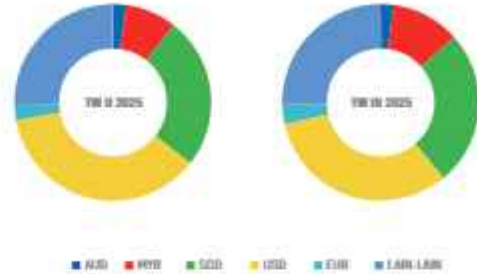
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.23 Perkembangan Pengguna QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.24 Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.25 Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR



Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.5. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)

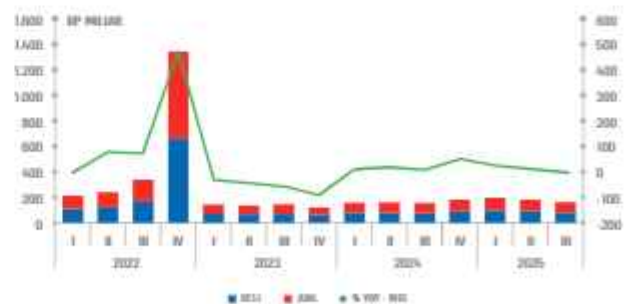
Kegiatan Penukaran Valuta Asing merupakan kegiatan jual beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (*Traveller's Cheque*). Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh Perbankan maupun badan usaha bukan bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, atau biasa disebut dengan money changer. Guna mendukung terciptanya perdagangan valuta asing yang sehat dan aman bagi masyarakat, Bank Indonesia telah mengatur tata cara perizinan dan pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing yang dilakukan oleh Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Pada triwulan III 2025 transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp169,96 miliar, mengalami penurunan dibandingkan total transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp178,18 miliar. Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, nominal transaksi tersebut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9,84% (yoy) (Grafik 5.24). Berdasarkan jenis transaksinya pangsa transaksi jual

(dilihat dari sisi KUPVA BB) pada periode laporan tercatat sebesar 50,15%, sedangkan transaksi beli sebesar 49,85%.

Berdasarkan komposisi mata uangnya, dapat dilihat bahwa pangsa transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD dan SGD mendominasi transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung, masing-masing sebesar 32,64% dan 24,98% (Grafik 5.25). Nilai rata-rata kurs tengah US Dollar pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp16.523,19, mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang sebesar Rp16.306,72 (Grafik 5.26).

Grafik 5.26 Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

- Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja secara absolut menjadi 4,85 juta jiwa, naik sebanyak 65,79 ribu jiwa atau tumbuh 1,37% dibandingkan triwulan III 2024
- Sementara itu, dari sisi status pekerjaan utama masyarakat Provinsi Lampung pada Triwulan III 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 3.140,87 ribu orang (64,72%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.712,51 ribu orang (35,28%).
- Pada saat yang sama, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,21%, yang berarti sekitar empat orang dari setiap seratus orang angkatan kerja berada dalam kondisi pengangguran. Dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,02% poin.
- Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 129,96, meningkat secara triwulanan maupun tahunan. Dibandingkan triwulan sebelumnya, rata-rata NTP triwulanan sebesar 128,95 dan pada triwulan III 2024 sebesar 128,71.
- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung terpantau mengalami penurunan sebesar 5,67% [yoy], yaitu sebanyak 941,23 ribu jiwa pada 2024 menjadi 887,02 ribu jiwa pada data terkini per Maret 2025.

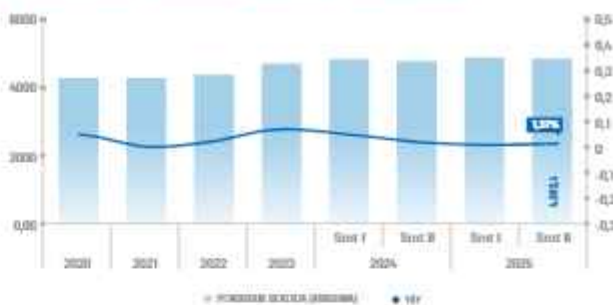
6.1. KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja secara absolut menjadi 4,85 juta jiwa, naik sebanyak 65,79 ribu jiwa atau tumbuh 1,37% dibandingkan triwulan III 2024 (Grafik 6.1). Di sisi lain, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak 209,16 ribu jiwa menjadi 213,17 ribu jiwa.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukan perbaikan. Pada Triwulan III 2025, TPAK tercatat sebesar 70,44%, naik 0,03 persen poin (yoy) dibandingkan Triwulan III 2024. Hal tersebut menunjukan adanya peningkatan partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung. Peningkatan TPAK ini juga terjadi di tengah peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang melebihi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja.

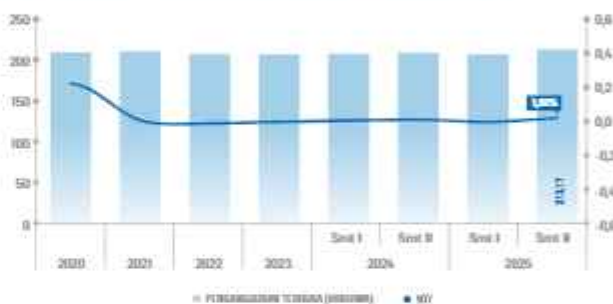
Struktur ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Triwulan III 2025 masih didominasi oleh sektor tradisional, yang tercermin dari komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, tiga lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan jumlah pekerja mencapai 1,99 juta orang atau setara dengan 41,17% dari total penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 19,38%, serta gabungan industri pengolahan dan pertambangan sebesar 9,65% (Tabel 6.1).

Grafik 6.1 Jumlah Penduduk Bekerja di Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.2 Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

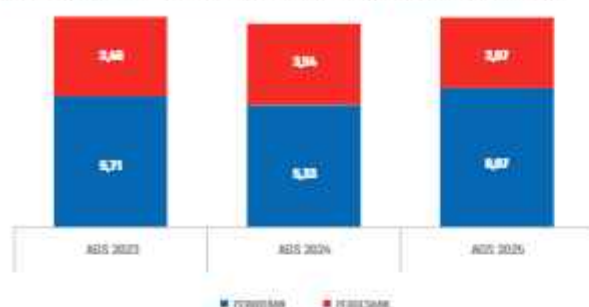
Aspek lain terkait TPAK adalah disparitas gender di pasar tenaga kerja. Pada triwulan III 2025 di Provinsi Lampung, TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,61%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 53,85% (Grafik 6.5). Penurunan kontribusi TPAK perempuan secara tahunan mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi

Tabel 6.1 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2024		2025				YOY (%)
	AGS-24	PORSI	FEB-25	PORSI	AGS-25	PORSI	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan; dan Penggalian	2.233,8	46,19	1.942,36	40,57	1.990,32	41,17	2,51
Pertambangan dan Industri Pengolahan	437,3	9,04	457,38	9,55	468,18	9,65	2,47
Pengadaan Listrik, Gas, & Air Minum, Pengelolaan Sampah	14,5	0,30	26,96	0,56	18,18	0,37	[60,55]
Konstruksi	228,5	4,73	251,33	5,25	261,97	5,40	4,66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	866,8	17,92	939,79	19,63	940,53	19,38	0,09
Transportasi, Pengudangan, & Komunikasi	237,5	4,91	221,61	4,63	190,95	3,93	[12,91]
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	213,9	4,42	254,30	5,31	259,87	5,36	2,60
Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Perusahaan	66,2	1,37	89,37	1,87	109,83	2,26	30,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144,6	2,99	149,62	3,13	149,31	3,08	[0,21]
Jasa Pendidikan	230,5	4,77	286,30	4,31	227,54	4,69	9,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,7	1,07	57,60	1,20	55,73	1,15	[3,62]
Jasa Lainnya	111,0	2,30	190,99	3,99	172,97	3,56	[16,23]
	4836,3	100	4.787,6	100	4853,4	100	

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.8 TPT Provinsi Lampung berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal



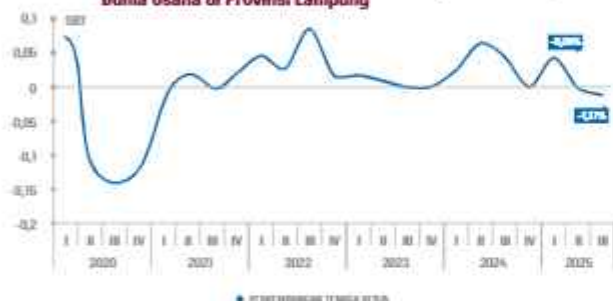
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.10 Upah Minimum Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.9 Penggunaan Tenaga Kerja dan Perkembangan Investasi pada Dunia Usaha di Provinsi Lampung



Sumber: 2020 PwM Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.11 Perkembangan Tahunan Upah Minimum Lampung



Sumber: 2020 PwM Provinsi Lampung, diolah

Tabel 6.2 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

INDIKATOR	2021		2024		2025		A YOY	A OTD
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS		
Penduduk Usia Kerja (15+) (ribu)	6.941,98	7.003,29	7.053,58	7.096,22	7.147,00	7.192,54	1,34%	0,64%
Angkatan Kerja (ribu)	5.003,14	4.904,90	5.044,04	4.996,75	5.095,87	5.066,55	1,38%	-0,38%
Bekerja	4.794,03	4.697,66	4.836,33	4.787,59	4.876,06	4.853,38	1,36%	-0,47%
Pengangguran	209,11	207,24	207,70	209,16	209,80	213,17	1,66%	3,08%
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	1.938,84	2.098,32	2.009,54	2.099,47	2.061,13	2.125,99	1,25%	3,15%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	72,07	70,04	71,51	70,41	71,16	70,44	0,04%	-1,01%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,18	4,23	4,12	4,19	4,07	4,21	0,48%	3,44%
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam) (ribu)	1.986,20	1.744,92	2.011,60	1.890,89	2.098,30	2.019,40	6,36%	-3,81%
Setengah Penganggur	369,90	399,56	521,60	461,02	578,10	548,05	15,88%	-5,20%
Pekerja Paruh Waktu	1.616,30	1.345,37	1.490,00	1.429,88	1.521,20	1.471,35	2,82%	-3,28%
Pekerja Penuh (> 35 jam*) (ribu)	2.807,90	2.952,73	2.824,70	2.896,70	2.779,70	2.833,98	-2,21%	1,95%

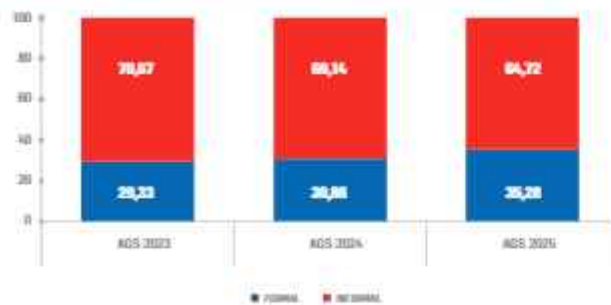
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Kemudian, dari sisi status pekerjaan utama masyarakat Provinsi Lampung pada Triwulan III 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 3.140,87 ribu orang (64,72%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1.712,51 ribu orang (35,28%). Dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2024, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 4,42% poin (Grafik 6.12). Meningkatnya proporsi pekerja informal mengindikasikan bahwa masyarakat yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak

dibayar, pekerja bebas, dan/atau pekerja keluarga/tidak dibayar di Provinsi Lampung bertambah.

Di sisi lain, persentase pekerja paruh waktu dan setengah penganggur mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,45% poin dan 1,66% poin (Grafik 6.13). Sejalan dengan hal tersebut, persentase masyarakat yang memiliki pekerjaan penuh menurun sebesar 2,11% poin. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian pekerja di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan penuh waktu.

Grafik 6.12 Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Lampung

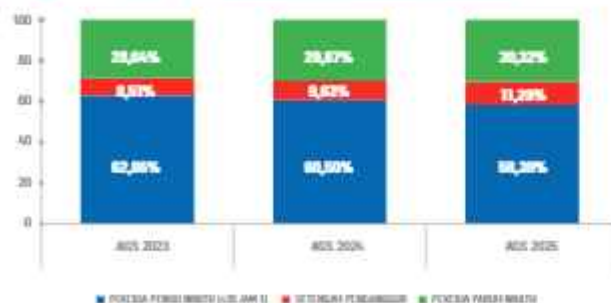


Sumber: SP2, alihak

Selaras dengan status pekerjaan utama tenaga kerja di Provinsi Lampung pada periode Triwulan III 2025 yang masih didominasi oleh pekerjaan informal, ditinjau dari tingkat pendidikan tercatat bahwa sebagian besar pekerja berada pada kategori pendidikan rendah. Dibandingkan dengan Triwulan III 2024, penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum, dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase sebesar 1,35% poin, 0,28% poin, dan 0,05% poin, masing-masing. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan tamatan SD ke bawah, SMA Kejuruan, serta Diploma IV, S1, S2, dan S3 mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan, yaitu sebesar 0,80% poin (Grafik 6.14).

Dalam hal ini, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi kerja dan kemandirian dalam membuka lapangan kerja, khususnya untuk percepatan pemulihan perekonomian. Program tersebut ditujukan untuk para pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengembangan perekonomian dalam skala mikro dan kecil. Adapun pendaftaran Kartu Prakerja belum dilaksanakan kembali dari terakhir kali digelar pada 2024, dengan total 1.419.298 peserta aktif dari gelombang 63 hingga gelombang 71.

Grafik 6.13 Pekerja di Provinsi Lampung berdasarkan Jam Kerja



Sumber: SP2, alihak

Grafik 6.14 TPAK Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: SP2, alihak

6.2 NILAI TUKAR PETANI

Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 129,96, meningkat secara triwulanan maupun tahunan. Dibandingkan triwulan sebelumnya, rata-rata NTP triwulanan sebesar 128,95 dan pada triwulan III 2024 sebesar 128,71. Hal ini tecermin dari peningkatan pada indeks yang diterima petani (It) sebesar 1,16% (yoy) (Grafik 6.15).

Kemudian secara sektoral, rata-rata NTP beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan, yaitu NTP hortikultura dan perikanan tangkap yang berturut-turut tumbuh sebesar 4,15% (yoy) dan 3,50% (yoy). Di sisi lain, NTP tertinggi di Provinsi Lampung masih diduduki oleh NTP perkebunan rakyat dan dan Hortikultura, yang pada akhir Triwulan III 2025 berturut-turut sebesar 165,25 dan 124,23. Walaupun, NTP sektor hortikultura secara rerata pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,43% (yoy) dibandingkan dengan rerata triwulan yang sama pada tahun 2024 (Grafik 6.16).

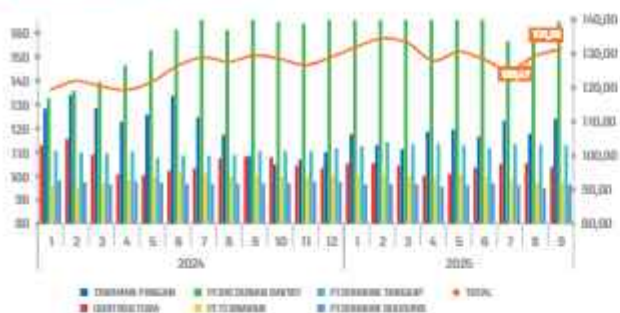
Secara lebih rinci, rata-rata indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) di Provinsi Lampung pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami peningkatan 3,29% (yoy) dibandingkan rerata periode yang sama di tahun lalu (Grafik 6.17). Peningkatan ini lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan rerata indeks harga yang diterima petani (It) yang juga mengalami peningkatan sebesar 1,16% (yoy) (Grafik 6.18).

Grafik 6.15 NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya



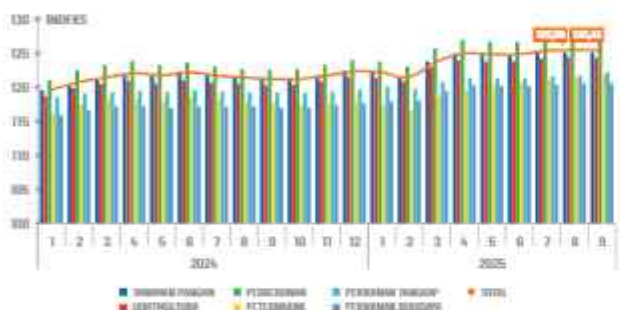
Sumber: SP2 Provinsi Lampung, alihak

Grafik 6.16 NTP Per Sub Sektor



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.17 Indeks yang Dibayar per Sub Sektor



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Hal ini mencerminkan adanya kenaikan harga yang dibayar oleh petani untuk berbagai input produksi, seperti pupuk, benih, dan bahan bakar, yang digunakan dalam proses pertanian. Kenaikan harga input produksi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga global, kondisi cuaca yang mempengaruhi pasokan, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan subsidi atau regulasi harga. Selain itu, lb yang lebih tinggi dibandingkan dengan lt dapat mengindikasikan bahwa biaya produksi yang lebih tinggi belum cukup diimbangi dengan kenaikan harga jual produk pertanian.

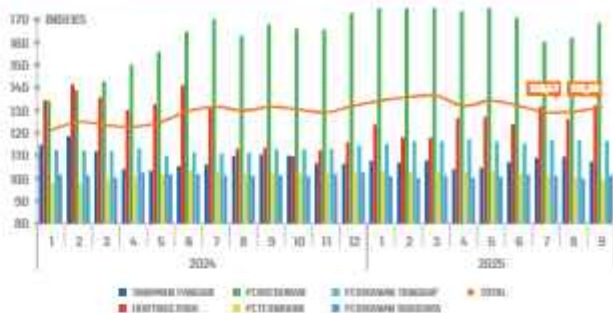
Sejalan dengan hal tersebut, jika dilihat dari NTUP yang mencerminkan pengeluaran riil petani untuk usaha taninya, tercatat NTUP Provinsi Lampung mengalami kontraksi jika dilihat dari rerata Triwulan III 2025 sebesar 0,79% (yoy)

Grafik 6.18 Indeks yang Diterima per Sub Sektor



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.19 Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.20 NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera



Sumber: BPS, diolah

dibandingkan dengan rerata NTUP Triwulan III 2024. (Grafik 6.19). Namun, NTP Lampung pada akhir Triwulan III 2025 tercatat sebesar 127,82, masih berada di atas NTP Nasional yang sebesar 124,36 (Grafik 6.20).

6.3 KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung berdasarkan data terkini per Maret tahun 2025 terpantau mengalami penurunan sebesar 5,67% (yoy), yaitu sebanyak 941,23 ribu jiwa pada 2024 menjadi 887,02 ribu jiwa pada tahun berjalan. Dari sisi komposisinya, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani. Penduduk miskin yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan tercatat sebesar 74,16%, sedangkan sisanya sebesar 25,83% berada di daerah perkotaan (Grafik 6.21). Dibandingkan dengan Nasional (8,47%), persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif lebih tinggi yakni sebesar 10,00% (Grafik 6.22). Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 jika dibandingkan dengan 9 (sembilan) provinsi lainnya di Sumatera, setelah Provinsi Aceh (12,33%), Provinsi Bengkulu (12,08%), dan Sumatera Selatan (10,15%).

Kemudian, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Provinsi Lampung pada mencapai 229,16 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 6,10% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 244,04 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Provinsi Lampung tercatat sebanyak 657,85 ribu jiwa, walaupun masih memiliki

Grafik 6.21 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Lampung



Sumber: SP2, olahan

Grafik 6.22 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional

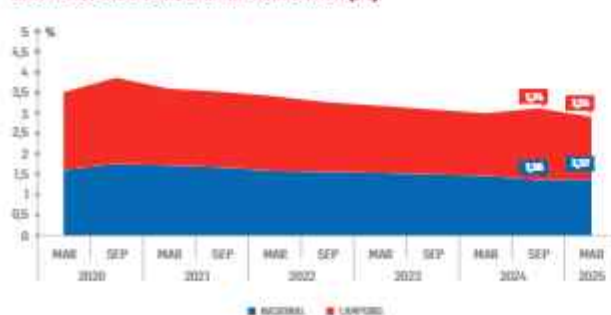


Sumber: SP2, olahan

porsi yang besar, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebanyak 697,19 ribu jiwa, dengan penurunan sebesar 5,64% (yoy).

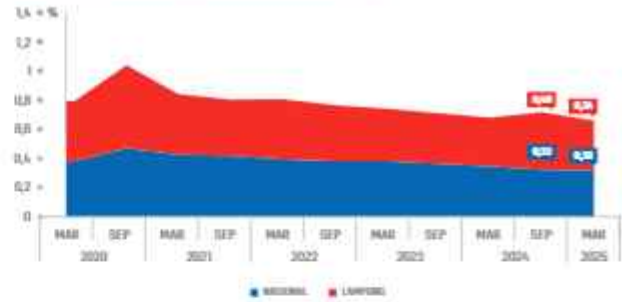
Lebih lanjut, dilihat dari pergerakan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Lampung pada tahun berjalan (dengan data terbaru pada bulan Maret 2025), nilai GK tercatat sebesar Rp612.451 per kapita per bulan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,24 persen dibandingkan dengan semester sebelumnya 2024, serta meningkat 4,42 persen dibandingkan kondisi pada periode yang sama di tahun 2024. GK merupakan faktor lain yang menentukan tingkat kemiskinan selain faktor penghasilan, yaitu batas minimum pengeluaran yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan agar seseorang tidak digolongkan sebagai penduduk miskin.

Grafik 6.23 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



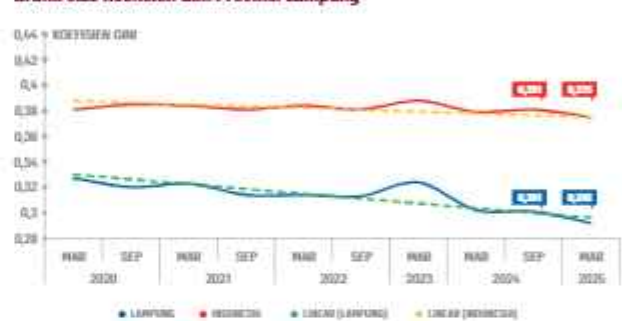
Sumber: SP2, olahan

Grafik 6.24 Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2)



Sumber: SP2, olahan

Grafik 6.25 Koefisien Gini Provinsi Lampung



Sumber: SP2, olahan

Dengan demikian, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis tersebut. Angka GK dipengaruhi oleh komponennya yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pergerakan harga kelompok makanan sebagai komponen utama GKM dengan beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras sebagai komoditas kelompok makanan yang memiliki sumbangan terbesar terhadap GK di kota maupun desa. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Lampung.

Di wilayah perkotaan Provinsi Lampung, sumbangan GKM terhadap GK mencapai 73,83%, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yakni 75,37%. Sebaliknya, sumbangan GKBM tercatat sebesar 26,17% di perkotaan dan 24,63% di perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada semester I 2025, peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan.

Komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap GK pada umumnya sama antara perkotaan dan perdesaan, dengan beras tetap menjadi penyumbang utama, yaitu 19,22% di perkotaan dan 23,09% di perdesaan. Posisi kedua ditempati oleh rokok kretek filter dengan sumbangan 14,80% di perkotaan dan 11,80% di perdesaan. Komoditas penting lainnya meliputi telur ayam ras, cabai rawit, tempe, serta kopi bubuk maupun kopi instan. Di sisi lain, komoditas bukan makanan yang paling besar kontribusinya terhadap GK adalah

perumahan, yakni 7,78% di perkotaan dan 7,94% di pedesaan, diikuti bensin dan listrik. Selanjutnya, kontribusi juga berasal dari kebutuhan pendidikan, perlengkapan mandi, produk perawatan pribadi, sabun cuci, serta pakaian jadi (Tabel 6.3).

Selanjutnya, sampai dengan data terbaru tahun 2025, terlihat perbaikan dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, di mana nilai P1 melambat dari 1,74 menjadi 1,54, dan nilai P2 menurun dari 0,39 menjadi 0,34 (Grafik 6.23 dan 6.24). Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika dilihat menurut wilayah, kondisi di pedesaan relatif lebih berat dibandingkan perkotaan. P1 di perkotaan tercatat sebesar 0,87, sementara di pedesaan tercatat lebih tinggi, yaitu 1,89. Hal yang sama terjadi pada P2, yaitu pada daerah perkotaan sebesar 0,16, sedangkan di pedesaan mencapai 0,43.

Sementara itu, Koefisien Gini tercatat menurun sebesar 0,01 poin, dari indeks 0,30 pada Triwulan III 2024 menjadi sebesar 0,29 pada Triwulan III 2025. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Sejalan dengan Provinsi Lampung, Koefisien Gini Nasional tercatat juga menurun sebesar 0,006 poin dibandingkan dengan semester sebelumnya dengan nilai sebesar 0,381 poin pada Triwulan III 2024 dan 0,375 poin pada Triwulan III 2025 (Grafik 6.25).

Pemerintah Pusat juga masih melanjutkan program dana bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung. Berdasarkan kebijakan dari Kementerian Sosial per Juli 2024, Himbara-BSI menyalurkan dana BSNT PKH Tahap 4 2024 di 512 Kab/Kota, sedangkan PT Pos Indonesia menyalurkan dana bansos PKH Tahap 4 2024 di 514 Kab/Kota, sehingga terdapat 2 Kab/Kota yang disalurkan secara tunai. PKH merupakan salah satu program untuk menurunkan angka

Tabel 6.3 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya

JENIS KOMODITI	KOTA	JENIS KOMODITI	DESA
Makanan	73,83	Makanan	75,37
Beras	18,22	Beras	23,09
Rokok Kretek Filter	14,8	Rokok kretek filter	11,8
Telur Ayam Ras	4,24	Telur ayam ras	4,06
Daging ayam ras	2,57	Cabe rawit	3,32
Tempe	2,5	Kopi	2,47
Cabe rawit	2,48	Tempe	2,37
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,28	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,35
Mie instan	2,23	Bawang merah	2,21
Bukan Makanan	26,17	Bukan Makanan	24,63
Perumahan	7,78	Perumahan	7,94
Bensin	3,76	Bensin	3,51
Listrik	2,75	Listrik	2,16
Pendidikan	2,71	Pendidikan	1,49
Perlengkapan mandi	1,31	Perlengkapan mandi	1,09

Sumber: BPS Provinsi Lampung

kemiskinan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk keluarga kurang mampu, dengan besaran Rp900 ribu hingga Rp3 juta per tahun.

Pada periode triwulan III 2025, penyaluran PKH dilakukan melalui skema non tunai oleh bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) bersama BSI di 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, di satu wilayah dapat terdapat dua atau lebih bank penyalur untuk memastikan keterjangkauan dan kelancaran distribusi. Penyaluran secara berkala secara non tunai tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan tujuan menjaga konsistensi dan ketepatan sasaran dalam mendukung keluarga kurang mampu. (Tabel 6.4).

Tabel 6.4 Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan III 2025

KAB/KOTA	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)
NATURA	POS	-	Rp-	-	Rp-	\$DIV/0%	\$DIV/0%	-	\$DIV/0%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BMRJ	36	Rp27.850.000	36	Rp27.850.000	100,00%	100,00%	30	83,33%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BNI	5	Rp3.350.000	5	Rp3.350.000	100,00%	100,00%	4	80,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	BRI	25.764	Rp19.212.225.000	25.764	Rp19.212.225.000	100,00%	100,00%	24.405	94,73%
KOTA METRO	BMRJ	12	Rp8.700.000	12	Rp8.700.000	100,00%	100,00%	10	83,33%
KOTA METRO	BNI	1	Rp1.800.000	1	Rp1.800.000	100,00%	100,00%	-	0,00%
KOTA METRO	BRI	4.734	Rp3.616.125.000	4.734	Rp3.616.125.000	100,00%	100,00%	4.537	95,84%
LAMPUNG BARAT	BMRJ	11.639	Rp8.345.150.000	11.639	Rp8.345.150.000	100,00%	100,00%	10.584	90,94%
LAMPUNG BARAT	BNI	3	Rp2.075.000	3	Rp2.075.000	100,00%	100,00%	3	100,00%
LAMPUNG BARAT	BRI	15	Rp10.125.000	15	Rp10.125.000	100,00%	100,00%	14	93,33%
LAMPUNG SELATAN	BMRJ	62	Rp41.325.000	62	Rp41.325.000	100,00%	100,00%	54	87,10%
LAMPUNG SELATAN	BNI	5	Rp2.625.000	5	Rp2.625.000	100,00%	100,00%	4	80,00%
LAMPUNG SELATAN	BRI	42.900	Rp30.642.250.000	42.898	Rp30.641.425.000	100,00%	100,00%	41.010	95,60%
LAMPUNG TENGAH	BMRJ	70	Rp47.450.000	70	Rp47.450.000	100,00%	100,00%	52	74,29%
LAMPUNG TENGAH	BNI	9	Rp6.875.000	9	Rp6.875.000	100,00%	100,00%	7	77,78%
LAMPUNG TENGAH	BRI	46.230	Rp33.969.225.000	46.230	Rp33.969.225.000	100,00%	100,00%	44.061	95,31%
LAMPUNG TIMUR	BMRJ	43.693	Rp32.859.850.000	43.693	Rp32.859.850.000	100,00%	100,00%	40.855	93,50%
LAMPUNG TIMUR	BNI	11	Rp6.650.000	11	Rp6.650.000	100,00%	100,00%	9	81,82%
LAMPUNG TIMUR	BRI	47	Rp30.875.000	47	Rp30.875.000	100,00%	100,00%	41	87,23%
LAMPUNG UTARA	BMRJ	33.591	Rp24.677.900.000	33.591	Rp24.677.900.000	100,00%	100,00%	32.362	96,34%
LAMPUNG UTARA	BNI	1	Rp600.000	1	Rp600.000	100,00%	100,00%	-	0,00%
LAMPUNG UTARA	BRI	31	Rp21.375.000	31	Rp21.375.000	100,00%	100,00%	25	80,65%
MESUJI	BMRJ	7.127	Rp6.363.300.000	7.127	Rp6.363.300.000	100,00%	100,00%	6.218	87,25%
MESUJI	BNI	3	Rp1.800.000	3	Rp1.800.000	100,00%	100,00%	2	66,67%
MESUJI	BRI	14	Rp11.150.000	14	Rp11.150.000	100,00%	100,00%	10	71,43%
PESAWARAN	BMRJ	19.900	Rp14.900.950.000	19.900	Rp14.900.950.000	100,00%	100,00%	19.083	95,89%
PESAWARAN	BRI	40	Rp29.375.000	40	Rp29.375.000	100,00%	100,00%	36	90,00%
PESISIR BARAT	BMRJ	2	Rp1.200.000	2	Rp1.200.000	100,00%	100,00%	2	100,00%
PRINGSEWU	BMRJ	22	Rp16.850.000	22	Rp16.850.000	100,00%	100,00%	15	68,18%
PRINGSEWU	BNI	4	Rp1.850.000	4	Rp1.850.000	100,00%	100,00%	3	75,00%
PRINGSEWU	BRI	15.184	Rp11.132.250.000	15.184	Rp11.132.250.000	100,00%	100,00%	14.337	94,42%
TANGGAMUS	BMRJ	28.589	Rp20.864.575.000	28.589	Rp20.864.575.000	100,00%	100,00%	27.013	94,49%
TANGGAMUS	BNI	6	Rp3.800.000	6	Rp3.800.000	100,00%	100,00%	3	50,00%
TANGGAMUS	BRI	29	Rp20.425.000	29	Rp20.425.000	100,00%	100,00%	24	82,76%
TULANG BAWANG	BMRJ	11.752	Rp8.505.175.000	11.752	Rp8.505.175.000	100,00%	100,00%	10.222	86,98%
TULANG BAWANG	BNI	3	Rp3.300.000	3	Rp3.300.000	100,00%	100,00%	3	100,00%
TULANG BAWANG	BRI	25	Rp17.750.000	25	Rp17.750.000	100,00%	100,00%	19	76,00%
TULANG BAWANG BARAT	BMRJ	9.260	Rp7.033.560.000	9.260	Rp7.033.560.000	100,00%	100,00%	8.525	92,06%
TULANG BAWANG BARAT	BNI	7	Rp4.200.000	7	Rp4.200.000	100,00%	100,00%	5	71,43%
TULANG BAWANG BARAT	BRI	11	Rp5.750.000	11	Rp5.750.000	100,00%	100,00%	9	81,82%
WAY KANAN	BMRJ	19.471	Rp14.449.350.000	19.471	Rp14.449.350.000	100,00%	100,00%	18.089	92,90%
WAY KANAN	BNI	2	Rp600.000	2	Rp600.000	100,00%	100,00%	1	50,00%
WAY KANAN	BRI	21	Rp16.200.000	21	Rp16.200.000	100,00%	100,00%	18	85,71%

Tabel 6.5 Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan III 2025

KAB/KOTA	SP2D KEMENSOS					
	TAHAP JULI		TAHAP AGUSTUS		TAHAP SEPTEMBER	
	JUMLAH KPM	NOMINAL RP	JUMLAH KPM	NOMINAL RP	JUMLAH KPM	NOMINAL RP
KOTA BANDAR LAMPUNG	80	16.000.000	80	16.000.000	80	16.000.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	19	3.800.000	19	3.800.000	19	3.800.000
KOTA BANDAR LAMPUNG	45.246	9.049.200.000	45.246	9.049.200.000	45.246	9.049.200.000
KOTA METRO	26	5.200.000	26	5.200.000	26	5.200.000
KOTA METRO	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
KOTA METRO	7.020	1.404.000.000	7.020	1.404.000.000	7.020	1.404.000.000
LAMPUNG BARAT	22.087	4.417.400.000	22.087	4.417.400.000	22.087	4.417.400.000
LAMPUNG BARAT	9	1.800.000	9	1.800.000	9	1.800.000
LAMPUNG BARAT	37	7.400.000	37	7.400.000	37	7.400.000
LAMPUNG SELATAN	129	25.800.000	129	25.800.000	129	25.800.000
LAMPUNG SELATAN	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000
LAMPUNG SELATAN	80.523	16.104.600.000	80.523	16.104.600.000	80.523	16.104.600.000
LAMPUNG TENGAH	175	35.000.000	175	35.000.000	175	35.000.000
LAMPUNG TENGAH	28	5.600.000	28	5.600.000	28	5.600.000
LAMPUNG TENGAH	78.806	15.761.200.000	78.806	15.761.200.000	78.806	15.761.200.000
LAMPUNG TIMUR	69.470	13.894.000.000	69.470	13.894.000.000	69.470	13.894.000.000
LAMPUNG TIMUR	32	6.400.000	32	6.400.000	32	6.400.000
LAMPUNG TIMUR	123	24.600.000	123	24.600.000	123	24.600.000
LAMPUNG UTARA	54.690	10.938.000.000	54.690	10.938.000.000	54.690	10.938.000.000
LAMPUNG UTARA	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000
LAMPUNG UTARA	79	15.800.000	79	15.800.000	79	15.800.000
MESUJI	12.963	2.592.600.000	12.963	2.592.600.000	12.963	2.592.600.000
MESUJI	8	1.600.000	8	1.600.000	8	1.600.000
MESUJI	31	6.200.000	31	6.200.000	31	6.200.000
PESAWARAN	34.233	6.846.600.000	34.233	6.846.600.000	34.233	6.846.600.000
PESAWARAN	6	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000
PESAWARAN	115	23.000.000	115	23.000.000	115	23.000.000
PESISIR BARAT	37	7.400.000	37	7.400.000	37	7.400.000
PESISIR BARAT	7	1.400.000	7	1.400.000	7	1.400.000
PESISIR BARAT	13.791	2.758.200.000	13.791	2.758.200.000	13.791	2.758.200.000
PRINGSEWU	53	10.600.000	53	10.600.000	53	10.600.000
PRINGSEWU	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000
PRINGSEWU	27.672	5.534.400.000	27.672	5.534.400.000	27.672	5.534.400.000
TANGGAMUS	49.378	9.875.600.000	49.378	9.875.600.000	49.378	9.875.600.000
TANGGAMUS	18	3.600.000	18	3.600.000	18	3.600.000
TANGGAMUS	86	17.200.000	86	17.200.000	86	17.200.000
TULANG BAWANG	20.468	4.093.600.000	20.468	4.093.600.000	20.468	4.093.600.000
TULANG BAWANG	9	1.800.000	9	1.800.000	9	1.800.000
TULANG BAWANG	55	11.000.000	55	11.000.000	55	11.000.000
TULANG BAWANG BARAT	15.209	3.041.800.000	15.209	3.041.800.000	15.209	3.041.800.000
TULANG BAWANG BARAT	16	3.200.000	16	3.200.000	16	3.200.000
TULANG BAWANG BARAT	29	5.800.000	29	5.800.000	29	5.800.000
WAY KANAN	35.781	7.156.200.000	35.781	7.156.200.000	35.781	7.156.200.000
WAY KANAN	8	1.600.000	8	1.600.000	8	1.600.000
WAY KANAN	57	11.400.000	57	11.400.000	57	11.400.000

KAB/KOTA	PENYALURAN											
	TAHAP JULI				TAHAP AGUSTUS				TAHAP SEPTEMBER			
	JUMLAH KPM	%	NOMINAL RP	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL RP	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL RP	%
KOTA BANDAR LAMPUNG	80	100,00%	16.000.000	100,00%	80	100,00%	16.000.000	100,00%	80	100,00%	16.000.000	100,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	19	100,00%	3.800.000	100,00%	19	100,00%	3.800.000	100,00%	19	100,00%	3.800.000	100,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	45.246	100,00%	9.049.200.000	100,00%	45.246	100,00%	9.049.200.000	100,00%	45.246	100,00%	9.049.200.000	100,00%
KOTA METRO	26	100,00%	5.200.000	100,00%	26	100,00%	5.200.000	100,00%	26	100,00%	5.200.000	100,00%
KOTA METRO	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%	5	100,00%	1.000.000	100,00%
KOTA METRO	7.020	100,00%	1.404.000.000	100,00%	7.020	100,00%	1.404.000.000	100,00%	7.020	100,00%	1.404.000.000	100,00%
LAMPUNG BARAT	22.087	100,00%	4.417.400.000	100,00%	22.087	100,00%	4.417.400.000	100,00%	22.087	100,00%	4.417.400.000	100,00%
LAMPUNG BARAT	9	100,00%	1.800.000	100,00%	9	100,00%	1.800.000	100,00%	9	100,00%	1.800.000	100,00%
LAMPUNG BARAT	37	100,00%	7.400.000	100,00%	37	100,00%	7.400.000	100,00%	37	100,00%	7.400.000	100,00%
LAMPUNG SELATAN	129	100,00%	25.800.000	100,00%	129	100,00%	25.800.000	100,00%	129	100,00%	25.800.000	100,00%
LAMPUNG SELATAN	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%	30	100,00%	6.000.000	100,00%
LAMPUNG SELATAN	80.523	100,00%	16.104.600.000	100,00%	80.523	100,00%	16.104.600.000	100,00%	80.523	100,00%	16.104.600.000	100,00%
LAMPUNG TENGAH	175	100,00%	35.000.000	100,00%	175	100,00%	35.000.000	100,00%	175	100,00%	35.000.000	100,00%
LAMPUNG TENGAH	28	100,00%	5.600.000	100,00%	28	100,00%	5.600.000	100,00%	28	100,00%	5.600.000	100,00%
LAMPUNG TENGAH	78.806	100,00%	15.761.000.000	100,00%	78.806	100,00%	15.761.000.000	100,00%	78.806	100,00%	15.761.000.000	100,00%
LAMPUNG TIMUR	69.470	100,00%	13.894.000.000	100,00%	69.470	100,00%	13.894.000.000	100,00%	69.470	100,00%	13.894.000.000	100,00%
LAMPUNG TIMUR	32	100,00%	6.400.000	100,00%	32	100,00%	6.400.000	100,00%	32	100,00%	6.400.000	100,00%
LAMPUNG TIMUR	123	100,00%	24.600.000	100,00%	123	100,00%	24.600.000	100,00%	123	100,00%	24.600.000	100,00%
LAMPUNG UTARA	54.690	100,00%	10.938.000.000	100,00%	54.690	100,00%	10.938.000.000	100,00%	54.690	100,00%	10.938.000.000	100,00%
LAMPUNG UTARA	12	100,00%	2.400.000	100,00%	12	100,00%	2.400.000	100,00%	12	100,00%	2.400.000	100,00%
LAMPUNG UTARA	79	100,00%	15.800.000	100,00%	79	100,00%	15.800.000	100,00%	79	100,00%	15.800.000	100,00%
MESUJI	12.963	100,00%	2.592.600.000	100,00%	12.963	100,00%	2.592.600.000	100,00%	12.963	100,00%	2.592.600.000	100,00%
MESUJI	8	100,00%	1.600.000	100,00%	8	100,00%	1.600.000	100,00%	8	100,00%	1.600.000	100,00%
MESUJI	31	100,00%	6.200.000	100,00%	31	100,00%	6.200.000	100,00%	31	100,00%	6.200.000	100,00%
PESAWARAN	34.233	100,00%	6.846.600.000	100,00%	34.233	100,00%	6.846.600.000	100,00%	34.233	100,00%	6.846.600.000	100,00%
PESAWARAN	6	100,00%	1.200.000	100,00%	6	100,00%	1.200.000	100,00%	6	100,00%	1.200.000	100,00%
PESAWARAN	115	100,00%	23.000.000	100,00%	115	100,00%	23.000.000	100,00%	115	100,00%	23.000.000	100,00%
PESISIR BARAT	37	100,00%	7.400.000	100,00%	37	100,00%	7.400.000	100,00%	37	100,00%	7.400.000	100,00%
PESISIR BARAT	7	100,00%	1.400.000	100,00%	7	100,00%	1.400.000	100,00%	7	100,00%	1.400.000	100,00%
PESISIR BARAT	13.791	100,00%	2.758.200.000	100,00%	13.791	100,00%	2.758.200.000	100,00%	13.791	100,00%	2.758.200.000	100,00%
PRINGSEWU	53	100,00%	10.600.000	100,00%	53	100,00%	10.600.000	100,00%	53	100,00%	10.600.000	100,00%
PRINGSEWU	12	100,00%	2.400.000	100,00%	12	100,00%	2.400.000	100,00%	12	100,00%	2.400.000	100,00%
PRINGSEWU	27.672	100,00%	5.534.400.000	100,00%	27.672	100,00%	5.534.400.000	100,00%	27.672	100,00%	5.534.400.000	100,00%
TANGGAMUS	49.378	100,00%	9.875.600.000	100,00%	49.378	100,00%	9.875.600.000	100,00%	49.378	100,00%	9.875.600.000	100,00%
TANGGAMUS	18	100,00%	3.600.000	100,00%	18	100,00%	3.600.000	100,00%	18	100,00%	3.600.000	100,00%
TANGGAMUS	86	100,00%	17.200.000	100,00%	86	100,00%	17.200.000	100,00%	86	100,00%	17.200.000	100,00%
TULANG BAWANG	20.468	100,00%	4.093.600.000	100,00%	20.468	100,00%	4.093.600.000	100,00%	20.468	100,00%	4.093.600.000	100,00%
TULANG BAWANG	9	100,00%	1.800.000	100,00%	9	100,00%	1.800.000	100,00%	9	100,00%	1.800.000	100,00%
TULANG BAWANG	56	100,00%	11.000.000	100,00%	56	100,00%	11.000.000	100,00%	56	100,00%	11.000.000	100,00%
TULANG BAWANG BARAT	15.209	100,00%	3.041.800.000	100,00%	15.209	100,00%	3.041.800.000	100,00%	15.209	100,00%	3.041.800.000	100,00%
TULANG BAWANG BARAT	16	100,00%	3.200.000	100,00%	16	100,00%	3.200.000	100,00%	16	100,00%	3.200.000	100,00%
TULANG BAWANG BARAT	29	100,00%	5.800.000	100,00%	29	100,00%	5.800.000	100,00%	29	100,00%	5.800.000	100,00%
WAY KANAN	35.781	100,00%	7.156.200.000	100,00%	35.781	100,00%	7.156.200.000	100,00%	35.781	100,00%	7.156.200.000	100,00%
WAY KANAN	8	100,00%	1.600.000	100,00%	8	100,00%	1.600.000	100,00%	8	100,00%	1.600.000	100,00%
WAY KANAN	57	100,00%	11.400.000	100,00%	57	100,00%	11.400.000	100,00%	57	100,00%	11.400.000	100,00%

KAB/KOTA	PENYERAPAN											
	TAHAP JULI				TAHAP AGUSTUS				TAHAP SEPTEMBER			
	JUMLAH KPM	%	NOMINAL RP	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL RP	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL RP	%
KOTA BANDAR LAMPUNG	76	95,00%	15.200.000	95,00%	76	95,00%	15.200.000	95,00%	76	95,00%	15.200.000	95,00%
KOTA BANDAR LAMPUNG	16	84,21%	3.200.000	84,21%	16	84,21%	3.200.000	84,21%	16	84,21%	3.200.000	84,21%
KOTA BANDAR LAMPUNG	44.265	97,83%	8.853.000.000	97,83%	44.265	97,83%	8.853.000.000	97,83%	44.265	97,83%	8.853.000.000	97,83%
KOTA METRO	23	88,46%	4.800.000	88,46%	23	88,46%	4.800.000	88,46%	23	88,46%	4.800.000	88,46%
KOTA METRO	3	60,00%	600.000	60,00%	3	60,00%	600.000	60,00%	3	60,00%	600.000	60,00%
KOTA METRO	6.852	97,61%	1.370.400.000	97,61%	6.852	97,61%	1.370.400.000	97,61%	6.852	97,61%	1.370.400.000	97,61%
LAMPUNG BARAT	21.048	95,30%	4.209.600.000	95,30%	21.048	95,30%	4.209.600.000	95,30%	21.048	95,30%	4.209.600.000	95,30%
LAMPUNG BARAT	6	66,67%	1.200.000	66,67%	6	66,67%	1.200.000	66,67%	6	66,67%	1.200.000	66,67%
LAMPUNG BARAT	32	86,49%	6.400.000	86,49%	32	86,49%	6.400.000	86,49%	32	86,49%	6.400.000	86,49%
LAMPUNG SELATAN	115	89,15%	23.000.000	89,15%	115	89,15%	23.000.000	89,15%	115	89,15%	23.000.000	89,15%
LAMPUNG SELATAN	19	63,33%	3.800.000	63,33%	19	63,33%	3.800.000	63,33%	19	63,33%	3.800.000	63,33%
LAMPUNG SELATAN	78.724	97,77%	15.744.800.000	97,77%	78.724	97,77%	15.744.800.000	97,77%	78.724	97,77%	15.744.800.000	97,77%
LAMPUNG TENGAH	144	82,29%	28.800.000	82,29%	144	82,29%	28.800.000	82,29%	144	82,29%	28.800.000	82,29%
LAMPUNG TENGAH	23	82,14%	4.800.000	82,14%	23	82,14%	4.800.000	82,14%	23	82,14%	4.800.000	82,14%
LAMPUNG TENGAH	77.133	97,88%	15.426.600.000	97,88%	77.133	97,88%	15.426.600.000	97,88%	77.133	97,88%	15.426.600.000	97,88%
LAMPUNG TIMUR	67.636	97,36%	13.527.200.000	97,36%	67.636	97,36%	13.527.200.000	97,36%	67.636	97,36%	13.527.200.000	97,36%
LAMPUNG TIMUR	21	65,63%	4.200.000	65,63%	21	65,63%	4.200.000	65,63%	21	65,63%	4.200.000	65,63%
LAMPUNG TIMUR	106	86,18%	21.200.000	86,18%	106	86,18%	21.200.000	86,18%	106	86,18%	21.200.000	86,18%
LAMPUNG UTARA	53.597	98,00%	10.719.400.000	98,00%	53.597	98,00%	10.719.400.000	98,00%	53.597	98,00%	10.719.400.000	98,00%
LAMPUNG UTARA	8	66,67%	1.600.000	66,67%	8	66,67%	1.600.000	66,67%	8	66,67%	1.600.000	66,67%
LAMPUNG UTARA	64	81,01%	12.800.000	81,01%	64	81,01%	12.800.000	81,01%	64	81,01%	12.800.000	81,01%
MESUJI	12.564	96,92%	2.512.800.000	96,92%	12.564	96,92%	2.512.800.000	96,92%	12.564	96,92%	2.512.800.000	96,92%
MESUJI	6	75,00%	1.200.000	75,00%	6	75,00%	1.200.000	75,00%	6	75,00%	1.200.000	75,00%
MESUJI	25	80,65%	5.000.000	80,65%	25	80,65%	5.000.000	80,65%	25	80,65%	5.000.000	80,65%
PESAWARAN	33.641	98,27%	6.728.200.000	98,27%	33.641	98,27%	6.728.200.000	98,27%	33.641	98,27%	6.728.200.000	98,27%
PESAWARAN	4	66,67%	800.000	66,67%	4	66,67%	800.000	66,67%	4	66,67%	800.000	66,67%
PESAWARAN	106	91,30%	21.000.000	91,30%	106	91,30%	21.000.000	91,30%	106	91,30%	21.000.000	91,30%
PESISIR BARAT	28	75,68%	5.600.000	75,68%	28	75,68%	5.600.000	75,68%	28	75,68%	5.600.000	75,68%
PESISIR BARAT	7	100,00%	1.400.000	100,00%	7	100,00%	1.400.000	100,00%	7	100,00%	1.400.000	100,00%
PESISIR BARAT	12.950	93,90%	2.590.000.000	93,90%	12.950	93,90%	2.590.000.000	93,90%	12.950	93,90%	2.590.000.000	93,90%
PRINGSEWU	46	86,79%	9.200.000	86,79%	46	86,79%	9.200.000	86,79%	46	86,79%	9.200.000	86,79%
PRINGSEWU	6	50,00%	1.200.000	50,00%	6	50,00%	1.200.000	50,00%	6	50,00%	1.200.000	50,00%
PRINGSEWU	26.980	97,50%	5.396.000.000	97,50%	26.980	97,50%	5.396.000.000	97,50%	26.980	97,50%	5.396.000.000	97,50%
TANGGAMUS	48.398	98,02%	9.679.600.000	98,02%	48.398	98,02%	9.679.600.000	98,02%	48.398	98,02%	9.679.600.000	98,02%
TANGGAMUS	6	33,33%	1.200.000	33,33%	6	33,33%	1.200.000	33,33%	6	33,33%	1.200.000	33,33%
TANGGAMUS	73	84,88%	14.600.000	84,88%	73	84,88%	14.600.000	84,88%	73	84,88%	14.600.000	84,88%
TULANG BAWANG	19.859	97,02%	3.971.800.000	97,02%	19.859	97,02%	3.971.800.000	97,02%	19.859	97,02%	3.971.800.000	97,02%
TULANG BAWANG	7	77,78%	1.400.000	77,78%	7	77,78%	1.400.000	77,78%	7	77,78%	1.400.000	77,78%
TULANG BAWANG	47	85,45%	9.400.000	85,45%	47	85,45%	9.400.000	85,45%	47	85,45%	9.400.000	85,45%
TULANG BAWANG BARAT	14.801	97,32%	2.960.200.000	97,32%	14.801	97,32%	2.960.200.000	97,32%	14.801	97,32%	2.960.200.000	97,32%
TULANG BAWANG BARAT	11	68,75%	2.200.000	68,75%	11	68,75%	2.200.000	68,75%	11	68,75%	2.200.000	68,75%
TULANG BAWANG BARAT	23	79,31%	4.600.000	79,31%	23	79,31%	4.600.000	79,31%	23	79,31%	4.600.000	79,31%
WAY KANAN	34.947	97,67%	6.989.400.000	97,67%	34.947	97,67%	6.989.400.000	97,67%	34.947	97,67%	6.989.400.000	97,67%
WAY KANAN	5	62,50%	1.000.000	62,50%	5	62,50%	1.000.000	62,50%	5	62,50%	1.000.000	62,50%
WAY KANAN	44	77,19%	8.800.000	77,19%	44	77,19%	8.800.000	77,19%	44	77,19%	8.800.000	77,19%





Prospek Perekonomian

- **Ekonomi global pada 2025–2026 diperkirakan tumbuh moderat masing-masing 3,2% dan 3,1%, sedikit membaik dari proyeksi sebelumnya namun masih di bawah rata-rata prapandemi di tengah ketidakpastian perdagangan dan geopolitik.** Pertumbuhan negara maju tetap terbatas, sementara negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India menjadi penopang utama, dengan ASEAN-5 stabil pada kisaran 4,1–4,2%. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh solid sebesar 4,9% pada 2025–2026, ditopang konsumsi yang terjaga, investasi yang meningkat, serta bauran kebijakan fiskal–moneter yang tetap hati-hati (*pro stability*) namun mendukung pertumbuhan (*pro growth*).
- **Perekonomian Lampung 2025 diperkirakan tumbuh 4,9–5,5%, ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring kenaikan UMP, serta investasi swasta pasca pemilu.** Dari sisi lapangan usaha, perbaiki kinerja pertanian dan perkebunan, berlanjutnya proyek konstruksi, serta kuatnya industri pengolahan menopang pertumbuhan, meski risiko perlambatan ekspor akibat ketidakpastian global masih perlu diwaspadai.
- **Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1%.** Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan [GNPIP].

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Nasional

Prospek perekonomian global menunjukkan perbaikan yang lebih kuat dibandingkan proyeksi sebelumnya, meskipun pemulihan masih berlangsung secara bertahap di tengah ketidakpastian struktural yang tinggi. Berdasarkan *World Economic Outlook (WEO)* IMF edisi Oktober 2025, ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh 3,2% pada 2025 dan 3,1% pada 2026, masing-masing direvisi naik 0,2 poin dan tidak berubah dibandingkan WEO Juli 2025. Revisi kenaikan ini mencerminkan membaiknya sentimen global seiring moderasi inflasi, pelemahan dolar AS yang mendorong pemulihan perdagangan internasional, serta stabilisasi pasar keuangan global setelah fase volatilitas pada semester pertama 2025. Kendati demikian, tingkat pertumbuhan global masih berada di bawah rerata historis prapandemi (3,7%), sehingga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dunia tetap menghadapi hambatan struktural dan geopolitik yang belum mereda.

Prospek pertumbuhan negara maju menunjukkan perbaikan yang terbatas, menandakan pemulihan yang masih tertahan oleh tekanan domestik dan ketidakpastian global. Di Amerika Serikat, pertumbuhan diproyeksikan mencapai 2,0% pada 2025 dan meningkat sedikit menjadi 2,1% pada 2026, masing-masing direvisi naik 0,1 poin, didukung pasar tenaga kerja yang tetap resilien dan stimulus fiskal yang masih berjalan, meskipun tekanan inflasi dan arah kebijakan suku bunga The Fed tetap menjadi faktor pembatas. Di kawasan euro, pemulihan jangka pendek menunjukkan sinyal perbaikan dengan proyeksi pertumbuhan 1,2% pada 2025, revisi naik 0,2 poin ditopang oleh normalisasi inflasi, menurunnya tekanan biaya energi, dan perbaikan bertahap daya beli rumah tangga. Namun demikian, prospek 2026 diturunkan menjadi 1,1%, atau revisi turun 0,1 poin, mencerminkan pemulihan yang belum kuat di tengah ruang fiskal yang terbatas dan moderasi permintaan eksternal. Sementara itu, Jepang diproyeksikan tumbuh 1,1% pada 2025, direvisi naik 0,4 poin, namun kembali melambat ke 0,6% pada 2026, sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang masih lemah serta ketergantungan yang tinggi pada ekspor sebagai pendorong utama pertumbuhan.

Di sisi lain, negara berkembang tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan global, meski tidak lepas dari tekanan eksternal dan perlambatan struktural. Tiongkok diproyeksikan tumbuh 4,8% pada 2025 dan 4,2% pada 2026, didorong perbaikan ekspor manufaktur, depresiasi renminbi yang meningkatkan daya saing, serta stimulus kebijakan yang progresif. India tetap menjadi titik terang dengan proyeksi pertumbuhan 6,6% pada 2025 dan 6,2% pada 2026, meski terdapat revisi turun 0,2 poin untuk 2026 seiring penyesuaian komposisi permintaan domestik dan basis pertumbuhan yang tinggi. Kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) diperkirakan tumbuh stabil pada 4,2% pada 2025 dan 4,1% pada 2026, dengan revisi naik 0,1 poin untuk 2025, didukung

pemulihan mobilitas, penguatan konsumsi domestik, serta *rebound* pada aktivitas manufaktur dan perdagangan intra-kawasan.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Berdasarkan *World Economic Outlook (WEO)* IMF edisi Oktober 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 4,9% pada 2025 dan 2026. Proyeksi tersebut direvisi naik 0,1 poin untuk masing-masing tahun dibandingkan WEO Juli 2025, mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap kuat. Revisi ke atas ini didorong oleh beberapa faktor fundamental, termasuk konsumsi rumah tangga yang terjaga, didukung stabilitas inflasi dan perbaikan pendapatan investasi yang meningkat seiring penguatan minat investor; serta bauran kebijakan fiskal-moneter yang tetap berhati-hati namun suportif dalam menjaga stabilitas (*pro stability*) dan mendorong aktivitas ekonomi (*pro growth*). Di sisi eksternal, normalisasi permintaan global dan penyesuaian harga komoditas ekspor utama masih menjadi risiko yang perlu dicermati, namun dampaknya relatif tertahan oleh diversifikasi pasar ekspor dan ketahanan sektor manufaktur domestik.

Dalam rangka mendukung prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Bank Indonesia terus terus memperkuat sinergi respons kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, dan berbagai pihak. Kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap diarahkan pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan (*pro stability & pro growth*). Sementara itu empat kebijakan lainnya, meliputi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan (*pro growth*).

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

WILAYAH/NEGARA	WEO Oktober 2025 [%]			Revisi dari WEO Juli 2025 [%]	
	2024	2025F	2026F	2025F	2026F
Dunia	3,30	3,20	3,10	0,20	0,00
Negara Maju	1,80	1,60	1,60	0,10	0,00
Amerika Serikat	2,60	2,00	2,10	0,10	0,10
Kawasan Euro	0,90	1,20	1,10	0,20	-0,1
Jepang	0,20	1,10	0,60	0,40	0,10
Negara Berkembang	4,30	4,20	4,00	0,10	0,00
Tiongkok	5,00	4,80	4,20	0,00	0,00
India	6,50	6,60	6,20	0,20	-0,2
Indonesia	5,00	4,90	4,90	0,10	0,10
ASEAN-5	4,60	4,20	4,10	0,10	0,00
Sub-Sahara Afrika	4,00	4,10	4,40	0,10	0,10
Inflasi Dunia	5,6	4,2	3,7	0,00	0,10
Volume Perdagangan Dunia	3,5	3,6	2,3	1,00	0,40

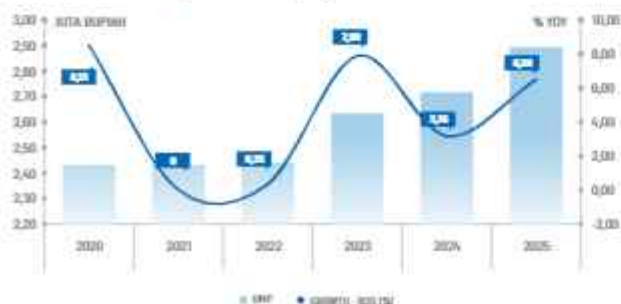
Sumber: IMF *World Economic Outlook* Oktober 2025

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9 – 5,5%, didukung prospek kenaikan permintaan domestik dan kinerja lapangan usaha utama. Kinerja permintaan domestik diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan UMP dan berakhirnya ketidakpastian pasca puncak penyelenggaraan pemilu yang berpotensi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diperkirakan akan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung di tahun 2025, hal ini didukung dengan perbaikan kondisi cuaca dan implementasi program strategis pemerintah dalam rangka mendorong swasembada pada pangan. Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area BPS (Amatan Agustus 2025), hingga Oktober 2025, produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Lampung diperkirakan mencapai 2,98 juta ton atau naik 14,10% (c-t-c) dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Dorongan penggunaan bibit unggul, akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi, dan realisasi perbaikan jaringan irigasi yang telah dilaksanakan sejak awal tahun diperkirakan mampu mendukung prospek peningkatan produksi tanaman pangan di Provinsi Lampung hingga akhir tahun.

Dari sisi permintaan domestik, kinerja konsumsi dan investasi diperkirakan meningkat didukung potensi penguatan daya beli dan kepastian dunia usaha. Pada tahun 2025, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan tetap kuatnya optimisme konsumen. Hal tersebut didukung didukung dengan penetapan kenaikan upah minimum Provinsi Lampung sebesar 6,5%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun sebelumnya yang sebesar 3,18% (Grafik 7.1). Sejalan dengan itu, optimisme konsumen diperkirakan terjaga dalam zona optimis (>100). Mengawali 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung pada Januari 2025 tercatat sebesar 140, tertinggi dibandingkan IKK periode Januari dalam 5 tahun terakhir. Prospek pendapatan yang lebih baik juga di didukung dengan meningkatnya optimisme pelaku usaha seiring tetap kuatnya permintaan domestik dan ekspor, serta penurunan harga minyak dunia yang berpotensi mendukung efisiensi produksi. Prakiraan tersebut tecermin dari hasil liaison Kantor Perwakilan

Grafik 7.1 Perkembangan UMP Lampung



Sumber: BPS, statistik

Tabel 7.2. Proyeksi Indikator Makroekonomi Provinsi Lampung

INDIKATOR	2024	2025-1	2026-1
Pertumbuhan Ekonomi (% C-t-C)	4,57	4,9 - 5,5	4,9-5,7%
Inflasi (% YoY)	1,57	2,5 + 1	2,5 + 1

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tabel 7.3. Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung

KOMODITAS UTAMA		SATUAN	2024	2025-1	2026-1
EKSPOR	Minyak Kelapa Sawit	USD/mt	963,00	1020,00	1061,00
	Kopi Robusta	USD/kg	4,41	4,80	4,70
	Batubara	USD/mt	136,10	107,00	100,00
IMPOR	Pupuk	Indeks	117,60	134,90	124,80
	Gula	USD/kg	0,45	0,38	0,37
	Energi	Indeks	101,50	88,90	79,90

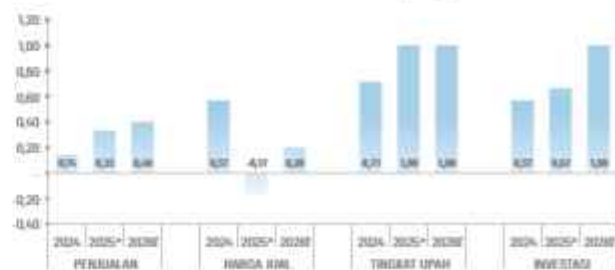
Sumber: World Bank Commodity Outlook (Oktober 2025)

Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menunjukkan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap kenaikan penjualan, tingkat upah, dan efisiensi harga jual pada tahun 2025 (Grafik 7.2).

Berakhirnya ketidakpastian pasca puncak Pemilu memberikan ruang bagi peningkatan kinerja investasi pada 2025. Prospek investasi diperkirakan membaik seiring kembali bergulirnya aktivitas investasi swasta setelah meredanya ketidakpastian terkait transisi pemerintahan baru. Optimisme pelaku usaha juga tetap kuat, tercermin dari naiknya ekspektasi realisasi investasi berdasarkan hasil liaison KPwBI Provinsi Lampung (Grafik 7.2). Sejumlah rencana ekspansi, termasuk eksplorasi dan pembangunan sumur produksi baru pada subsektor penggalian gas di Kabupaten Tanggamus, serta berbagai proyek prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, turut memperkuat prospek peningkatan investasi pada tahun laporan. Di sisi lain, investasi bangunan yang bersumber dari belanja pemerintah diperkirakan melambat sejalan dengan realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Provinsi Lampung.

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2025 diperkirakan melambat sejalan dengan penurunan pagu belanja pemerintah. Pada tahun 2025, pagu belanja pemerintah di Provinsi

Grafik 7.2 Likert Scale Liaison KPwBI Provinsi Lampung 2025



Sumber: Bank Indonesia, statistik

Grafik 7.3 Perubahan Konsumsi Batubara Dunia

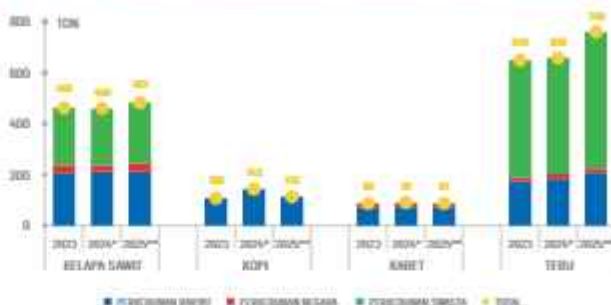


Sumber: The International Energy Agency

Lampung mengalami penurunan sebesar 8,41% dari pagu belanja tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi hampir pada seluruh akun, terutama belanja transfer, belanja modal dan belanja operasional. Penurunan belanja transfer dan belanja modal pada tahun 2025 sejalan dengan realokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN 2025. Sementara itu, penurunan pagu belanja operasional terutama disebabkan oleh normalisasi belanja barang dan jasa, serta belanja hibah pasca puncak penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun sebelumnya. Dari sisi belanja pemerintah pusat, pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada tahun 2025 juga mengalami penurunan, baik belanja pemerintah pusat (BPP) maupun transfer ke daerah (TKD) sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Lampung diperkirakan tetap solid namun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama bersumber dari normalisasi harga batubara serta ketidakpastian perdagangan global yang masih tinggi, meskipun beberapa komoditas unggulan lain masih menunjukkan prospek harga yang positif. Merujuk *World Commodity Price* yang dirilis World Bank pada Oktober 2025, harga internasional minyak kelapa sawit dan kopi robusta diperkirakan meningkat moderat pada 2025 sejalan dengan permintaan yang tetap kuat, sementara harga batubara diproyeksikan melemah seiring transisi energi global. Harga minyak kelapa sawit dunia pada 2025 diperkirakan rata-rata USD 1.020/mt, naik dari 2024 (USD 963/mt), ditopang oleh implementasi program biodiesel Indonesia serta potensi pengisian kembali stok CPO di Tiongkok dan India, meski tertahan oleh prospek peningkatan produksi TBS di negara produsen utama dan pasokan minyak nabati alternatif. Harga kopi robusta diproyeksikan relatif tinggi di kisaran USD 4,80/kg, mencerminkan pasokan global yang masih ketat meski produksi membaik di Vietnam dan Brasil, dengan risiko perlambatan produksi di Lampung seiring berakhirnya siklus optimal empat tahunan. Sementara itu, harga batubara internasional diperkirakan turun ke USD 1007/mt pada 2025, tertekan prospek penurunan konsumsi global di tengah akselerasi transisi energi, terutama di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (Grafik 7.3).

Grafik 7.4 Prognosa Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Lampung



Sumber: The International Energy Agency

Lambung lanjut, meningkatnya ketidakpastian global, terutama pasca pengumuman tarif resiprokal oleh Amerika Serikat meningkatkan risiko perlambatan ekspor pada tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan cukup besarnya eksposur ekspor Lampung terhadap pasar Amerika Serikat, ditunjukkan oleh pangsa Amerika Serikat terhadap total ekspor luar negeri Lampung yang mencapai sekitar 16%, terutama untuk komoditas kopi robusta, olahan buah, serta ikan dan udang.

Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik turut tecermin dari sisi lapangan usaha, terutama didukung perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2025, kondisi cuaca yang lebih kondusif dan normalisasi dampak fenomena El Nino berpotensi mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, terutama padi di Provinsi Lampung. Perbaikan produksi tanaman pangan juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan. Program ketahanan pangan di Provinsi Lampung untuk tahun 2025 difokuskan pada intensifikasi pertanian, baik melalui optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul dan dukungan akses terhadap pupuk bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, terdapat setidaknya 38,95 ribu hektar potensi lahan rawa dan 88,03 ribu hektar lahan tadah hujan di Provinsi Lampung yang dapat dioptimalkan untuk memberikan tambahan produksi sebesar 656,91 ribu ton GKG atau setara 426,99 ribu ton beras. Lebih lanjut, dari subsektor perkebunan, produksi kelapa sawit diperkirakan meningkat pada tahun 2025, utamanya sebagai dampak perluasan lahan pasca berakhirnya moratorium pada 2021. Adapun Produksi perkebunan tebu juga diperkirakan meningkat seiring potensi penambahan luas areal tanam perkebunan swasta. Sementara itu, prospek produksi kopi robusta diperkirakan tetap kuat didukung perluasan sistem tanam pagar alam yang berpotensi meningkatkan produktivitas tanaman kopi.

Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi pada tahun 2025 diperkirakan meningkat, sejalan dengan prospek perbaikan investasi dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Penguatan ini terutama ditopang oleh sejumlah proyek pemerintah yang bersifat *carry over* ke tahun 2025, termasuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan

Kampung Nelayan Merah Putih, serta penyelesaian berbagai sarana dan prasarana publik seperti perbaikan jalan dan fasilitas layanan dasar. Di luar proyek berlanjut, beberapa inisiatif pembangunan baru juga berpotensi memasuki tahap konstruksi pada 2025, antara lain pengembangan Kawasan Kotabaru Lampung, pembangunan jalan tol Pelabuhan Panjang-Lematang, serta program rumah rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, meningkatnya kepastian dunia usaha dan tren kenaikan perjalanan wisata ke Lampung diperkirakan mendorong aktivitas pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya.

Prospek peningkatan permintaan domestik pada tahun 2025 mendukung tetap kuatnya kinerja LU Industri Pengolahan, namun risiko penurunan permintaan global perlu diwaspadai. Kinerja LU Industri pengolahan pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik, sejalan dengan prospek peningkatan produksi TBS kelapa sawit, implementasi kebijakan B40 dan penguatan konsumsi rumah tangga. Perkembangan tersebut berpotensi mendorong optimalisasi utilisasi faktor produksi industri pengolahan minyak kelapa sawit. Meski utilisasi faktor produksi untuk LU Industri Pengolahan sudah mencapai 80 - 90% pada tahun 2024, namun masih terdapat ruang yang dapat dioptimalkan. Pada subsektor industri makanan dan minuman, kinerja industri pengolahan gula diperkirakan tetap kuat didukung oleh persediaan bahan baku yang lebih memadai seiring prospek kenaikan produksi tebu, meski kuota impor gula rafinasi mengalami penurunan dari 3,8 juta ton pada tahun 2024 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2025 (Grafik 7.4). Di sisi lain, prospek perlambatan ekonomi global, utamanya di Amerika Serikat, Tiongkok dan India berpotensi menahan permintaan ekspor produk industri pengolahan Lampung (Tabel 1). Dari sisi domestik, permintaan untuk industri percetakan dan pakaian jadi diperkirakan melambat seiring potensi penurunan permintaan pasca puncak Pemilu dan Pilkada di tahun sebelumnya.

Selanjutnya, kinerja LU yang memiliki keterkaitan tinggi dengan mobilitas diperkirakan tetap kuat meski termoderasi. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) di tahun 2025 diperkirakan melambat seiring normalisasi perdagangan komoditas pangan antar daerah. Normalisasi dampak El Nino berpotensi mendorong perbaikan produksi pertanian secara nasional dan mengurangi permintaan komoditas pangan Provinsi Lampung dari daerah lain, terutama Pulau Jawa. Meski melambat, pertumbuhan LU PBE pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat, utamanya didukung oleh kinerja penjualan kendaraan bermotor lebih baik seiring prospek perbaikan pendapatan dan dukungan insentif fiskal sebesar 3% atas Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk penjualan mobil hybrid electric vehicle (HEV). Sejalan dengan LU PBE, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan (Trasgud) diperkirakan melambat, terutama disebabkan oleh mulai terbatasnya kenaikan mobilitas masyarakat setelah mencapai puncaknya pasca pandemi Covid-19 dan pembukaan jalan tol

Selain itu, jumlah hari libur tahun 2025 yang tidak sebanyak tahun sebelumnya juga berpotensi menyebabkan melambatnya mobilitas masyarakat. Adapun volume pengangkutan batubara melalui KAI Logistik Sumatera Selatan - Lampung juga diperkirakan mengalami perlambatan sejalan dengan prospek penurunan permintaan ekspor batubara.

7.2. PROSPEK INFLASI

Inflasi Dunia dan Nasional

Tingkat inflasi global diperkirakan menurun pada tahun 2025 hingga tahun 2026, seiring dengan penurunan harga komoditas global termasuk harga minyak dunia. IMF pada Oktober 2025 merevisi kembali prakiraan tingkat inflasi global yang menurun menjadi 4,2% dari prakiraan sebelumnya 4,3% pada tahun 2025 dan menjadi 3,7% pada tahun 2026 yang sebelumnya diperkirakan 3,6%. IMF menilai bahwa risiko kenaikan inflasi akan terus berlanjut seiring dengan peningkatan dari *administered prices* serta mulai diberlakukannya tarif yang dibebankan ke konsumen. Negara yang mengenakan tarif diperkirakan akan mengalami *shock* dari sisi penawaran karena produktivitas turun dan biaya produksi naik. Sebaliknya, negara yang dikenai tarif akan menghadapi *shock* dari sisi permintaan akibat melemahnya permintaan ekspor, sehingga menekan tingkat harga. Di sisi lain, *World Bank* memprakirakan tingkat inflasi global berada di level rata-rata 2,9% pada tahun 2025 - 2026, meningkat dari prakiraan sebelumnya yaitu 2,7%. Hal ini sejalan dengan kisaran target inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia yang memiliki target sebesar 2,5±1%. Pada skenario dasar, penurunan pada tingkat inflasi diperkirakan didorong oleh penurunan harga komoditas inflasi inti terutama pada sektor jasa, melemahnya pasar tenaga kerja, melambatnya kenaikan tingkat upah, disertai dengan penurunan lebih lanjut pada harga komoditas. Salah satunya harga minyak dunia yang pada tahun 2024 memiliki rata-rata sebesar USD80/bbl, diperkirakan akan turun ke USD69/bbl pada tahun 2025 dan turun menjadi USD67/bbl pada tahun 2030, seiring dengan meredanya tensi geopolitik.

Kebijakan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan BI-Rate di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Oktober 2025 mengarahkan ekspektasi inflasi nasional pada tahun 2025 dan 2026 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan September 2025 tercatat 2,65% (yoy). Hal ini sejalan dengan terkendalinya tingkat inflasi inti bulan September 2025 pada level 2,19% (yoy). Sementara itu, kelompok *volatile food (VF)* tercatat inflasi bulan September 2025 sebesar 6,44% (yoy) sejalan dengan terbatasnya pasokan karena berakhirnya masa panen cabai merah dan kenaikan harga input produksi daging ayam ras yang diiringi oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP. Secara spasial, inflasi IHK di berbagai daerah juga terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Lebih lanjut, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarnya. Inflasi inti diperkirakan terjaga dalam sasaran, meskipun meningkat pada September 2025 yang terutama

Tabel 7.4 Rata-rata Provinsi Lampung dan Tendensi Inflasi Tahun 2025

	I			II			III			IV		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2018		0,00	0,18	-0,12	-0,09	0,84	0,36	0,42	-0,08	0,30	0,25	0,42
2019	0,25	-0,05	0,24	0,43	0,65	0,27	0,41	0,12	0,01	-0,04	0,00	0,38
2020	0,89	0,41	-0,35	-0,17	-0,29	0,05	0,31	0,37	-0,22	0,21	0,12	0,66
2021	0,76	0,14	-0,20	-0,17	0,15	0,18	0,15	-0,56	-0,05	0,10	0,53	0,98
2022	0,40	-0,38	0,92	0,86	0,59	1,20	0,73	-0,41	1,32	-0,47	0,01	0,62
2023	0,62	0,16	0,04	0,30	-0,07	0,16	0,05	0,30	0,33	0,30	1,02	0,01
2024	-0,19	0,39	0,36	-0,01	0,09	-0,11	-0,16	0,07	0,05	0,20	0,42	0,47
2025	-0,71	-0,66	1,98	1,19	-0,58	0,04	0,19					
Rata-rata 3 Tahun	0,34	0,06	0,44	0,36	0,20	0,42	0,21	-0,01	0,57	0,01	0,48	0,37
Tendensi	INFLASI	INFLASI	INFLASI	INFLASI	INFLASI	INFLASI	INFLASI	DEFLASI	INFLASI	INFLASI	INFLASI	INFLASI

Sumber: BPS, diolah

dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas global. Kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inflasi Provinsi Lampung

Inflasi Provinsi Lampung pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan terjaga pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ dengan tendensi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data historis, Provinsi Lampung memiliki tendensi inflasi pada tahun 2025 kecuali bulan Agustus, seperti pada Gambar 7.4. Meskipun pada rilis bulan Oktober 2025 lalu, Provinsi Lampung mengalami inflasi yang secara umum didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan belum masuknya masa panen raya. Hal ini turut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan impor pada komoditas strategis untuk mendukung program swasembada pangan pada tahun 2025 yang akan berlanjut di tahun 2026. Adapun harga komoditas bahan bakar dan tarif transportasi mulai memberikan andil inflasi pada awal tahun 2025 terutama bahan bakar rumah tangga bersubsidi yang mengalami kenaikan harga serta normalisasi harga tarif angkutan udara sejalan pascakebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) pada periode libur sekolah lalu. Di sisi lain, inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terus meningkatnya harga emas perhiasan seiring dengan naiknya harga emas dunia.

Lebih lanjut, inflasi pada tahun 2026 juga diperkirakan terjaga pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ sejalan dengan program kebijakan pemerintah pemberian bantuan impor bahan bakar solar dan komoditas strategis lainnya pada tahun 2026 untuk mendukung program swasembada pangan.

7.3. REKOMENDASI

Berdasarkan asesmen terkini, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal, menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko perlambatan ekonomi global, serta risiko inflasi di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik, berikut adalah beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian.

- (1) Perlunya kebijakan transformasi struktural (*structural transformation*) yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Lampung dan keluar dari *commodity trap*. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengalihkan secara bertahap faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital dari sektor yang memiliki produktifitas rendah (*low productivity sectors*) ke tinggi (*high productivity sectors*). Kebijakan transformasi struktural dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu (1) static gains yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja secara keseluruhan, yang dicapai melalui pengalihan tenaga kerja yang bekerja ke sektor ekonomi yang lebih produktif (*inter-sectoral*), dan (2) dynamic gains dimana peningkatan skill tenaga kerja pada sektor ekonomi yang ada (*within-sectoral*).
- (2) Kebijakan transformasi struktural di sektor primer bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang diukur dari kenaikan nilai tukar petani (NTP). Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui percepatan industrialisasi sektor pertanian (*agricultural industrialization*) dengan sasaran untuk meningkatkan output sektor pertanian dengan biaya produksi yang lebih efisien. Peningkatan output dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian melalui program hilirisasi komoditas SDA unggulan (kelapa sawit, karet, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan), kegiatan *reseach & development* untuk mengembangkan diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan *good agricultural practice (GAP)* termasuk digitalisasi pertanian, intensifikasi penggunaan bibit unggul, dan program optimalisasi lahan. Sementara untuk meningkatkan efisiensi produksi dapat dilakukan dengan optimalisasi

- penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat guna serta penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) dalam kegiatan pertanian. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu menyiapkan infrastruktur pendukung seperti revitalisasi infrastruktur sumber daya air. Dalam hal penerapan GAP, aspek keberlanjutan juga perlu menjadi perhatian, terutama pada komoditas perkebunan berorientasi ekspor (kelapa sawit, kopi, karet, kakao, kayu) di tengah meningkatnya tuntutan tanggung jawab ekologi dan sosial, khususnya dari negara-negara Uni Eropa yang menjadi salah satu tujuan ekspor utama Lampung.
- [3] Kebijakan transformasi struktural di sektor industri dilakukan dengan optimalisasi dan pembukaan kawasan industri baru dalam rangka mempercepat transformasi sektor primer menuju sektor industri. Tujuan kebijakan tersebut adalah dengan menambah jumlah industri yang beroperasi di Lampung, sekaligus dapat menambah lapangan pekerjaan.
- [4] Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah guna memastikan setiap pengeluaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Untuk memastikan keberlanjutan program efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja pada program-program prioritas dan produktif yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat seperti membangun infrastruktur yang berkualitas dan menghindari inefisiensi, subsidi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang lebih efektif. Selain itu Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi pengelolaan anggaran yang lebih efisien melalui digitalisasi keuangan pemerintah dan simplifikasi sistem pembayaran pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
- [5] Kebijakan transformasi struktural di sektor jasa adalah dengan meningkatkan peran sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah melalui *Tourism Led Growth Hypothesis* dimana pariwisata menjadi determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah tamu baik wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Lampung. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa alternatif kebijakan yaitu [1] pengembangan modal bisnis pariwisata yang inklusif dan melibatkan seluruh unsur *pentahelix*; [2] meningkatkan kualitas *human capital* melalui pelatihan sesuai kebutuhan industri pariwisata, [3] membangun *institutional capacity* yang melibatkan asosiasi hotel, *tourist guide*, kamar dagang, universitas/sekolah vokasi/sekolah kejuruan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan [4] memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung tingkat persaingan [*competitiveness*] dan inklusifitas.
- [6] Keberhasilan transformasi struktural sangat membutuhkan partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar pendukung konektivitas; perbaikan iklim investasi melalui simplifikasi regulasi dan penguatan jaminan kepastian hukum; inovasi skema insentif fiskal untuk mendorong minat investasi; serta memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, termasuk penyelesaian *bottlenecking* kendala proyek potensial untuk mencapai status *clean and clear*.
- [7] Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Daftar Istilah

Administered prices

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat

Faktor Non Fundamental

Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*)

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perceived risk

Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara

QTQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Sektor ekonomi dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PORB secara keseluruhan.

Volatile food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Bimo Epyanto

Koordinator Penyusun
Achmad P Subarkah

Editor
Fiskara Indawan

Tim Penulis
Fiskara Indawan
Dinni Yuliendhani
Gia Amadea
Khaira Alfatih
Arifiandhita Salsabila Istiyanto
Nurunnadiya Savitri
Sherline Vicky Aisyiyah
Risa Aulia
Rara Gusti Rahmawati
Aulia Fahrunnisa

Kontributor
Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Tim Implementasi KEKDA Provinsi
Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi
Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Jl.Hasanuddin No.38
Bandar Lampung – Lampung, 35225
Tel. (0721) 486-355
Fax. (0721) 481-13





**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Sultan Hasanuddin No.38, Teluk Betung Utara,
Bandar Lampung 35211
Telp. (0721) 496355 / Fax. (0721) 481131
www.bi.go.id